

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga, sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam bab ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2011 ini, didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dilakukan terhadap indikator kinerja sasaran.

Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut :

**Tabel III.1.**  
**Skala Ordinal Capaian Indikator Kinerja Sasaran**  
**Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011**

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai $\geq 100$	SANGAT BAIK
2.	Nilai $85 - < 100$	BAIK
3.	Nilai $70 - < 85$	SEDANG
4.	Nilai $55 - < 70$	KURANG
5.	Nilai $< 55$	SANGAT KURANG

#### **A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011**

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diharapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai, serta membandingkan antara capaian kinerja tahun 2011 dengan kondisi awal RPJMD tahun 2010. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011–2016. Pemerintah Kabupaten Pacitan melaksanakan 19 (sembilan belas) sasaran dan 292 (dua ratus sembilan puluh dua) indikator kinerja sasaran yang juga menjadi indikator kinerja pembangunan daerah.

Capaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Pacitan disusun menurut klasifikasi sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 dengan capaian indikator kinerja sasaran rata-rata pada tahun 2011 sebesar 103,20%. Capaian kinerja ini termasuk dalam kategori “*SANGAT BAIK*”. Secara umum Pemerintah Kabupaten Pacitan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 19 (sembilan belas) sasaran yang dilaksanakan, ada 11 sasaran dengan capaian indikatornya “*SANGAT BAIK*”, 8 sasaran dengan capaian kinerja “*BAIK*”.

Rincian capaian indikator kinerja per-sasaran Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 sebagaimana diuraikan pada tabel III.2. berikut :

**Tabel III.2.**  
**Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran**  
**Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011**

SASARAN	JUMLAH INDIKATOR KINERJA SASARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011	KATEGORI
1	5	91,15	BAIK
2	9	93,31	BAIK
3	14	104,16	SANGAT BAIK
4	10	90	BAIK

SASARAN	JUMLAH INDIKATOR KINERJA SASARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011	KATEGORI
5	3	96,53	BAIK
6	8	103,86	SANGAT BAIK
7	29	98,66	BAIK
8	2	101,53	SANGAT BAIK
9	3	101,93	SANGAT BAIK
10	21	100,51	SANGAT BAIK
11	24	101,27	SANGAT BAIK
12	26	117,00	SANGAT BAIK
13	13	94,24	BAIK
14	12	115,20	SANGAT BAIK
15	5	144,81	SANGAT BAIK
16	47	94,47	BAIK
17	2	107,16	SANGAT BAIK
18	30	96,26	BAIK
19	28	108,77	SANGAT BAIK
<b>JUMLAH/RATA-RATA</b>	<b>291</b>	<b>103,20</b>	<b>SANGAT BAIK</b>

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir Pengukuran Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu program.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang pencapaian tujuan yang diuraikan dalam capaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun 2011, kami uraikan sebagai berikut :

**Tabel III.3.**  
**Capaian Kinerja Sasaran 1 :**  
**“Meningkatnya Profesionalisme Birokrasi Dan Kinerja Aparatur Secara Terencana Dan Sistematis”**

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJM (2010)	2011		KINERJA	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	% PERKEMB.
1. Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya (%)	2,64	3,31	5,24	158,31	2,6
2. PNS yang mengikuti diklat yang seharusnya diikuti/th/jenis diklat (%)	228	353	324	91,78	42,11
3. Jumlah peserta peningkatan SDM pengelola kearsipan	82	106	106	100,00	29,27
4. Aparatur yang dilatih tata pemerintahan desa (%)	0	71,69	0	0,00	0
5. Aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir yang tepat waktu (%)	1,2	1,41	1,49	105,67	0,29
<b>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran I</b>				<b>91,15</b>	

Sasaran 1 : "Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis", dengan capaian indikator kinerja rata-rata pada tahun 2011 sebesar 91,15% termasuk kategori *“BAIK”*, dan didukung oleh 5 (lima) indikator kinerja sasaran.

Penjelasan terhadap capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Indikator persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya, pada tahun 2011 dari target 3,31% terealisasi sebesar 5,24% sehingga capaian kinerjanya 158,31%. Apabila dibanding dengan kondisi

awal RPJMD tahun 2010, realisasi capaian persentase aparatur yang memiliki kompetensi aparatur sesuai bidang tugasnya tahun 2011 meningkat sebesar 2,6%

- 2 Pada indikator kinerja PNS yang mengikuti diklat yang seharusnya diikuti/tahun/jenis diklat yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Kantor Pendidikan dan Pelatihan dari target sebesar 353 orang hanya dapat terealisasi sebesar 324 orang sehingga capaian indikator ini sebesar 91,78%, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Diklat Struktural

Diklat Struktural diarahkan untuk memenuhi standar kompetensi Pejabat Struktural khususnya Pejabat Eselon III dan eselon IV. Pada tahun 2011 ini telah dilaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat III untuk pejabat eselon III sejumlah 40 orang dengan kualifikasi 2 orang MEMUASKAN dan 38 Orang BAIK SEKALI, sedangkan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV untuk pejabat eselon IV sejumlah 80 orang, dengan kualifikasi 4 orang MEMUASKAN dan 76 orang BAIK SEKALI.

- b. Diklat Fungsional

Pada tahun 2011 Diklat Fungsional diarahkan untuk memenuhi standar kompetensi pejabat fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dengan peserta berjumlah 24 orang.

- c. Diklat Teknis

Diklat teknis diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemampuan aparatur dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas kedinasan. Pada tahun 2011 ini diarahkan pada:

- Diklat Penatausahaan Aset / Barang Daerah dengan sasaran kepada pemegang/pengurus barang di lingkup SKPD berjumlah 40 orang.
- Diklat Standar Akuntansi Pemerintah dengan sasaran kepada Pejabat Penatausahaan SKPD untuk dapat mengaplikasikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berjumlah 40 orang.
- Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dengan jumlah peserta 100 orang, lulus ujian 12 orang.

Ketidakterpenuhinya target sebesar 353 disebabkan oleh terbatasnya anggaran untuk pengiriman dan pelaksanaan diklat. Namun demikian kondisi tersebut meningkat sebanyak 96 orang atau 42,11% dibanding dengan kondisi awal RPJMD yaitu sejumlah 228 peserta yang mengikuti diklat pada tahun 2010

- 3 Indikator Jumlah peserta peningkatan SDM pengelola kearsipan, Jumlah Peserta Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan, dari target sebesar 106 peserta pada tahun 2011 dapat terealisasi 106 peserta, sehingga dapat memenuhi target. Keberhasilan indikator ini ditunjang oleh Program Arsip Masuk Desa (AMD) di Kabupaten / Kota, diantaranya Kabupaten Pacitan melaksanakan kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan bagi Sekretaris Desa (PNS) dan Sekretaris Kelurahan, yang setiap tahunnya berkemampuan mengadakan Bimbingan Teknis (Bintek) berbasis Arsip Masuk Desa (AMD), sebanyak 24 Sekretaris Desa / Kelurahan. Apabila dibanding dengan tahun 2010 dengan jumlah peserta sebanyak 82 peserta maka realisasi tahun 2011 meningkat sebesar 29,27%.

- 4 Indikator persentase Aparatur yang dilatih tata pemerintahan desa, dari target tahun 2011 sebesar 71,69% terealisasi 0%, target 2011 0% terealisasi 0% selama tahun anggaran 2010 – 2011 kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan dikarenakan pada indikator ini tidak ada alokasi kegiatan. Hal ini sama dengan kondisi pada awal RPJMD yaitu juga belum terdapat peningkatan jumlah aparatur yang dilatih tata pemerintahan desa
- 5 Indikator persentase Aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir yang tepat waktu, pada tahun 2011 dari target 1,41% terealisasi sebesar 1,49% sehingga capaian kinerjanya 105,67%. Peningkatan ini berbanding lurus atau meningkat sebesar 0,29% dibanding dengan kondisi awal RPJMD.

**Tabel III.4.**  
**Capaian Kinerja Sasaran 2 :**  
**“Tercapainya SPM Daerah”**

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJM (2010)	2011		KINERJA	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	% PERKEMB.
1. SPM yang diterapkan	13	13	14	107,69	7,69
2. SKPD yang mencapai target SPM %	6,6	13	0	0	0
3. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,67	0,71	0,75	105,63	0,08
4. Bayi berakte kelahiran(%)	95	97	98,01	101,04	3,01
5. Pasangan berakte nikah(%)	100	100	100	100,00	0,00
6. Kepemilikan KTP (%)	67,72	71,1	88,25	124,12	7,70
7. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)	60,72	64,79	64,93	100,22	4,21
8. Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (%)	83,88	85,88	86,85	101,13	2,97
9. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	Sudah	100	0,00
<b>Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran 2</b>				<b>93,31</b>	



Sasaran 2 : ” Tercapainya SPM Daerah”, dengan capaian indikator kinerja rata-rata pada tahun 2011 sebesar 93,31% termasuk kategori “*Baik*”, dan didukung oleh 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran.

Penjelasan terhadap capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- Jumlah SPM yang diterapkan, dari target sebesar 13 jenis SPM yang akan diterapkan, pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Pacitan dapat menerapkan sebanyak 14 jenis SPM, penambahan jumlah SPM yang diterapkan ini dikarenakan telah terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Karena SPM adalah hal yang wajib diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota maka Pemerintah Kabupaten Pacitan segera menindaklanjuti dengan melaksanakannya. Capaian kinerja indikator jumlah SPM yang diterapkan pada tahun 2011 adalah sebesar 107,69%.

14 SPM yang diterapkan antara lain:

1. SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah
2. SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
3. SPM Bidang Sosial
4. SPM Bidang Kesehatan
5. SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
6. SPM Lingkungan Hidup
7. SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
8. SPM Bidang Pendidikan Dasar

9. SPM Bidang Ketenagakerjaan
  10. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  11. SPM Bidang Ketahanan Pangan
  12. SPM Bidang Kesenian
  13. SPM Bidang Kominfo
  14. SPM Bidang Perhubungan
- Indikator SKPD yang mencapai target SPM, dari target sebesar 13 SKPD pada tahun 2011 belum ada SKPD yang mencapai target SPM secara keseluruhan, meskipun demikian sudah terdapat beberapa indikator SPM yang capaiannya dapat terpenuhi dan bahkan terdapat indikator yang capaiannya melebihi target SPM sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Berikut pembahasan pencapaian SPM per bidang urusan sebagai berikut:

**Tabel III.5.**  
**Capaian SPM Per Masing - Masing Bidang**

NO	SPM BIDANG	SKPD YANG MENANGANI	% CAPAIAN RATA-RATA	
			2010	2011
1	Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	33,70	33,81
2	Pemerintahan Dalam Negeri	1. Dukcapil	73,13	97,89
		2. Kesbangpol & linmas		
		3. Satpol PP		
3	Sosial	Dinsosnakertrans	59,00	53,91

4	Kesehatan	Dinkes	67,61	89,82
5	Yandu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Badan KBPP	50,91	64,00
6	Lingkungan Hidup	Kantor LH	43,61	99,26
7	KB & KS	Badan KBPP	93,35	94,90
8	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	61,75	77,41
9	Ketenagakerjaan	Dinsosnakertrans	51,00	51,83
10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	72,89	88,50
		2. Dinas Bina Marga dan Pengairan		
		3. PDAM		
		4. KPP		
11	Ketahanan Pangan	Kantor Ketahanan Pangan	106,00	92,15
12	Kesenian	Dinas Budparpora	79,52	82,75
13	Kominfo	1. Dinas Hubkominfo	94,44	84,26
		2. Bag Humas		
		3. PDE		
14	Perhubungan	Dinas Hubkominfo	0	87,50

Berdasarkan tabel III.5 tersebut akan diuraikan per bidang , sehingga dapat diketahui persentase capaian indikatornya, baik yang mencapai target 100% atau lebih maupun indikator yang capaiannya kurang dari 100% atau tidak mencapai target.

Lebih lanjut pembahasan SPM per bidang disajikan sebagai berikut:

#### 1. SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

(berdasarkan Permenpera Nomor 22 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota)

**Tabel III.6.**  
**Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Pacitan**  
**Tahun 2011**

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			CAPAIAN KINERJA KABUPATEN			
	INDIKATOR	TARGET (%)	BATAS WAKTU	Th 2010 (%)	Tahun 2011		
					Target	Realisasi	% capaian
1	<i>Rumah layak huni dan terjangkau</i>						
a	cakupan ketersediaan rumah layak huni Terjangkau	100	2025	101,10	88,12	89,37	101,4
2	<i>Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)</i>						
a	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100	2025	0	0	0	0
Rata-rata capaian				33,70			33,81

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Pacitan tahun 2011

Berdasarkan tabel diatas capaian SPM bidang perumahan rakyat Kabupaten Pacitan tahun 2011 sebesar 33,81% apabila dibanding dengancapaian tahun 2010 sudah meningkat sebesar 0,11%. Dari 3 indikator yang mendukung SPM ini terdapat 2 indikator yang capaiannya 0%, hal ini disebabkan karena pada tahun 2011 Kabupaten Pacitan masih memfokuskan pada ketersediaan rumah layak huni bagi penduduk kabupaten pacitan karena hal ini dipandang sangat mendesak untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat. Selain itu keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kabupaten Pacitan juga menjadi faktor kendala yang menghambat pencapaian target. Untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pacitan telah

mengambil suatu terobosan antara lain dengan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara Deputi Menpera Bidang Perumahan Formal dengan Bupati Pacitan Jatim, No.06/SKB/DF/VIII/2011 dan No.648.11/13/408.21/2011 tentang Penyediaan Rumah Murah bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah dan PNS di Kabupaten Pacitan Prop. Jatim. Dengan adanya kesepakatan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian SPM bidang perumahan rakyat.

## 2. SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

(Permendagri No 62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota)

**Tabel III.7.**  
**Capaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Pacitan Tahun 2011**

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			CAPAIAN KINERJA KABUPATEN			
	INDIKATOR	TARGET (%)	BATAS WAKTU	Th. 2010 (%)	Tahun 2011		
					Target	Realisasi	% capaian
1	<i>Pelayanan dokumen kependudukan</i>						
a	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	100	2011	89,09	100	75,42	75,42
b	Cakupan penerbitan akta kelahiran	100	2011	116,42	100	64,93	64,93
2	<i>Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat</i>						
a	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) di kabupaten/kota	50	2015	22,22	1.766	2.771	156,91
b	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten/kota	70	2010	85,71	70	98	140,00

3	Penanggulangan bencana kebakaran						
a	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	25	2015	92	352	176,26	50,07
b	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	75	2015	33,33	10	10	100,00
Rata-rata capaian				73,13			97,89

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Pacitan tahun 2011  
 Satuan Polisi Pamong Praja Kab Pacitan tahun 2011  
 Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat tahun 2011

Capaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pacitan tahun 2011 sebesar 97,89% atau meningkat 62,35% dibanding capaian tahun 2010. Dari 6 indikator terdapat 4 indikator yang dapat mencapai target SPM, dan 3 indikator yang belum dapat memenuhi target SPM.

SPM bidang pemerintahan umum ini terbagi ke dalam 3 kelompok yaitu:

1. Pelayanan dokumen kependudukan dengan indikator :

- cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk pada tahun 2011, baru terealisasi sebesar 75,42%, dengan capaian 75,42%.
- Cakupan penerbitan akta kelahiran pada tahun 2011, terealisasi 64,93% dengan capaian 64,93%.

Tidak terpenuhinya target 100% pada tahun 2011 sesuai dengan SPM disebabkan oleh kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan juga karena faktor kondisi geografis Kabupaten Pacitan yang bergunung-gunung dengan kondisi infrastruktur yang terbatas sehingga petugas maupun pencari dokumen kependudukan merasa kesulitan. Walaupun demikian Pemerintah Kabupaten

Pacitan tetap berusaha memberikan kemudahan dalam hal pelayanan kependudukan dengan sistem pelayanan pro aktif/jemput bola ke wilayah yang sulit dijangkau dengan menggunakan mobil Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK) pada setiap hari kerja

2. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator :

- Cakupan petugas linmas di Kabupaten/Kota pada tahun 2011 sebesar 159,61%. Capaian ini sudah melebihi target yang telah ditetapkan dalam SPM yaitu sebesar 50% pada tahun 2015
- Tingkat penyelesaian pelanggaran K-3 di kabupaten/kota pada tahun 2011 terealisasi 140% dari target 70%. Capaian ini meningkat 54,29% dibanding capaian tahun 2010.

3. Penanggulangan bencana kebakaran dengan indikator :

- Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota pada tahun 2011 dari target 352 terealisasi 176,26. Dengan capaian indikator sebesar 50,07%. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan dalam SPM yaitu 25% pada tahun 2015.
- Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen dapat terealisasi 10 menit, capaian ini melebihi target yang ditetapkan dalam SPM yaitu 75 menit pada tahun 2015

### 3. SPM BIDANG SOSIAL

(Permen Sosial No 129 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota)

**Tabel III.8.**  
**Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2011**

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			CAPAIAN KINERJA KABUPATEN			
	INDIKATOR	TARGET (%)	BATAS WAKTU	Tahun 2010 (%)	Tahun 2011		
					Target	Realisasi	% capaian
1	<i>Pelaksanaan program bidang sosial</i>						
a	Persentase PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80	2008 - 2015	60	1.397	460	32,93
b	Persentase PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80	2008 - 2015	51	1.397	460	32,93
2	<i>Penyediaan sarana dan prasarana sosial</i>						
a	Persentase panti sosial skala kab/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80	2008 - 2015	94	80	75,2	94
b	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60	2008 - 2015	43	60	25,8	43
3	<i>Penanggulangan korban bencana</i>						
a	Persentase korban bencana skala kab/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80	2008 - 2015	92	80	73,6	92
b	Persentase korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80	2008 - 2015	46	17.961	6.508	36,23
4	<i>Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial</i>						
a	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40	2008 - 2015	25	7.436	3.181	42,78
<b>Rata-rata capaian</b>				<b>59</b>			<b>53,41</b>

Sumber data: Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan tahun 2011



Capaian SPM bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pacitan tahun 2011 sebesar 53,41% atau menurun sebesar 5,59% dibanding capaian tahun 2010. Dari 7 indikator terdapat 3 indikator yang dapat mencapai target SPM dan 4 indikator yang belum mencapai target SPM. Meskipun demikian batas waktu pencapaian SPM bidang sosial ini masih sampai dengan tahun 2015, sehingga target tersebut bisa dipenuhi sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam SPM tersebut

SPM bidang sosial ini terbagi ke dalam 4 kelompok yaitu:

1. Pelaksanaan program bidang sosial dengan indikator :

- Persentase PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2011 capaiannya sebesar 32,93%. Capaian ini belum dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam SPM yaitu 80% sampai dengan tahun 2015.
- Persentase PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya capaian pada tahun 2011 sebesar 32,93%, capaian ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan dalam SPM yaitu 80% yang harus dicapai sampai dengan tahun 2015, sehingga masih ada waktu untuk memenuhi target tersebut.

2. Penyediaan sarana dan prasarana sosial dengan indikator :

- Persentase capaian panti sosial skala kab/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial serta Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana pra sarana pelayanan kesejahteraan sosial pada tahun 2011 masih sama dengan kondisi tahun 2010, akan tetapi batas waktu pencapaian untuk indikator ini masih sampai dengan tahun 2015 sehingga kabupaten kota masih diberi kesempatan untuk mencapai target SPM tersebut.

3. Penanggulangan korban bencana dengan indikator :

- Persentase korban bencana skala kab/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat capaiannya masih sama dengan tahun 2010 yaitu 92%. akan tetapi batas waktu pencapaian untuk indikator ini masih sampai dengan tahun 2015 sehingga kabupaten kota masih diberi kesempatan untuk mencapai target SPM tersebut
- Persentase korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap di kabupaten pacitan pada tahun 2011 tercapai sebesar 36,23%. Dari sejumlah 17.691 penduduk yang terkena bencana, 6.508 telah mendapat penanganan yang baik. Capaian ini memang masih jauh dari target yang harus dicapai dalam SPM yaitu 80%, akan tetapi target tersebut bisa dicapai sampai dengan tahun 2015.

4. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial dengan indikator :

- Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial pada tahun 2011 dapat tercapai sebesar 42,78% sehingga capaian tersebut melebihi dari target SPM sebesar 40.

**4. SPM BIDANG KESEHATAN**

(Permenkes Nomor 741 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan)

**Tabel III.9.  
Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2011**

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			CAPAIAN KINERJA KABUPATEN				
	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU	Th 2010	Tahun 2011			
					Target %	Realisasi		% capaian
						Pembilang	Penyebut	
I	<i>Pelayanan Kesehatan Dasar</i>							
1	Cakupan kunjungan ibu hamil K-4	95	2015	87,75 %	91	7.200	8.316	86,58 %
2	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80	2015	90,92 %	80	1.711	1.663	102,89 %
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90	2015	98,61 %	93	7.535	7.636	98,68 %
4	Cakupan pelayanan nifas	90	2015	101,13 %	95	7.656	7.636	100,26 %
5	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80	2010	80	73	1.075	1.135	94,71 %
6	Cakupan kunjungan bayi	90	2010	90	90	7.772	7.560	102,80 %
7	Cakupan desa/kel Universal Child Immunization (UCI)	100	2010	100	≥ 95	47	171	27,49 %
8	Cakupan pelayanan anak balita	90	2010	90	81	22.904	29.407	77,89 %
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bln keluarga miskin	100	2010	100	100	1.521	3.315	45,88 %

10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	2010	100	100	38	38	100,0 0%
11	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100	2010	100	100	8.109	8.109	100,0 0%
12	Cakupan peserta KB aktif	70	2010	70	70	129.1 76	140.1 89	92,14 %
13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit							
a	Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	$\geq$ 2/100.rb	Per/th	$\geq$ 2/100.rb	$\geq$ 2/100.rb	3	120.9 93	2,48 %
b	Penemuan penderita pneumonia balita	100	2010	100	70	2.234	3.697	60,43 %
c	Penemuan pasien baru TB BTA positif	100	2010	100	70	164	576	28,47 %
d	Penderita DBD yang ditangani	100	2010	100	100	256	256	100,0 0%
e	Penemuan penderita diare	100	2010	100	75	4.819	22.86 4	21,08 %
14	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	100	2015	25,38 %	95	64.86 1	189.9 03	34,15 %
II	<i>Pelayanan Kesehatan Rujukan</i>							
15	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	2015	55,88 %	100	1.865	2.804	65,47 %
16	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/kota	100	2015	100,0 0%	85	1	1	100,0 0%
III	<i>Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB</i>							
17	Cakupan desa/kel mngalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	2015	100,0 0%	$\geq$ 90	16	16	100,0 0%
IV	<i>Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>							
18	Cakupan desa siaga aktif	80	2015	49,71 %	40	129	171	75,44 %
<b>Rata-rata capaian</b>				67,61 %				89,82 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Pacitan Tahun 2011

Capaian SPM bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pacitan tahun 2011 sebesar 89,82% atau meningkat 22,21% dibanding capaian tahun 2010. Dari 22 indikator yang mendukung SPM bidang kesehatan ini terdapat 12 indikator yang dapat mencapai target SPM dan 10 indikator yang capaiannya masih dibawah target SPM.

Capaian indikator SPM bidang Kesehatan dihitung dengan penyebut merupakan data proyeksi sasaran kesehatan yang diterbitkan Dinkes Propinsi Jawa Timur karena sasaran per kelompok umur tidak bisa ditetapkan angka riilnya mengikuti perkembangan umur manusia. Sedangkan data proyeksi tersebut di beberapa kelompok umur dan wilayah tidak bisa mendekati data riil.

1. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi Yang Ditangani

Tidak ada masalah terhadap capaian ini karena target 73% merupakan target Kab/Kota se-Propinsi Jawa Timur untuk tahun 2011 berdasar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor 440/5142/101.3/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 perihal Revisi Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten/Kota, sedangkan target 80% merupakan target SPM lama berdasar Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Baik dengan target 73% atau 80%, capaian indikator cakupan

neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 sudah melampaui target karena sudah tercapai 94,71%. Dari perkiraan (proyeksi sasaran sebesar 15% dari jumlah bayi umur 0-28 hari) sebesar 1.135 neonatus, realisasinya 1.075 yang ditangani.

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi yang ditangani sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih di sarana pelayanan kesehatan. Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelaianan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR, sindroma gangguan pernafasan dan kelainan kongenital. Pelayanan neonatus komplikasi diberikan oleh bidan atau dokter di polindes, praktek bidan, puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit.

## 2. Indikator Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program imunisasi secara nasional adalah angka UCI. *Universal Child Immunization (UCI)* adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, WUS dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, 1

dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis TT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis TT. Cakupan Desa/Kelurahan UCI adalah desa/kelurahan dimana  $\geq 80\%$  dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Pada tahun 2011 dari total 171 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Pacitan, target desa/kelurahan UCI adalah 95% atau 162 desa/kelurahan sedangkan realisasinya ada 47 desa/kelurahan atau 27,49% mencapai UCI. Dalam arti 47 desa tersebut telah mencapai target minimal pada semua antigen program imunisasi. Pada tahun 2011 belum mencapai target karena :

- Pada pertengahan tahun 2011 ada peningkatan target beberapa antigen pada kontak pertama diantaranya DPT HB 1 (0-7 hari) dari 90% menjadi 95%, BCG dari 90% menjadi 95%, Polio 1 dari 90% menjadi 95% sehingga banyak desa yang tidak bisa mencapai UCI dengan target baru tersebut.
- Karena capaian indikator ini dihitung dengan penyebut dalam bentuk proyeksi jumlah sasaran bayi usia 0-11 bulan yang pada kenyataannya data proyeksi yang diterbitkan BPS dan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur tidak mendekati angka riil di lapangan per desa/kelurahan sehingga beberapa desa/kelurahan tidak bisa mencapai UCI.
- Apabila memakai data riil jumlah bayi yang mendapat pelayanan imunisasi dari petugas kesehatan maka capaian

indikator desa/kelurahan UCI di Kabupaten Pacitan tahun 2011 sudah mencapai 100%.

3. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan Anak Balita adalah anak umur 12-59 bulan yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 2 kali dalam setahun berupa pengukuran berat badan per tinggi badan(BB/TB), perkembangan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya dengar dan daya lihat. Pemantauan petugas kesehatan dilaksanakan selain di dalam gedung (puskesmas, pustu, polindes, poskesdes) juga di luar gedung seperti di posyandu, taman bermain, PAUD, Taman Penitipan Anak dan Taman Kanak-Kanak atau setingkat.

Capaian tahun 2011 sebesar 77,89% dari target sebesar 81% sehingga capaian kinerjanya 96,16%. Jumlah riil kunjungan anak balita tahun 2011 adalah 22.904 anak dari 29.407 anak balita. Masih belum tercapai dari target yang ditetapkan karena :

- Kesadaran orang tua masih kurang sehingga anak balitanya tidak dibawa ke posyandu.
- Juga adanya perubahan/tambahan format laporan yang dibuat berdasarkan data gender (laki-laki dan perempuan), sehingga tenaga di lapangan (bidan) masih kesulitan memilah data.
- Belum semua tenaga bidan di Kabupaten Pacitan yang terlatih Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) karena minimnya



anggaran Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, pada tahun 2011 hanya sebesar 50 juta hanya cukup untuk kegiatan pertemuan koordinasi dan monitoring program ke puskesmas.

4. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin adalah pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin selama 90 hari. Target pada tahun 2011 adalah 100% sedangkan realisasi baru mencapai 45,88% sehingga capaian kinerjanya 45,88% dalam kategori sangat kurang. Jumlah sasaran anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI adalah 1.521 anak, sedangkan jumlah proyeksi sasaran adalah 3.315 anak.

Rendahnya capaian indikator kinerja ini dikarenakan beberapa hal antara lain :

- a. Terbatasnya alokasi anggaran gizi di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 hanya sebesar 25 juta, sehingga tidak bisa untuk mengakomodasi kepentingan program termasuk untuk pengadaan MP-ASI.
- b. Minimnya kebijakan di tingkat puskesmas untuk menganggarkan dana pengadaan MP-ASI karena dianggap kegiatan yang kurang penting.

Apabila dihitung kebutuhan anggaran untuk pengadaan MP-ASI anak usia 6-24 bulan keluarga miskin dibutuhkan anggaran

sebesar Rp. 1.790.100.000,00, dengan perhitungan sebagai berikut :

@ anak 1 hari MP-ASI = Rp. 6.000,00

Standar pelayanan 90 hari pemberian MP-ASI @ anak 90 hari x  
Rp.6.000,00 = Rp.540.000.00

Proyeksi jumlah sasaran 3.315 anak = 3.315 x Rp.540.000,00 =  
Rp.1.790.100.000,00

5. Penemuan Penderita Pneumonia Balita

Cakupan penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita dari target 70% dapat terealisasi sebesar 60,43% sehingga capaian kinerja pada tahun 2011 sebesar 86,33%. Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita adalah 10% dari jumlah balita. Jumlah balita tahun 2011 adalah 36.967 anak sehingga jumlah perkiraan balita pneumonia adalah 10% jumlah balita yaitu 3.697 balita. Sampai akhir 2011 penemuan pneumonia pada ISPA balita mencapai 2.234 kasus. Pneumonia pada balita mendapat perhatian yang banyak pada program kesehatan karena pneumonia merupakan salah satu penyebab kematian balita yang utama. Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru yang ditandai dengan batuk disertai napas cepat dan/atau kesukaran bernafas. Kesukaran bernafas adalah penyebab kematian balita akibat pneumonia.

Permasalahan yang dihadapi terhadap minimnya capaian indikator ini adalah :

- a. Pojok MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) di puskesmas tidak berjalan maksimal. Kemampuan sumber daya manusia di Puskesmas dan jaringannya dalam mendiagnosa pneumonia balita masih kurang, karena belum semua bidan dan perawat terlatih MTBS. Hal ini dikarenakan anggaran untuk pelatihan MTBS tidak tersedia disebabkan minimnya anggaran di Dinas Kesehatan.
  - b. Banyak pasien berobat ke sarana pelayanan kesehatan swasta seperti dokter praktek swasta, klinik, balai pengobatan swasta dan RSUD yang tidak melaporkan datanya ke Dinas Kesehatan.
6. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif
- Angka penemuan pasien baru TB BTA Positif atau *Case Detection Rate (CDR)* adalah persentase jumlah penderita baru TB BTA Positif yang ditemukan dibanding dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA Positif dalam waktu satu tahun. Target penemuan pasien baru TB BTA Positif dalam SPM Bidang Kesehatan adalah 70% sedangkan target dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 adalah 24% sedangkan realisasinya 28,47%. Jumlah pasien baru TB BTA Positif tahun 2011 sebanyak 164 orang dari 576 perkiraan pasien baru TB BTA Positif.

Rendahnya capaian indikator ini dikarenakan beberapa hal yaitu :

- a. Penemuan penderita baru (CDR) masih rendah, ada 8 puskesmas (33,33%) yang belum menemukan penderita, karena petugas belum terlatih penatalaksanaan pasien baru TB BTA Positif.
- b. Pemeriksaan suspek rendah, ada puskesmas yang tidak bisa menemukan suspek, karena petugas laboratorium belum terlatih serta sarana laboratorium yang belum memenuhi syarat.
- c. Banyak pasien berobat ke sarana pelayanan kesehatan swasta atau ke luar kota sehingga tidak terdata di Dinas kesehatan.

7. Penemuan Penderita Diare

Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare dari jumlah penderita yang datang dan dilayani di sarana kesehatan sesuai standar. Jumlah penderita diare pada tahun 2011 sebanyak 4.819 orang. Angka kesakitan penyakit diare tahun 2011 adalah 8,25 per 1000 penduduk. Sedangkan angka penemuan penderita diare di Kabupaten Pacitan tahun 2011 sebesar 21,08% sehingga capaian kinerja indikator ini 28,10%. Penyebut dari indikator ini adalah perkiraan jumlah penderita diare yaitu 10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk. Perkiraan/proyeksi jumlah penderita diare Kab. Pacitan tahun 2011 adalah  $10\% \times (423/1.000 \times 540.510) = 22.864$  orang.

Rendahnya capaian penemuan penderita diare dikarenakan :

- a. Kasus penyakit diare semakin menurun dibuktikan dari angka kesakitan diare Kabupaten Pacitan tahun 2011 hanya 8,25 per 1.000 penduduk sedangkan angka kesakitan diare nasional dalam SPM adalah 423/1.000 penduduk. Ini merupakan keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pacitan mampu menekan kasus diare.
  - b. Banyak penderita diare berobat ke pelayanan kesehatan swasta dan RSUD sehingga kasus penyakit diare tidak dilaporkan di SPM.
8. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin ke sarana kesehatan strata 1 (puskesmas) baik rawat inap maupun rawat jalan. Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Pacitan yang tercover Jamkesmas pada tahun 2011 adalah 187.191 jiwa dan jumlah maskin tercover Jamkesda Propinsi Jawa Timur sebanyak 2.712 jiwa sehingga total maskin adalah 189.903. Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin tahun 2011 sebanyak 64.861 kunjungan dibandingkan jumlah seluruh masyarakat miskin sebanyak 189.903 jiwa atau sebesar 34,15% dari target 95%. Yang terdiri dari 62.756 kunjungan rawat jalan dan 2.105 kunjungan rawat inap di puskesmas. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin ditunjang anggaran

dari Pemerintah Pusat melalui Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) tahun 2011 dan Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Propinsi Jawa Timur Tahun 2011. Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin dikarenakan :

Definisi operasional indikator ini adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata 1 (Puskesmas) dibandingkan jumlah seluruh masyarakat miskin yang ada di Kabupaten/Kota. Sedangkan tidak semua masyarakat miskin sakit atau membutuhkan pelayanan kesehatan sehingga capaian kinerjanya hanya sekitar 30%. Sedangkan bila mengacu pada jumlah pasien miskin yang berkunjung ke puskesmas seluruhnya sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

## 5. SPM BIDANG PELAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

(Permen PP dan PA Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan)

**Tabel III.10.**  
**Capaian SPM Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Pacitan Tahun 2011**

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			CAPAIAN KINERJA KABUPATEN			
	INDIKATOR	TARGET (%)	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	Th 2010	Tahun 2011		
					Target	Realisasi	% capaian
1	<i>Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak</i>						
a	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100	2014	42,86	70	30	42,86

	pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu						
2	<i>Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan</i>						
a	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas maupun tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS	100	2014	50	60	30	50,00
3	<i>Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan</i>						
a	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75	2014	40	50	20	40,00
b	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75	2014	50	50	25	50,00
4	<i>Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan</i>						
a	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80	2014	80	40	25	62,50
b	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	50	2014	50	30	20	66,67
5	<i>Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan</i>						
a	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50	2014	50	15	15	100,00
b	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	2014	44,44	30	30	100,00
<b>Rata-rata capaian</b>				<b>50,91</b>			<b>64,00</b>

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Pacitan Tahun 2011

Rata-rata capaian SPM Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan pada tahun 2011 sebesar 64,00% atau meningkat 13,09% dibanding dengan rata –rata capaian pada tahun

2010. Akan tetapi bila dibanding dengan target yang telah ditetapkan dalam SPM, realisasi dari masing-masing indikator belum dapat memenuhi target, hal ini disebabkan batas waktu pencapaian dalam SPM ditetapkan sampai dengan tahun 2014. Dari 8 indikator yang mendukung SPM bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan terdapat 3 indikator yang dapat mencapai target SPM dan 5 indikator lainnya belum dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam SPM. Berikut pembahasan dari masing-masing indikator sesuai dengan kelompok indikatornya;

a. Penanganan pengaduan/laporan korban dengan indikator:

- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu pada tahun 2011 terealisasi 30% dari target 70% pada tahun 2011. Sehingga capaian indikatornya sebesar 42,86%.

b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator:

- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga terlatih di puskesmas maupun tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS pada tahun 2011 terealisasi 30% dari target 60% pada tahun 2011. Sehingga capaian indikatornya sebesar 50%. Capaian ini sama dengan capaian pada tahun 2010.



- c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator:
- Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan petugas rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam unit pelayanan terpadu pada tahun 2011 terealisasi 20% dari target 50% pada tahun 2011. Sehingga capaian indikatornya sebesar 40%. Capaian ini sama dengan capaian pada tahun 2010.
  - Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan petugas rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam unit pelayanan terpadu pada tahun 2011 terealisasi 25% dari target 50% pada tahun 2011. Sehingga capaian indikatornya sebesar 50%. Capaian ini sama dengan capaian pada tahun 2010
- d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator:
- Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan pada tahun 2011 terealisasi 25% dari target 40% pada tahun 2011. Sehingga capaian indikatornya sebesar 62,5%. Capaian ini sama dengan menurun apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2010 yaitu sebesar 80%

- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat bantuan hukum dari target 30% baru terealisasi 20% sehingga capaiannya sebesar 66,67%. Walaupun belum dapat mencapai target SPM akan tetapi capaian ini telah mengalami peningkatan apabila dibandingkan capaian tahun 2010
- e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator:
  - Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada tahun 2011 terealisasi 15% dari target 15% pada tahun 2011. Sehingga capaian indikatornya sebesar 100%. Walaupun belum dapat mencapai target SPM akan tetapi capaian ini telah mengalami peningkatan apabila dibandingkan capaian tahun 2010
  - Cakupan layanan reintegrasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada tahun 2011 terealisasi 30% dari target 30% pada tahun 2011. Sehingga capaian indikatornya sebesar 100%. Walaupun belum dapat mencapai target SPM akan tetapi capaian ini telah mengalami peningkatan apabila dibandingkan capaian tahun 2010

## 6. SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN/KOTA

(Permen LH No 18 Tahun 2008 tentang SPM Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota)

**Tabel III.11.**  
**Capaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan**  
**Tahun 2011**

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			CAPAIAN KINERJA KABUPATEN			
	INDIKATOR	TARGET (%)	BATAS WAKTU	Th 2010	Tahun 2011		
					Target	Realisasi	% capaian
1	<i>Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air</i>						
a	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	60	2011	50	60	60	100%
2	<i>Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak</i>						
a	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara	60	2011	50	60	62,5	104,17 %
3	<i>Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa</i>						
a	Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan	60	2011	50	60	30	50%
-	Penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah melalui keputusan bupati/walikota						
-	Penyampaian informasi status kerusakan lahan dan/atau Tanah melalui media cetak, media elektronik, dan/atau papan Pengumuman						

4	<i>Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingk.</i>						
a	% Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	70	2011	60	70	100	142,86 %
<b>Rata-rata capaian</b>							<b>99,26 %</b>

Sumber: Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pacitan Tahun 2011

Capaian SPM bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota di Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 sebesar 99,26%. Dari 4 indikator yang mendukung SPM bidang Lingkungan Hidup terdapat 1 indikator yang belum dapat mencapai target SPM, sedangkan 3 indikator lainnya telah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dalam SPM. Keempat indikator tersebut dikelompokkan dalam 4 kelompok antara lain:

- a. Pelayanan pencegahan pencemaran air, dengan indikator:
  - Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air tahun 2011 terealisasi sebesar 60% dari target SPM 60%. Sehingga capaian pada tahun 2011 sebesar 100%. Berdasarkan hasil inventarisasi dan sesuai perencanaan, pada tahun 2011 terdapat 15 jenis usaha/kegiatan yang dirpioritaskan untuk dipantau, 9 diantaranya sudah memenuhi/mentaati persyaratan baik secara administratif maupun secara teknis.

b. Pelayanan Pencegahan Pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, dengan indikator:

- Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara pada tahun 2011 terealisasi sebesar 62,5%. Realisasi ini melebihi target yang diteapkan dalam SPM yaitu 60%, sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 104,17%. Dari sejumlah 8 jenis usaha/kegiatan sumber tidak bergerak yang diprioritaskan untuk dipantau, 5 diantaranya telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara.

c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa, dengan indikator:

- Prosentase luasan lahan/tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan pada tahun 2011 capaiannya masih sebesar 50% atau sama dengan capaian tahun 2010. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2011 belum ada alokasi dukungan anggaran, langkah awal yang dilakukan pada tahun 2011 telah dilaksanakan inventarisasi awal terhadap kerusakan lahan/tanah akibat produksi biomassa dengan menggunakan kriteria kekritisian lahan.

d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan, dengan indikator:

- Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya

dugaan pencemaran/perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti pada tahun 2011 dapat terealisasi sebesar 100%. Pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun 2011 sejumlah 12 laporan yang terdiri dari 8 laporan tentang pencemaran air, 1 laporan tentang pencemaran udara dan 3 laporan tentang kerusakan lingkungan secara seluruhnya dapat ditindaklanjuti dengan baik sehingga capaiannya 100%. Capaian dan realisasi indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan dalam SPM yaitu sebesar 70%.

## 7. SPM BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

(Peraturan Kepala BKKBN No 55/HK-1/B5 tahun 2010)

**Tabel III.12.**  
**Capaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**  
**Kabupaten Pacitan Tahun 2011**

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			CAPAIAN KINERJA KABUPATEN			
	INDIKATOR	TARGET (%)	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	Th 2010	Tahun 2011		
					Target	Realisasi	% capaian
1	<i>Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB &amp; KS)</i>						
a	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun 3,5%	100	2014	217,39 %	3,50 %	1,58%	221,52 %
b	Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif 65%	100	2014	121,98 %	65%	79,08 %	121,66 %
c	Cakupan program usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) 5%	100	2014	37,71%	5%	9,40%	53,19%
d	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB 70%	100	2014	99,57%	70%	86,42 %	123,46 %
e	Cakupan PUS Peserta KB anggota UPPKS yang ber KB 87%	100	2014	102,90 %	87%	87,49 %	100,56 %
f	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) / Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) 1 petugas setiap 2 desa/kel	100	2014	60,61%	1,2	3,56	33,71%

g	Ratio Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) 1 petugas setiap desa/kel	100	2014	100,00 %	100%	100%	100,00 %
2	<i>Penyediaan alat / obat kontrasepsi</i>						
a	Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	100	2014	0,00%	30%	-	0,00%
3	<i>Penyediaan Informasi Data Mikro</i>						
a	Cakupan Penyediaan Informasi data mikro keluarga di setiap desa/kel setiap tahun	100	2014	100,00 %	100%	100%	100,00 %
Rata/rata capaian				93,35%			94,90%

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Pacitan Tahun 2011

Rata-rata capaian SPM bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 sebesar 94,90%. Dari 9 indikator yang mendukung pencapaian SPM ini terdapat 6 SPM yang telah memenuhi target SPM sedangkan 3 indikator lainnya belum dapat mencapai target SPM. Kesembilan indikator tersebut terbagi dalam 3 kelompok antara lain:

- a. Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera (KIE KBKS), dengan indikator
  - Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun sebesar 3,5% tahun 2011 dapat terealisasi 1,58%. Capaian indikatornya sebesar 221,5%. sehingga pada tahun 2011 ini Kabupaten Pacitan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dalam SPM sebelum batas waktu pencapaian yaitu 100% pada tahun 2014
  - Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif sebesar 65% di kabupaten pacitan tahun 2011 dapat terealisasi 79,08%. Capaian indikatornya sebesar 121,6%,

sehingga pada tahun 2011 ini Kabupaten Pacitan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dalam SPM sebelum batas waktu pencapaian yaitu 100% pada tahun 2014

- Cakupan program usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmeet need) 5% di Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 baru terealisasi 9,40%, sehingga capaian indikatornya sebesar 53,19%. Meskipun belum dapat mencapai target SMP akan tetapi capaian pada tahun 2011 telah mengalami peningkatan sebesar 15,48% apabila dibanding dengan capaian di tahun 2010.
- Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber KB 70% di Kabupaten Pacitan dapat terealisasi sebesar 86,42%, sehingga capaian indikatornya sebesar 123,4%. Pada tahun 2011 ini kabupaten pacitan dapat memenuhi target indikator cakupan anggota bina keluarga balita ber KB yang telah ditetapkan dalam SPM sebelum batas waktu pencapaian yaitu 100% pada tahun 2014
- UPPKS yang ber KB 87% pada tahun 2011 terealisasi 87,49% sehingga capaian indikatornya sebesar 100,5%. Capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam SPM bahkan sebelum batas waktu yang telah ditentukan yaitu pada tahun 2014
- Rasio petugas lapangan keluarga berencana/penyuluh keluarga berencana 1 petugas setiap desa/kelurahan baru terealisasi



3,56 dari target 1,2 sehingga capaian indikatornya sebesar 33,71%. Tidak terpenuhinya target ini disebabkan karena terbatasnya jumlah personil yang ada

- Rasio Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) 1 petugas setiap desa/kelurahan pada tahun 2011 dapat terealisasi sebesar 100%, sehingga setiap desa telah memiliki Petugas Pembantu Pembina KB Desa.

b. Penyediaan alat/obat kontrasepsi, dengan indikator

- Cakupan penyediaan alat/obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun tahun 2011 belum dapat terealisasi. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk penyediaan alat/obat kontrasepsi, akan tetapi meskipun pemerintah daerah tidak menyediakan akan tetapi masyarakat telah secara swadaya untuk memperoleh obat/alat kontrasepsi

c. Penyediaan informasi/data mikro, dengan indikator

- Cakupan penyediaan informasi/data mikro keluarag di setiap desa/kelurahan setiap tahunalat/obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun telah memenuhi target sebesar 100% bahkan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan dalam SPM yaitu tahun 2014.

## 8. CAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN DASAR

(Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Pendidikan Dasar)

**Tabel III.13.**  
**Capaian SPM Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Pacitan**  
**Tahun 2011**

NO	INDIKATOR	TARGET 2011 (%)	REALISASI 2011 (%)	
			SD/MI	SMP/MTs
a. Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota :				
1.	a. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;	100,00	100,00	-
	b. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;	100,00	-	-
2.	a. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang	50,00	96,76	-
	b. Untuk setiap rombongan belajar untuk SD/MI tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis; · Ruang Kelas · Meja siswa · Kursi siswa · Meja guru · Kursi guru · Papan tulis	50,00	75,03  88,74 59,54 74,81 67,37 75,38 84,35	-
	c. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang.	50,00	-	92,86
	d. Untuk setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	50,00	-	82,14

	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ruang kelas</li> <li>· Meja siswa</li> <li>· Kursi siswa</li> <li>· Meja guru</li> <li>· Kursi guru</li> <li>· Papan tulis</li> </ul>			79,46 79,46 81,25 75,89 79,46 97,32
3	a. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik	50,00		46,43
	b. Di setiap SMP dan MTs tersedia minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	50,00		52,68
4	a. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; <ul style="list-style-type: none"> <li>· SD/MI</li> <li>· SMP/MTs</li> </ul>	50,00	85,31	68,75
	b. Di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	50,00		71,43
5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;	50,00	91,98	
6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran; <ul style="list-style-type: none"> <li>· PAI</li> <li>· PKn</li> <li>· B. Indonesia</li> <li>· B. Inggris</li> <li>· Matematika</li> <li>· IPA</li> <li>· IPS</li> <li>· Seni budaya</li> <li>· Penjaskes</li> <li>· Keterampilan/TIK</li> </ul>	50,00		88,83  95,54 88,39 96,43 96,43 97,32 94,64 92,86 78,57 87,50 60,71
7	a. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang	50,00	97,90	

	b. memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;	50,00	73,09	
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%; · Guru S-1/D-IV · Bersertifikat pendidik	50,00		70,98  91,07 50,89
9	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris; · Matematika · IPA · B. Indonesia · B. Inggris	50,00		70,09  70,54 67,86 72,32 69,64
10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	50,00	79,58	
11	Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	50,00		78,57
12	Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	50,00	100,00	100,00
13	Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan	50,00	100,00	100,00
14	a. Kunjungan pengawas ke SD/MI dilakukan satu kali	50,00	100,00	

	setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.			
	b. Kunjungan pengawas ke SMP/MTs dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	50,00		100,00
<b>Jumlah rata-rata</b>			<b>81,78</b>	<b>73,05</b>
<b>Nilai rata-rata capaian</b>			<b>77,41</b>	

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Pacitan Tahun 2011

Capaian rata-rata untuk SPM bidang pendidikan dasar di kabupaten pacitan pada tahun 2011 sebesar 77,41%. Hasil tersebut diperoleh dari jumlah rata-rata capaian SPM bidang pendidikan dasar tingkat SD/MI sebesar 81,78% dan rata-rata capaian SPM bidang pendidikan dasar tingkat SMP/MTs sebesar 73,05%. Apabila dilihat dari target SPM secara nasional yang keseluruhan harus tercapai 100%, capaian SPM bidang pendidikan dasar di kabupaten pacitan tahun 2011 belum dapat memenuhi target, akan tetapi bila dibandingkan dengan target kabupaten secara umum capaian tersebut sudah memenuhi target yang ditetapkan oleh kabupaten pacitan.

Berikut pembahasan dari masing masing indikator:

- a. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil dari target 100% dapat terealisasi 100%, sedangkan untuk indikator tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman

permanen di daerah terpencil dari target 100% belum dapat direalisasikan karena terbatasnya anggaran dan juga kondisi geografis kabupaten pacitan yang bergunung-gunung. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah kabupaten pacitan mendirikan SMP satu atap untuk daerah terpencil agar peserta didik dapat terjangkau oleh pendidikan.

- b. Untuk setiap rombongan belajar untuk SD/MI tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis dari target 50% dapat terealisasi 75,03%. Realisasi tersebut diperoleh dari rata-rata realisasi dari beberapa sarana dan prasana yang tersedia antara lain: ruang kelas (88,74%), meja siswa (59,54), kursi siswa (74,81), meja guru (67,37), kursi guru (75,38) dan papan tulis (84,35)
- c. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang dari target 50% dapat terealisasi 92,86%.
- d. Untuk setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis dari target 50% dapat terealisasi 82,14%. Realisasi tersebut diperoleh dari rata-rata realisasi dari beberapa sarana dan prasana yang tersedia antara lain: ruang kelas (79,46%), meja siswa (79,46%), kursi siswa (81,25%), meja guru (75,89%), kursi guru (79,46%) dan papan tulis (97,32%)

- e. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dari target 50% hanya dapat terealisasi 46,43%. Tidak tercapainya target pada indikator ini disebabkan karena meja dan kursi di LAB IPA banyak yang sudah tidak layak pakai. Pada tahun 2011 pengadaan sarpras terfokus pada mebelair di ruang kelas dan perpustakaan.
- f. Di setiap SMP dan MTs tersedia minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik dari target 50% dapat teralisasi 52,68%
- g. Di setiap SD/MI tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya, dari target 50% pada tahun 2011 dapat terealisasi 85,31%. Sedangkan untuk ketersediaan satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya pada SMP/MTs pada tahun 2011 dari target 50% dapat terealisasi 68,75%
- h. Ketersediaan ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru pada SMP/MTs pada tahun 2011 dari target 50% dapat terealisasi 71,43%
- i. Ketersediaan 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan

pendidikan di setiap SD/MI dari target 50% dapat terealisasi 91,98%. Keberhasilan indikator ini ditunjang oleh adanya program pemetaan dan tugas rangkap guru.

- j. Ketersediaan 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran pada SMP/MTs dari target 50% dapat terealisasi 88,83%. Realisasi tersebut diperoleh dari rata-rata realisasi dari beberapa mata pelajaran antara lain: Pendidikan Agama Islam (95,54), PPKn (88,39), Bahasa Indonesia (96,43), Bahasa Inggris (96,43), Matematika (97,32), IPA (94,64), IPS (92,86), Seni budaya (78,57), penjasokes (87,50) serta keterampilan/TIK (60,71)
- k. Ketersediaan 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV pada SD/MI pada tahun 2011 dari target 50% dapat terealisasi 97,90%, sedangkan untuk Ketersediaan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dari target 50% dapat terealisasi 73,09. Target pada indikator ini dapat terpenuhi karena didukung oleh program sertifikasi guru SD/MI serta pemetaan dan tugas rangkap guru
- l. Ketersediaan guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20% pada SMP/MTs dari target 50% dapat terealisasi 70,98%. Realisasi tersebut diperoleh



dari rata-rata realisasi dari ketersediaan guru dengan kualifikasi akademik S1/D-IV sebesar 91,07% dan ketersediaan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik sebesar 50,89%.

- m. Ketersediaan guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris pada SMP/MTs pada tahun 2011 dari target 50% rata-rata realisasinya sebesar 70,09%. Rata-rata capaian indikator tersebut diperoleh dari beberapa jenis guru dengan kualifikasi akademik SI/D-IV sesuai dengan mata pelajaran, antara lain: Matematika (70,54), IPA (67,86), Bahasa Indonesia (72,32) dan Bahasa Inggris (69,64)
- n. Indikator Kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik di kabupaten pacitan pada tahun 2011 dari target 50% dapat terealisasi 79,58%. Untuk indikator Kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik dari target 50% terealisasi 78,57%. Sedangkan untuk indikator pengawas sekolah dan madrasah yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik dari target 50% dapat terealisasi 100%. Tercapaiannya target indikator ini karena didukung oleh program sertifikasi guru pada SD/MI, SMP/MTs dan pengawas sekolah/madrasah.
- o. Pada tahun 2011 kabupaten pacitan telah memiliki rencana dan

melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif, sehingga capaiannya adalah 100%. Hal ini merupakan bentuk peranan serta Pemerintah Daerah melalui kegiatan pelatihan penyusunan kurikulum

- p. Kunjungan pengawas ke SD/MI dan SMP/MTs dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan, dari target masing-masing sebesar 50% dapat terealisasi 100%. Hal ini merupakan wujud profesionalisme dan sebagai konsekuensi dari tugas dan tanggung jawab dari pengawas SD/MI dan SMP/MTs dalam meningkatkan kualitas pendidikan meskipun masih terkendala oleh faktor goeografis.

## 9. CAPAIAN SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN

(Permendiknas Permen Nakertrans No Per.15/MEN/X/2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan)

**Tabel III.14.**  
**Capaian SPM Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Pacitan Tahun 2011**

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			CAPAIAN KINERJA KABUPATEN			
	INDIKATOR	TARGET (%)	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	Th 2010	Tahun 2011		
					Target	Realisasi	% capaian
1	<i>Pelayanan Pelatihan Kerja</i>						
a	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75	2016	65%	60	32	53,33 %
b	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60	2016	51%	350	50	14,29 %

c	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60	2016	100 %	60	30	50%
2	<i>Pelayanan Tenaga Kerja</i>						
a	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70	2016	64%	126 2	1096	86,85 %
3	<i>Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hub industrial</i>						
a	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50	2016	0%	5	2	40%
4	<i>Pelayanan Kepesertaan Jamsostek</i>						
a	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	50	2016	78%	426 1	3391	79,58 %
5	<i>Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan</i>						
a	Besaran pemeriksaan perusahaan	45	2016	43%	138	33	23,91 %
b	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	50	2016	7%	15	10	66,67 %
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>51%</b>			<b>51,83 %</b>

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pacitan Tahun 2011

Rata-rata capaian SPM bidang ketenagakerjaan di kabupaten pacitan pada tahun 2011 sebesar 51,83%. Dari 8 indikator terdapat 3 indikator yang telah mencapai target SPM, sedangkan 5 indikator lainnya belum dapat mencapai target SPM. indikator tersebut terbagi dalam 5 kelompok antara lain:

a. Pelayanan pelatihan kerja, dengan indikator

- besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dari target 60 orang baru terealisasi 32 orang sehingga capaian indikatornya sebesar 53,33%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target SPM yaitu sebesar 75% pada tahun 2016, sehingga masih memerlukan tahapan untuk dapat memenuhi target yang telah ditentukan

- besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dari target 350 orang, pada tahun 2011 baru terealisasi 50 orang sehingga capaian indikatornya sebesar 14,29%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target SPM yaitu sebesar 60% pada tahun 2016, sehingga masih memerlukan tahapan untuk dapat memenuhi target yang telah ditentukan
  - besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dari target 60 orang, pada tahun 2011 baru terealisasi 30 orang sehingga capaian indikatornya sebesar 50%. Capaian indikator ini belum dapat memenuhi target SPM yaitu sebesar 60% pada tahun 2016, sehingga masih memerlukan tahapan untuk dapat memenuhi target yang telah ditentukan
- b. Pelayanan tenaga kerja, dengan indikator
- besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan dari target 1.262 orang dapat terealisasi 1.096 orang sehingga capaian indikatornya sebesar 86,85%. Capaian indikator ini telah memenuhi target SPM yaitu sebesar 70% pada tahun 2016, sehingga target tahun 2011 dapat dipenuhi sebelum batas waktu yang telah ditentukan
- c. Pelayanan penyelesaian hubungan industrial, dengan indikator
- besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama dari target 5 kasus yang ditangani dapat terealisasi 2 kasus

yang dapat diselesaikan sehingga capaian indikatornya sebesar 40%. Meskipun belum menenuhi target SPM yaitu sebesar 50% pada tahun 2016, akan tetapi capaian ini telah meningkat 40% apabila dibanding capaian tahun 2010

d. Pelayanan kepesertaan jamsostek, dengan indikator

- besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek dari 4.261 orang jumlah pekerja/buruh di kabupaten pacitan, 3.391 orang diantaranya telah menjadi peserta jamsostek sehingga capaian indikatornya sebesar 79,58%. Capaian indikator ini telah menenuhi target SPM yaitu sebesar 50% pada tahun 2016, sehingga target tahun 2011 dapat dipenuhi sebelum batas waktu yang telah ditentukan

e. Pelayanan pengawasan ketenagakerjaan, dengan indikator

- besaran pemeriksaan perusahaan dari 138 perusahaan yang ada di kabupaten pacitan, terdapat 33 perusahaan yang telah diperiksa sehingga capaian indikatornya sebesar 23,91%. Capaian indikator ini belum menenuhi target SPM yaitu sebesar 45% pada tahun 2016.
- Besaran pengujian peralatan perusahaan dari 15 perusahaan yang memiliki peralatan yang harus diuji, 10 perusahaan diantaranya telah dilakukan pengujian peralatan sehingga capaian indikatornya sebesar 66,67%. Capaian indikator ini telah menenuhi target SPM yaitu sebesar 50% pada tahun 2016, sehingga target tahun 2011 dapat dipenuhi sebelum batas waktu yang telah ditentukan

## 10. CAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

(Permen PU Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

**Tabel III.15.**  
**Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun 2011**

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			CAPAIAN KINERJA KABUPATEN			
	INDIKATOR	TARGET (%)	BATAS WAKTU	Tahun 2010	Tahun 2011		
					target	realisasi	% capaian
I	Sumber daya air						
a	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100	2014	100	2.513.173	2.586.800	102,93 %
b	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	70	2014	77,10	5.986	2.497,00	42%
II	Jalan						
1	Jaringan						
a	Aksesibilitas: Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota	100	2014	100	798.000	798.000	100,00 %
b	Mobilitas: tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	100	2014	221,4	67	66,82	99,73%
c	Keselamatan: tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	60	2014	37,83	798.000	57.704	7,23%
2	Ruas						
a	Kondisi jalan: tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	60	2014	49,58	798.000	400.849	50,23%
b	Kecepatan : tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan dengan kecepatan rencana	60	2014	52,06	798.000	335.160	42,00%
III	Air Minum						
a	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan			100,87	65,23	85,2	130,61 %

	perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 lt/org/hari - Buruk sekali - Buruk - Sedang - Baik - Sangat Baik	40 50 70 80 90	2014 2014 2014 2014 2014				
IV	<i>Penyehatan Lingkungan Permukiman</i>						
1	Air limbah permukiman						
a	tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	60	2014	100,18	76,56	78,52	102,56 %
b	tersedianya sistem air limbah skala komunitas / kawasan / kota	5	2014	0	0	0	0,00%
2	Pengelolaan sampah						
a	tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	20	2014	100	7	7	100,00 %
b	tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan	70	2014	100	25	25	100,00 %
3	Drainase						
a	tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	50	2014	100,38	60,03	65,3	108,78 %
V	<i>Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan</i>						
a	berkurangnya luasan permukiman kumuh kawasan perkotaan	10	2014	83,13	97,24	97,24	100,00 %
VI	<i>Penataan Bangunan dan Lingkungan</i>						
a	Izin Mendirikan Bangunan terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota	100	2014	36,80	68,45	68,91	100,67 %
b	Harga standar bangunan gedung negara (HSBGN) tersedianya pedoman HSBGN di kab/kota	100	2014	100	1	1	100,00 %
VII	<i>Jasa konstruksi</i>						
a	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Penerbitan IUJK dalam waktu 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap	100	2014	100	40	40	100,00 %
b	Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi setiap tahun	100	2014	0	0	0	0,00%
IX	<i>Penataan Ruang</i>						
a	Informasi penataan ruang Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah						

	kab/kota beserta rencana rincinya melalui analog dan peta digital	100	2014	57,14	33,33	33,33	100,00 %
	- kab/kota, kec	90	2014	0,00	0	0	0,00%
	- kelurahan						
b	Pelibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunya RTR dan program pemanfaatan ruang	100	2014	107,69	70	75	107,14 %
c	Izin Pemanfaaan Ruang Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Perda tentang RTR wilayah kab/kota beserta rencana rincinya	100	2014	100	10	30	300,00 %
d	Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 hari kerja	100	2014	66,67	3	2	66,67%
e	Penyediaan Ruang Terbuka hijau (RTH) Publik Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	25	2014	100,52	35,08	57,41	163,65 %
	<b>Capaian rata-rata</b>			<b>78,81</b>			<b>88,50%</b>

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya Taa Ruang dan Kebersihan, Kantor Pelayanan Perijinan, PDAM Kab. Pacitan Tahun 2011

Rata-rata capaian dari masing-masing indikator yang mendukung SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di kabupaten pacitan tahun 2011 sebesar 88,50%. Dari 24 indikator yang mendukung pencapaian SPM bidang pekerjaan umum terdapat 15 indikator yang dapat mencapai target SPM sedangkan 9 indikator lainnya belum dapat memenuhi target SPM. Meskipun demikian batas waktu pencapaian SPM ini masih sampai dengan tahun 2014 sehingga masih ada waktu untuk mencapai target tersebut. Berikut pembahasan realisasi dan capaian dari masing-masing indikator



yang terbagi dalam 9 kelompok yaitu:

a. Sumber daya air, dengan indikator:

- Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari, dari target ketersediaan air di tahun 2011 sebesar 2.513.173 liter air baku, dapat terealisasi 2.586.800 liter air baku sehingga capaiannya sebesar 102,93%. Realisasi dan capaian ini sudah memenuhi target SPM yaitu sebesar 100% bahkan sebelum batas waktu yang ditentukan yaitu tahun 2014
- Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada, dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak 5.487 baru dapat dipenuhi sekitar 42% atau sekitar 2.497. sehingga capaian ini belum dapat memenuhi target SPM meskipun demikian target tersebut dapat dipenuhi sampai dengan tahun 2014

b. Jalan, dengan indikator:

- Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota (aksesibilitas) pada tahun 2011 dapat terpenuhi 100% sesuai dengan target SPM bahkan sebelum batas waktu yang telah ditentukan yaitu tahun 2014. Panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten di pacitan sepanjang 798.000 meter.
- Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat

perindividu melakukan perjalanan (mobilitas) dari target 67% dapat terealisasi 66,82% sehingga capaiannya sebesar 99,73. Untuk memenuhi target sesuai SPM pemerintah kabupaten pacitan dapat mewujudkannya sampai dengantahun 2014 sesuai batas waktu pencapaian

- Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat (keselamatan) dari 798.000 m panjang di kabupaten pacitan, hanya sekitar 7,23% atau 57.704 meter yang berkondisi baik. Untuk mewujudkan target sesuai dengan SPM yaitu sebesar 60% dari jumlah keseluruhan panjang jalan, dapat diwujudkan secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

c. Ruas , dengan indikator:

- Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman (kondisi jalan) pada tahun 2011 dapat terpenuhi 50%, dari jumlah keseluruhan panjang jalan di kabupaten pacitan sebanyak 798.000m baru sekitar 400.849m jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman
- Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan dengan kecepatan rencana pada tahun 2011 dapat terpenuhi 42%, dari jumlah keseluruhan panjang jalan di kabupaten pacitan sebanyak 798.000 meter baru sekitar 335.160 meter jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan dengan kecepatan rencana

d. Air minum, dengan indikator:

- Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 lt/org/hari dari target 65,23 dapat terealisasi 85,2 dengan capaian 130,61%

e. Penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi lingkungan dan persampahan), dengan indikator:

- Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dari target 76,56% dapat terealisasi 78,52% dengan capaian dapat melebihi target yaitu sebesar 102,56%
- Pada tahun 2011 di kabupaten pacitan belum tersedia sistem air limbah skala komunitas/kawasan kota sehingga capaiannya adalah 0%.
- Pada tahun 2011 baru terdapat 7 fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. Kondisi ini sesuai dengan target yang ditetapkan oleh kabupaten pacitan. Untuk mencapai target SPM sebanyak 20 fasilitas pengurangan sampah di perkotaan dapat dicapai secara bertahap sampai dengan tahun 2014
- Ketersediaan sistem penanganan sampah di perkotaan di kabupaten pacitan pada tahun 2011 dari target sebanyak 25 unit dapat terealisasi sebesar 100%. Bahkan di kabupaten pacitan telah diresmikan “Bank Sampah Pace Sewu” yang menampung dan mengelola sampah-sampah yang masih

memiliki nilai jual, sehingga diharapkan dapat mengurangi masalah persampahan dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Ketersediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 30 cm selama 2 jam dan tidak lebih dari 2 kali setahun, realisasi pada tahun 2011 sebesar 65,3% dari target 69,03 sehingga capaiannya 108,78%. Realisasi tahun 2011 dapat memenuhi target SPM bahkan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.
- f. Penanganan pemukiman kumuh perkotaan, dengan indikator:
  - Berkurangnya luasan permukiman kumuh di wilayah perkotaan pada tahun 2011 berkurang sebesar 97,24 ha
- g. Penataan bangunan di lingkungan, dengan indikator:
  - Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB pada tahun 2011 realisasinya mencapai 68,91% dari target sebesar 68,45% sehingga capaiannya adalah 100,67%. Meskipun belum bisa memenuhi target SPM, akan tetapi bisa dicapai secara bertahap sampai dengan tahun 2014
  - Pada tahun 2011 kabupaten Pacitan telah memiliki pedoman harga standar bangunan gedung negara (HSBGN) sehingga capaiannya adalah 100% sesuai target SPM
- h. Penanganan pemukiman kumuh perkotaan, dengan indikator:
  - Penerbitan IUJK (ijin usaha jasa konstruksi) dalam waktu 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap dapat terealisasi 40% sesuai dengan target.

- Pada tahun 2011 kabupaten pacitan belum memiliki sistem informasi jasa konstruksi setiap tahunnya sehingga capaiannya adalah 0%
- i. Penataan ruang, dengan indikator:
  - Ketersediaan informasi tentang Rencana Tata Ruang wilayah beserta rinciannya melalui analog dan peta digital pada tahun 2011 untuk wilayah kabupaten dan kecamatan telah tersedia sebesar 33,33% atau sesuai dengan target, akan tetapi untuk wilayah kelurahan belum dapat dipenuhi, sehingga capaiannya adalah 0%
  - Pelibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang dari target 70% dapat terealisasi sebesar 75%
  - Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Perda tentang RTR wilayah kab/kota beserta rencana rincinya dari target 10 ijin yang dilayani dapat terealisasi 30 ijin, capaian ini melebihi target tahun 2011 dan target SPM
  - Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 hari kerja dari target 3 pengaduan hanya 2 pengaduan yang dapat diselesaikan sesuai ketentuan, sehingga capaiannya adalah 66,67%

- Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan dari target 35,08% dapat terealisasi 57,41% sehingga capaiannya adalah sebesar 163,65%

## 11. CAPAIAN SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN

**Tabel III.16.**  
**Capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2011**

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			CAPAIAN KINERJA KABUPATEN			
	INDIKATOR	TARGET (%)	BATAS WAKTU	Th 2010	Tahun 2011		
					Target %	Realisasi	% capaian
1	<i>Ketersediaan dan cadangan pangan</i>						
a.	Ketersediaan energi dan protein perkapita	90	2015	115 %	116	102	87,93 %
b.	Penguatan cadangan pangan	60	2015	120 %	20	15	75,00 %
2	<i>Distribusi dan akses pangan</i>						
a.	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	90	2015	107 %	55,56	62,04	111,66 %
b.	Stabilitas harga dan pasokan pangan	90	2015	98%	92,3	31,29	33,90 %
3	<i>Penganekaragaman dan keamanan pangan</i>						
a.	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90	2015	91%	87,2	83,33	95,56 %
b.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80	2015	104 %	64	90,24	141,00 %
4	<i>Penanganan kerawanan pangan</i>						
a	Penanganan daerah rawan pangan	60	2015	100 %	20	20	100,00 %
<b>Rata-rata capaian</b>				<b>106 %</b>			<b>92,15 %</b>

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pacitan Tahun 2011

Rata-rata capaian dari masing-masing indikator yang mendukung SPM bidang ketahanan pangan di kabupaten pacitan tahun 2011 sebesar 92,15%. Dari 7 indikator yang mendukung pencapaian SPM bidang ketahanan pangan terdapat 4 indikator yang dapat mencapai target SPM, sedangkan yang targetnya belum dapat dipenuhi sebanyak 3 indikato. Meskipun demikian batas waktu pencapaian SPM bidang ketahanan pangan ini adalah sampai dengan tahun 2015, sehingga pemerintah kabupaten pacitan dapat mencapainya secara bertahap sesuai dengan target pertahun. Berikut pembahasan realisasi dan capaian dari masing-masing indikator yang terbagi dalam 4 kelompok yaitu:

- a. Ketersediaan dan cadangan pangan, dengan indikator:
  - Ketersediaan energi dan protein perkapita dari target 116% dapat terealisasi 102%, sehingga capaiannya 87,93%.
  - Penguatan cadangan pangan pada tahun 2011 dari target 20% dapat terealisasi 15% sehingga capaiannya adalah 75%
- b. Distribusi dan akses pangan, dengan indikator:
  - Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah dari target 55,56% dapat terealisasi sebesar 62,04%, sehingga capaiannya adalah 111,66%
  - Stabilitas harga dan pasokan pangan dari target 92,3% bau dapat dicapai 33,90%.
- c. Penganekaragaman dan keamanan pangan, dengan indikator:
  - Pencapaian skor pola pangan harapan dari target 87,2%

dapat terealisasi 83,33% dengan capaian 95,56%

- Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dari target 64% dapat terealisasi 90,24%. Dengan realisasi tersebut target SPM dapat tercapai sebelum batas waktu yang ditentukan yaitu tahun 2015

d. Penanganan kerawanan pangan, dengan indikator:

Penanganan daerah rawan pangan dari target 20% dapat terealisasi 20% dengan capaian 100%

## 12. CAPAIAN SPM BIDANG KESENIAN

(Permen Budpar No PM.106/HK.501/MKP/2010)

**Tabel III.17.**  
**Capaian SPM Bidang Kesenian Kabupaten Pacitan Tahun 2011**

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			CAPAIAN KINERJA KABUPATEN			
	INDIKATOR	TARGET %	BATAS WAKTU	Tahun 2010	Tahun 2011		
					target	realisasi	% capaian
1	<i>Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian</i>						
a	Cakupan kajian seni	50	2014	75,00 %	65	50	76,92 %
b	cakupan fasilitas seni	30	2014	80,00 %	80	65	81,25 %
c	cakupan gelar seni	75	2014	80,00 %	100	85	85,00 %
d	Misi kesenian	100	2014	75,00 %	100	85	85,00 %
2	<i>Sarana dan Prasarana</i>						
a	Cakupan sumber daya manusia kesenian	25	2014	80,00 %	55	45	81,82 %
b	cakupan tempat	100	2014	100,00 %	50	50	100,00 %
c	Cakupan organisasi	34	2014	66,67 %	65	45	69,23 %
Rata-rata capaian				79,52 %			82,75 %

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pacitan Tahun 2011



Rata-rata capaian dari masing-masing indikator yang mendukung SPM bidang kesenian di kabupaten pacitan tahun 2011 sebesar 82,75%. Dari 7 indikator yang mendukung pencapaian SPM bidang kesenian terdapat 6 indikator yang telah memenuhi target SPM dan 1 indikator masih belum dapat memenuhi target. Berikut pembahasan realisasi dan capaian dari masing-masing indikator yang terbagi dalam 2 kelompok yaitu:

- a. Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian, dengan indikator:
  - Cakupan kajian seni dari target 65% dapat terealisasi 50% sehingga capaiannya adalah 76,92%. Realisasi dan target ini dapat mencapai target yang ditetapkan dalam SPM yaitu 50% bahkan sebelum batas waktu pencapaian yaitu tahun 2014
  - Cakupan fasilitas seni dari target 80% dapat terealisasi 65% dengan capaian 81,25%. Realisasi dan target ini dapat mencapai target yang ditetapkan dalam SPM yaitu 30% bahkan sebelum batas waktu pencapaian yaitu tahun 2014
  - Cakupan gelar seni dari target 100% terealisasi sebesar 85% dengan capaian 85%. Realisasi dan target ini dapat mencapai target yang ditetapkan dalam SPM yaitu 75% bahkan sebelum batas waktu pencapaian yaitu tahun 2014
  - Misi kesenian dari target 100% terealisasi 85% dengan capaian sebesar 85%. Realisasi dan capaian indikator misi kesenian ini belum dapat memenuhi target yang ditetapkan

karena keterbatasan dukungan anggaran

b. Sarana dan prasarana, dengan indikator:

- Cakupan sumber daya manusia dan kesenian dari target 55% dapat terealisasi 45% sehingga capaiannya adalah 81,82%. Meskipun target kabupaten tidak terepenuhi akan tetapi realisasi dan capaian pada tahun 2011 ini telah dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam SPM bahkan sebelum batas waktu pencapaian yaitu tahun 2014
- Cakupan tempat capaiannya sebesar 100% sehingga dapat memenuhi target SPM
- Cakupan organisasi dari target 65% hanya terealisasi 45% dengan capaian 69,23%. Meskipun target tahun 2011 tidak tercapai akan tetapi realisasi dan capaian dari indikator telah memenuhi target yang ditetapkan dalam SPM yaitu 34%

### 13. CAPAIAN SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

(Permen Kominfo No 22 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Kominfo di Kabupaten/Kota)

**Tabel III.18.**  
**Capaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Pacitan Tahun 2011**

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			CAPAIAN KINERJA KABUPATEN			
	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU	Th 2010	Tahun 2011		
					Target	Realisasi	% capaian
1	<i>Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:</i>						

a	Media massa seperti majalah, radio, dan tv	12 kl/th	2014	66,67 %	12	12	100,00 %
b	Media baru seperti website (media online)	tiap hari	2014	100,00 %	tiap hari	tiap hari	100,00 %
c	Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	12 kl/th	2014	100,00 %	12	6	50,00 %
d	Media interpersonal seperti sarasehan,ceramah/diskusi, dan lokakarya	12 kl/th	2014	100,00 %	12	8	66,67 %
e	Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, baliho	12 kl/th	2014	100,00 %	51	51	100,00 %
2	<i>Pengembangan dan pemberdayaan kel. informasi masyarakat</i>						
a	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masy di tingkat kec.	50%	2014	100,00 %	45	40	88,89 %
<b>Rata-rata capaian</b>				<b>94,45 %</b>			<b>84,26 %</b>

Sumber: Dinas Perhubungan dan Hubkominfo, Bag. Humas dan Protokol Setda, Bag. PDE setda Kab. Pacitan Tahun 2011

Rata-rata capaian dari masing-masing indikator yang mendukung SPM bidang komunikasi dan informatika di kabupaten pacitan tahun 2011 sebesar 84,26%. Dari 6 indikator yang mendukung pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika terdapat 3 indikator yang telah memenuhi target SPM dan 3 indikator masih belum dapat memenuhi target Berikut pembahasan realisasi dan capaian dari masing-masing indikator yang terbagi dalam 2 kelompok yaitu:

a. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:

- Media massa seperti majalah, radio dan tv dari target 12 kali/tahun dapat terealisasi 100%
- Media baru seperti website (media online) dari target per hari dapat 100% (tiap hari bisa diakses)

- Media tradisional seperti pertunjukan rakyat dari target 12 kali/tahun baru terealisasi sebesar 50% yaitu 6 kali/tahunnya
  - Media interpersonal seperti sarasehan, seramah/diskusi dan lokakarya dari target 12 kali/tahun terealisasi 66,67% yaitu 8 kali/tahun
  - Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho dapat terealisasi 100%
- b. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat:
- Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan dari target 45% dapat terealisasi 40% dengan capaian 88,89%.

#### 14. CAPAIAN SPM BIDANG PERHUBUNGAN

(Permen Perhubungan Nomor PM.81 TAHUN 2011)

**Tabel III.19.**  
**Capaian SPM Bidang Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2011**

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			CAPAIAN KINERJA KABUPATEN			
	INDIKATOR	TARGET (%)	BATAS WAKTU	Th 2010	Tahun 2011		
					Target	Realisasi	% capaian
I	Angkutan Jalan						
a	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan						
1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	75	2014		19,00 %	19,00 %	100,00 %

2	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/kota	60	2014		25,00 %	25,00 %	100,00 %
<i>b</i>	<i>Jaringan Prasarana Angkutan Jalan</i>						
1	Tersedianya halte pada setiap kab/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100	2014		17,00 %	17,00 %	100,00 %
2	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kab/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	40	2014		25,00 %	25,00 %	100,00 %
<i>c</i>	<i>Fasilitas Perlengkapan Jalan</i>						
1	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota	60	2014		26,00 %	26,00 %	100,00 %
<i>d</i>	<i>Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor</i>						
1	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kab/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	60	2014		30,00 %	30,00 %	100,00 %
<i>e</i>	<i>Sumber Daya Manusia</i>						
1	Tersedianya SDM di bidang terminal pada kab/kota yang telah memiliki terminal	50	2014		17,00 %	17,00 %	100,00 %
2	Tersedianya SDM di bidang pengujian kendaraan bermotor pada kab/kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	100	2014		86,00 %	86,00 %	100,00 %

3	Tersedianya SDM di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kab/kota	40	2014		29,00 %	29,00 %	100,00 %
4	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100	2014		57,00 %	57,00 %	100,00 %
<i>f</i>	<i>Keselamatan</i>						
1	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kab/kota	100	2014		96,00 %	96,00 %	100,00 %
IV	Angkutan Laut						
<i>a</i>	<i>Jaringan Pelayanan Angkutan Laut</i>						
1	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam wilayah kab/kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	90	2014		-	-	-
2	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kab/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	100	2014		-	-	-
<i>b</i>	<i>Jaringan Prasarana Angkutan Laut</i>						
1	Tersedianya dermaga pada setiap ibu kota kecamatan dalam kab/kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam kab/kota pada wilayah yang memiliki alur	60	2014		33,00 %	33,00 %	100,00 %

	pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan						
<i>c</i>	<i>Keselamatan</i>						
1	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran dibawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam kab/kota	100	2014		10,00 %	10,00%	100,00 %
<i>d</i>	<i>Sumber Daya Manusia</i>						
1	Tersedianya SDM yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran dibawah 7 GT	100	2014		40,00 %	40,00%	100,00 %
Rata-rata capaian							87,50 %

Sumber: Dinas Perhubungan dan Informatika Kab. Pacitan Tahun 2011

Rata-rata capaian indikator pelaksanaan SPM bidang perhubungan di Kabupaten Pacitan tahun 2011 sebesar 87,50%. Dari 16 indikator yang mendukung pencapaian SPM bidang perhubungan terdapat 14 indikator yang telah memenuhi target SPM dan 2 indikator masih belum dapat memenuhi target. Batas waktu pencapaian SPM bidang perhubungan di kabupaten/kota adalah tahun 2014, sehingga kabupaten/kota dapat mencapainya melalui tahapan pencapaian target pertahun. Rata-rata capaian ini didukung oleh beberapa indikator yaitu:

a. Tersedianya pelayanan angkutan jalan

- Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota dari target 19% dapat terealisasi 19%. Meskipun belum bisa mencapai target SPM sebesar 75% pada tahun 2014 akan tetapi pada tahun 2011 capaian

indikator ini tercapai sebesar 100%.

- Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang meng hubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten kota dari target 25% dapat terealisasi 25% dengan capaian indikator sebesar 100%. Realisasi ini tahun 2011 ini belum bisa memenuhi target SPM yaitu 60% pada tahun 2014.

b. Jaringan prasarana angkutan jalan

- Tersedianya halte pada setiap kab/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek dari target 17% dapat terealisasi 17%. Meskipun belum bisa mencapai target SPM sebesar 100% pada tahun 2014 akan tetapi pada tahun 2011 capaian indikator ini tercapai sebesar 100%
- Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kab/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek dari target 25% dapat terealisasi 25%. Meskipun belum bisa mencapai target SPM sebesar 40% pada tahun 2014 akan tetapi pada tahun 2011 capaian indikator ini tercapai sebesar 100%

c. Fasilitas perlengkapan jalan

- Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota dari target 26% dapat terealisasi 26%.



Meskipun belum bisa mencapai target SPM sebesar 60% pada tahun 2014 akan tetapi pada tahun 2011 capaian indikator ini tercapai sebesar 100%

d. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor

- Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kab/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji dari target 30% dapat terealisasi 30%. Meskipun belum bisa mencapai target SPM sebesar 60% pada tahun 2014 akan tetapi pada tahun 2011 capaian indikator ini tercapai sebesar 100%

e. Sumber daya manusia angkutan darat

- Tersedianya SDM di bidang terminal pada kab/kota yang telah memiliki terminal dari target 17% dapat terealisasi 17%. Meskipun belum bisa mencapai target SPM sebesar 50% pada tahun 2014 akan tetapi pada tahun 2011 capaian indikator ini tercapai sebesar 100%
- Tersedianya SDM di bidang pengujian kendaraan bermotor pada kab/kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor dari target 86% dapat terealisasi 86%. Meskipun belum bisa mencapai target SPM sebesar 100% pada tahun 2014 akan tetapi pada tahun 2011 capaian indikator ini tercapai sebesar 100%.
- Tersedianya SDM di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kab/kota dari target 29% dapat

teralisasi 29%. Meskipun belum bisa mencapai target SPM sebesar 40% pada tahun 2014 akan tetapi pada tahun 2011 capaian indikator ini tercapai sebesar 100%

- Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum dari target 57% dapat teralisasi 57%. Meskipun belum bisa mencapai target SPM sebesar 100% pada tahun 2014 akan tetapi pada tahun 2011 capaian indikator ini tercapai sebesar 100%

f. Keselamatan angkutan darat

- Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kab/kota dari target 96% dapat teralisasi 96%. Meskipun belum bisa mencapai target SPM sebesar 100% pada tahun 2014 akan tetapi pada tahun 2011 capaian indikator ini tercapai sebesar 100%

g. Jaringan pelayanan angkutan laut

- Kabupaten pacitan belum membutuhkan sarana transportasi laut untuk beroperasi pada lintas dalam wilayah kab/kota maupun dan daerah terpencil pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan. Hal ini disebabkan karena masih ada jalur alternatif angkutan darat untuk menjangkau daerah terpencil

h. Jaringan prasarana angkutan laut

- Tersedianya dermaga pada setiap ibu kota kecamatan dalam

kab/kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam kab/kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan dari target 33% dapat terealisasi 33%. Meskipun belum bisa mencapai target SPM sebesar 60% pada tahun 2014 akan tetapi pada tahun 2011 capaian indikator ini tercapai sebesar 100%

i. keselamatan angkutan laut

- Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran dibawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam kab/kota dari target 10% dapat terealisasi 10%. Meskipun belum bisa mencapai target SPM sebesar 100% pada tahun 2014 akan tetapi pada tahun 2011 capaian indikator ini tercapai sebesar 100%

j. SDM angkutan laut

- Tersedianya SDM yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran dibawah 7 GT dari target 40% dapat terealisasi 40%. Meskipun belum bisa mencapai target SPM sebesar 100% pada tahun 2014 akan tetapi pada tahun 2011 capaian indikator ini tercapai sebesar 100%
- Indikator rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk dari target 0,71 dapat terealisasi 0,75 dengan capaian indikator sebesar 105,63. Indikator bayi berakte kelahiran dari target sebesar 95% dapat terealisasi 98,01%. Keberhasilan indikator ini karena didukung oleh layanan pemberian akte gratis atau tanpa biaya bagi bayi berusia sampai dengan 60 hari. Sehingga

masyarakat banyak yang memanfaatkan layanan ini karena sangat membantu khususnya bagi warga yang tidak mampu.

Indikator persentase kepemilikan KTP di kabupaten pacitan tahun 2011 dari target 67,72 dapat terealisasi sebesar 88,25% sehingga capaiannya sebesar 124,12%. Dari jumlah penduduk kabupaten pacitan yang sudah berusia 17 tahun keatas dan sudah/pernah menikah sebanyak 484.983 orang, sejumlah 427.983 sudah memiliki dokumen kependudukan. Indikator persentase kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk dari target sebesar 60,72 dapat terealisasi sebesar 64,93%. Dari jumlah penduduk kabupaten pacitan sebanyak 584.317, sejumlah 403.664 telah memiliki dokumen kependudukan berupa akta kelahiran.

Pada indikator prosentase Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga capaian pada tahun 2011 sebesar 86,85% telah mencapai target dan mengalami perkembangan dibandingkan tahun 2010 sebesar 2,97%

Untuk indikator penerapan KTP nasional berbasis NIK, kabupaten pacitan telah menerapkan pada tahun 2011, sehingga seluruh penduduk di kabupaten pacitan telah memiliki nomor induk kependudukan yang bersifat nasional.

Capaian kinerja indikator yang tergabung dalam urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2011 menunjukkan peningkatan yang cukup baik karena rata-rata capaiannya lebih dari 100%, begitu pula halnya jika dibanding dengan hasil capaian tahun 2010. hal ini disebabkan karena :

- a. Pemasangan jaringan online pelayanan kependudukan di 12 kecamatan

- b. Adanya pendekatan pelayanan kepada masyarakat dengan cara jemput bola
- c. Dokumen kependudukan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dimiliki setiap penduduk
- d. Adanya keharusan melampirkan dokumen kependudukan untuk kepentingan pengurusan dokumen yang lain
- e. Adanya sosialisasi tentang pentingnya dokumen kependudukan sehingga kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan meningkat
- f. Semakin meningkatnya pendidikan masyarakat sehingga kepemilikan dan pemahaman akan pentingnya dokumen kependudukan.

**Tabel III.20.**  
**Capaian Kinerja Sasaran 3 :**  
**"Terselenggaranya Pelayanan Prima"**

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJM (2010)	2011		KINERJA	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	% PERKEMB.
1. SKPD yang menerapkan SOP (%)	64,5	65	50	76,92	-14,50
2. Lama proses perijinan	5,48	5,42	5,33	98,34	-0,15
3. Jumlah pertambahan tanpa ijin	26	22	21	95,45	-5,00
4. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	68,45	68,78	68,91	100,19	0,46
5. Luas lahan bersertifikat (%)	14,61	26,16	19,6	74,92	134,15%
6. Penyelesaian izin lokasi	3	4	7	175,00	4,00
7. Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	ada	ada	ada	100	0,00

8. Desa yang mengelola keuangan desa sesuai dengan pedoman (%)	69,88	75,9	69,88	97,48	0,00
9. Desa dengan administrasi baik (%)	69,88	71,69	71,69	100,00	-69,88
10. Jumlah SKPD dan Desa Pengelolaan arsip secara baku	69	81	81	100,00	12,00
11. Pengaduan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100,00	0,00
12. Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	0	0	100	100,00	100,00
13. Indeks Kepuasan Masyarakat	ada/baik	ada/baik	ada/baik (30skpd)	100	0,00
14. Jumlah pelayanan berstandar internasional (ISO)	2	5	7	140,00	5,00
<b>Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran</b>				<b>104,16</b>	

Sasaran 3 : " Terselenggaranya Pelayanan Prima", dengan capaian indikator kinerja rata-rata pada tahun 2011 sebesar 104,16% termasuk kategori "*Sangat Baik*", dan didukung oleh 14 (empat belas) indikator kinerja sasaran.

Penjelasan terhadap capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- Indikator prosentase SKPD yang menerapkan SOP pada tahun 2011 dari target sebesar 65% dapat terealisasi sebesar 50,00% sehingga capaian indikatornya mencapai 76,92%. Tidak tercapainya target pada indikator ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman SKPD terhadap penerapan SOP dan juga karena beberapa SOP yang diterapkan oleh SKPD perlu mendapatkan revisi karena sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat 24 dari 48 SKPD yang telah menerapkan SOP pada tahun 2011, antara lain:

1. Dinas Pendidikan,
2. Dinas Kesehatan,
3. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga,
4. Dinas Bina Marga dan Pengairan,
5. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan,
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,
7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
8. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan,
9. Dinas Kehutanan dan Perkebunan,
10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,
11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset,
12. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal
13. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat,
14. Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik,
15. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,
16. Badan Kepegawaian Daerah,
17. Inspektorat,
18. RSUD
19. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
20. Kantor Lingkungan Hidup,
21. Kantor Ketahanan Pangan,
22. Kantor Pelayanan Perizinan,
23. Sekretariat Daerah
24. Sekretariat DPRD

- Indikator lama proses perijinan dari target sebesar 5,42 dapat terealisasi 5,33 sehingga capaiannya sebesar 98,34%. Tidak tercapainya target ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain: kondisi geografis kabupaten pacitan yang bergunung-gunung, kurangnya jumlah personil dan SDM yang mendukung. Selain itu dalam penyelesaian beberapa ijin diperlukan adanya koordinasi antara tim teknis yang anggotanya terdiri dari beberapa dinas terkait yang dikoordinir oleh kantor pelayanan perijinan. Sehingga diperlukan manajemen waktu untuk mengatasi hal tersebut.
- Indikator jumlah pertambangan tanpa ijin pada tahun 2011 terdapat 21 pertambangan tanpa ijin, kondisi ini menurun baik dari target yang ditetapkan pada tahun 2011 yaitu sebesar 22 pertambangan tanpa ijin. Sehingga apabila dilihat dari kinerja indikator ini mengalami peningkatan karena berhasil menekan jumlah pertambangan tanpa ijin di Kabupaten Pacitan.
- Indikator rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan dapat tercapai 68,91 dari target yang ditetapkan yaitu 68,78 sehingga capaian realisasinya dapat memenuhi target yaitu sebesar 100,19%
- Indikator luas lahan bersertifikat dari target sebesar 26,16% hanya terealisasi sekitar 19,6% sehingga capaian indikatornya sebesar 74,92%. Capaian kinerja indikator luas lahan bersertifikat, sampai dengan akhir tahun 2011 capaiannya adalah 19,60 atau mencapai 27.248,5 Ha dari luas Kabupaten Pacitan 138.987,16 Ha. Bila dibandingkan dengan target memang belum tercapai, akan tetapi bila dibandingkan dengan capaian tahun 2010 telah mengalami perkembangan sebesar 134,15%



- Capaian kinerja indikator penyelesaian izin lokasi pada tahun 2011 mencapai 7 buah izin lokasi yang diterbitkan, walaupun dari 9 permohonan masih ada 2 yang belum terselesaikan, hal ini merupakan capaian yang cukup baik karena dari target 4 buah izin lokasi yang diterbitkan dapat diselesaikan 7 buah izin lokasi.
- Desa yang mengelola keuangan desa sesuai dengan pedoman dari target sebesar 75,9% dapat terealisasi sebesar 69,88%, sehingga capaiannya hanya sebesar 97,48. Realisasi tersebut sama dengan kondisi awal RPJM hal ini dikarenakan kemampuan aparatur desa sangat kurang terkait dengan sistem peneglolaan keuangan desa
- Indikator persentase desa beradministrasi baik, dari target tahun 2011 sebesar 71,69% terealisasi 71,69%. Target tahun 2010 sebesar 69,88% terealisasi 69,88. Indikator kegiatan tersebut pada tahun 2011 terjadi kenaikan capaian sebesar 1,18%. Capaian ini dipengaruhi dengan terlaksananya pembinaan terhadap 3 desa dalam memperbaiki administrasi melalui lomba desa. Pada tahun 2011 ini terdapat 119 desa dari 166 desa yang telah beradministrasi baik.
- Jumlah SKPD dan Desa Pengelolaan Arsip secara Baku, realisasi capaian indikator kinerja tahun 2011 mencapai 81 bila dibanding dengan realisasi tahun 2010 menunjukkan ada peningkatan 12 atau 17,39 % sedangkan realisasi terhadap target RPJMD 2011, mencapai indikator kinerja sebesar 100 % capaian atas tujuan tersebut masuk dalam katagori "MEMUASKAN" disebabkan sasaran SKPD dan Desa, petugas pengelola kerasipan yang

sudah mendapatkan dan mengikuti Bintek Kearsipan dalam rangka Program Arsip Masuk Desa (AMD).

- Indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun 2011 dari target sebesar 100% dapat terealisasi 100% sehingga seluruh pengaduan yang masuk dapat ditindaklanjuti. Pada tahun 2011 terdapat 10 pengaduan masyarakat yang secara keseluruhan dapat ditindaklanjuti.
- Capaian kinerja indikator Penyelesaian kasus tanah Negara pada tahun 2011 mencapai 100%, walaupun terjadi 1 kasus akan tetapi dapat diselesaikan pada tahun 2011
- Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2011 termasuk dalam kategori baik, dari sejumlah 30 SKPD yang di-IKM pada tahun 2011 hanya terdapat 1 SKPD yang berkategori Cukup yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, sedangkan 29 SKPD lainnya masuk dalam kategori Baik, sehingga apabila dirata-rata capaian indikatornya adalah baik dengan persentase sebesar 96,67%. Pengukuran IKM dilaksanakan oleh Bagian Organisasi atau dengan swakelola oleh SKPD, yaitu :
  1. Dinas Pendidikan,
  2. Dinas Kesehatan,
  3. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga,
  4. Dinas Bina Marga dan Pengairan,
  5. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan,
  6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,
  7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

8. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan,
9. Dinas Kehutanan dan Perkebunan,
10. Dinas Kelautan dan Perikanan,
11. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,
12. Dinas Pertambangan dan Energi,
13. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset,
14. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
15. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal
16. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat,
17. Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik,
18. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,
19. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan,
20. Badan Kepegawaian Daerah,
21. Inspektorat,
22. RSUD
23. Kantor Pendidikan dan Pelatihan
24. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
25. Kantor Lingkungan Hidup,
26. Kantor Ketahanan Pangan,
27. Kantor Pelayanan Perizinan,
28. Satuan Polisi Pamong Praja
29. Sekretariat Daerah
30. Sekretariat DPRD

- Indikator jumlah Unit Pelayanan Berstandar Internasional dari target 5 unit pelayanan pada tahun 2011 dapat tercapai sebanyak 7 unit pelayanan yang berstandar internasional. Unit pelayanan yang telah berstandar internasional atau telah mempunyai sertifikat ISO 9001-2008 pada tahun 2011 antara lain :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Kantor Pelayanan Perijinan
3. UPT Puskesmas Punung
4. UPT SMKN I Pacitan
5. UPT SMKN II Pacitan
6. UPT SMKN III Pacitan
7. UPT SMPN I Pacitan

Pelaksanaan sertifikasi ISO pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Pelayanan Perijinan dan UPT Puskesmas Punung pelaksanaannya dikoordinir oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan melalui Dana APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2011, sedangkan untuk UPT SMKN I Pacitan, UPT SMKN II Pacitan, UPT SMKN II Pacitan dan UPT SMPN I Pacitan merupakan program dari Kementerian Pendidikan Nasional sebagai syarat untuk menuju Sekolah Berstandar Internasional dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan

**Tabel III.21.**  
**Capaian kinerja sasaran 4 :**  
**“terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”**

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJM (2010)	2011		KINERJA	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	% PERKEMB.
1. Pelanggaran disiplin PNS (1/10.000)	0,0022	0,0014	0,0014	100,00	0,0008

2. Jumlah SKPD yang menerapkan e-government	18	18	18	100,00	0,00
3. Sistem Informasi Manajemen Pemda	2	4	4	100,00	2,00
4. Web site milik pemerintah daerah	ada	ada	ada	100	0,00
5. Opini audit BPK	WTP	WTP	Menunggu hasil audit	-	-
6. Peraturan daerah yang melibatkan partisipasi stakeholders %	100	100	100	100,00	0,00
7. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	-	ada	ada	100	0,00
8. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	100	0,00
9. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada	ada	ada	100	0,00
10. Prosentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100	100	100	100,00	0,00
<b>Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran</b>				<b>90,00</b>	

Sasaran 4 : "Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance)", dengan capaian indikator kinerja rata-rata pada tahun 2011 sebesar 90,00% termasuk kategori "*Baik*", dan didukung oleh 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran. Secara umum target dari indikator sasaran ini dapat terpenuhi seluruhnya, akan tetapi terdapat satu indikator yang sampai dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun belum dapat diketahui hasilnya yaitu indikator hasil opini audit BPK, hal ini disebabkan karena BPK belum mengumumkan hasil auditnya selama tahun 2011.

Penjelasan terhadap capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- Tingkat Pelanggaran Disiplin PNS dilingkup pemerintah kabupaten pacitan dari target sebesar 0,0014 terealisasi 0,0014 sehingga capaiannya 100%, prosentase pelanggaran pns tahun 2011 menurun 0,0008 dibanding dengan tahun 2010. pada tahun 2011 terdapat 14 kasus pelanggaran disiplin pns yang secara keseluruhan dapat diselesaikan. sedangkan untuk temuan hasil pemeriksaan terdapat 254 temuan yang juga dapat diselesaikan 100% pada tahun 2011. berhasilnya tingkat penyelesaian pelanggaran disiplin pns dan temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah tenaga pemeriksa yang ada di kabupaten pacitan, dari 21 tenaga pemeriksa terdapat 5 orang yang telah mengikuti diklat auditor, atau bertambah 2 orang bila dibandingkan dengan kondisi pada awal RPJMD
- Jumlah SKPD yang menerapkan e-gov pada tahun 2011 dari target sebanyak 18 SKPD dapat terealisasi 18 SKPD sehingga target dapat terpenuhi 100%, kedelapan belas (18) SKPD tersebut anatara lain :
  1. Badan Kepegawaian Daerah, pada Aplikasi SIMPEG;
  2. Bagian Hukum, Aplikasi (JDIH) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  3. Bagian PDE: Web site <http://www.pacitankab.go.id>, dan Kantaya;
  4. Bagian Pembangunan, Aplikasi LPSE;
  5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal , aplikasi Musrenbang;
  6. Badan Penaggulanagn Bencana Daerah, aplikasi Website BPBD;

7. Dinas Bina Marga dan Pengairan, Website Dinas;
  8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , aplikasi SIAK;
  9. Dinas Kesehatan, aplikasi Sympus Strocle;
  10. Dinas Pendidikan, Aplikasi Website Dinas Pendidikan;
  11. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi , aplikasi Bursa Kerja Online (BKOL);
  12. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset, aplikasi SIPKD;
  13. Kantor Lingkungan Hidup, Website Kantor;
  14. Kantor Pelayanan Perijinan, aplikasi SIM Perijinan;
  15. Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi, aplikasi QALIS (Quadra Alphabetic Library System);
  16. Kecamatan, Aplikasi SIAK Kecamatan, Web Site Kecamatan;
  17. Puskesmas Tulakan, aplikasi Website Puskesmas;
  18. Rumah Sakit Umum Daerah, SIM RSUD.
- Sistem Informasi Manajemen Milik Pemda pada tahun 2011 ditargetkan sebanyak 4 SIMDA dan dapat terealisasi sebesar 4 SIMDA sehingga capaiannya sebesar 100% atau dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Keempat SIMDA tersebut antara lain:
1. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
  2. Sistem Informasi Keuangan;
  3. Sistem Informasi Kesehatan;
  4. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.

- Pemerintah kabupaten Pacitan telah memiliki sarana Website Kab. Pacitan dengan alamat <http://www.pacitankab.go.id>, sesuai dengan Permenkominfo No. 28/ PER/ M.KOMINFO/ 9/ 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah
- Hasil Opini audit BPK pada tahun 2011 belum diumumkan sampai dengan akhir tahun 2011 sehingga belum didapatkan data capaiannya. Pada tahun 2010 pemerintah kabupaten pacitan berhasil memperoleh predikat WTP atas penilaian audit dari BPK RI, dengan capaian ini diharapkan pada tahun 2011 pemerintah Kabupaten Pacitan dapat mempertahankan predikat tersebut. Langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Pacitan untuk mempertahankan predikat WTP tersebut antara lain dengan menetapkan peraturan Bupati pacitan Nomor 29 tahun 2011 tentang *Road Map Dan Action Plan* Dalam Mewujudkan Dan Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016.
- Capaian indikator peraturan daerah yang melibatkan partisipasi stakeholder pada tahun 2011 teralisasi sebesar 100% hal ini menggambarkan bahwa seluruh peraturan daerah dalam proses penyusunannya telah melibatkan seluruh stakeholder terkait.
- Pada tahun 2011 Kabupaten Pacitan telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang ditetapkan melalui sebuah peraturan daerah nomor 5 tahun 2011 tentang rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah kabupaten pacitan tahun 2005-2025.



Pemerintah Kabupaten Pacitan juga telah memiliki Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2016 yang memuat Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai sebuah rencana aksi untuk mewujudkan dan mendukung RPJPD 2005 – 2025. RPJMD kabupaten pacitan ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2016.

- Dalam melaksanakan RPJMD Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menyusun RKPD yang merupakan hasil musrenbang yang melibatkan seluruh pihak yang terkait, RKPD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor: 14 tahun 2011 tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kabupaten pacitan tahun 2012
- Sedangkan prosentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD pada tahun 2011 mencapai 100% atau semua program yang tercantum dalam RPJMD telah dijabarkan secara keseluruhan ke dalam RKPD

**Tabel III.22.**  
**Capaian Kinerja Sasaran 5 :**  
**“Terwujudnya Perilaku Hidup Sehat”**

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJM (2010)	2011		KINERJA	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	% PERKEMB.
1. Penduduk yang menggunakan jamban (%)	76,93	77,5	79,47	102,54	2,54
2. Rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (%)	67,37	67,5	58,1	86,07	-9,27
3. Angka Usia Harapan Hidup	70,88	70,9	71,6	100,99	0,72
<b>Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran</b>				<b>96,53</b>	

Sasaran 5 : " Terwujudnya Perilaku Hidup Sehat", dengan capaian indikator kinerja rata-rata pada tahun 2011 sebesar 96,53% termasuk kategori "*Baik*", dan didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja sasaran.

Penjelasan terhadap capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- Jumlah penduduk yang menggunakan jamban pada tahun 2011 mencapai 429.563 jiwa atau 79,47% dari jumlah penduduk yang ada yaitu 540.510 jiwa. Sedangkan target adalah 77,5% dari jumlah penduduk sehingga capaian kinerjanya adalah 102,55% dan sudah melampaui target. Hal ini didorong oleh program ODF atau STBM di wilayah Kabupaten Pacitan serta pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat. Masih ada sekitar 20% penduduk yang belum mengakses jamban sehat. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku BAB (buang air besar) masyarakat yaitu :
  - Adat kebiasaan turun temurun.
  - Faktor geografis dekat dengan aliran sungai, hutan dan lainnya.
  - Ketersediaan air bersih masih kurang utamanya pada musim kemarau panjang di beberapa wilayah.
  - Kemampuan ekonomi masyarakat masih terbatas sehingga tidak mampu membuat jamban sehat
- Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menggambarkan keadaan perilaku masyarakat yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat, digunakan 10 indikator antara lain : persalinan oleh tenaga

kesehatan, bayi diberi ASI eksklusif, menimbang balita tiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk di rumah, makan buah dan sayur tiap hari, melakukan aktifitas fisik setiap hari dan tidak merokok di dalam rumah. Rumah tangga ber-PHBS adalah rumah tangga yang seluruh anggota keluarganya telah berperilaku hidup bersih dan sehat yang meliputi 10 indikator tersebut.

Target tahun 2011 sebesar 67,50% rumah tangga yang ber-PHBS terealisasi sebesar 58,10% sehingga capaian kinerjanya 86,07%. Pada tahun 2011 jumlah rumah tangga yang dikaji adalah 1.680 buah dan 976 rumah tangga yang ber-PHBS. Sedangkan jumlah seluruh rumah tangga ada 153.372 rumah tangga dan rumah tangga yang dikaji minimal 1% dari seluruh rumah tangga yang ada.

Indikator kinerja Rumah tangga yang ber-PHBS kurang memenuhi target dikarenakan perilaku masyarakat yang kurang memenuhi standar kesehatan seperti perilaku makan buah dan sayur setiap hari masih rendah serta perilaku merokok di dalam rumah masih sangat tinggi. Indikator kinerja ini didukung dengan kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat, karena keterbatasan anggaran maka capaian indikator ini belum maksimal. Ke depan menuju pencapaian visi “Masyarakat Pacitan Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat” maka kegiatan promosi kesehatan merupakan kegiatan yang harus lebih ditingkatkan agar pembangunan kesehatan lebih berhasil dalam upaya promotif dan

preventif bukan lagi pada kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Juga diperlukan adanya intervensi dari berbagai komponen baik lintas program maupun lintas sektor, LSM, swasta, tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

- Target UHH Kabupaten Pacitan yang tercantum dalam RPJMD untuk tahun 2011 adalah 70,90 tahun, dengan realisasi 71,60 tahun sehingga prosentase capaian kinerjanya 100,99%. UHH Kabupaten Pacitan Tahun 2010 yaitu 70,90 tahun, berarti ada peningkatan pada tahun 2011 dibanding tahun 2010 sebesar 0,7 tahun. Pacitan sudah mencapai target pada tahun 2011, salah satu faktornya adalah karena derajat kesehatan yang baik didukung dengan Posyandu Lansia yang mana kesehatan lansia dipantau dengan kegiatan ini. Angka ini diharapkan dapat mencerminkan tingkat/derajat kesehatan penduduk, karena apabila seseorang mempunyai derajat kesehatan yang baik maka ia mempunyai harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan orang yang derajat kesehatannya buruk. Usia Harapan Hidup tidak hanya dipengaruhi faktor kesehatan namun kesehatan mempunyai peranan penting terhadap panjang pendek umur seseorang

**Tabel III.23.**  
**Target Indikator Kinerja Sasaran 6**  
**“Terciptanya Lingkungan Sehat”**

INDIKATOR KINERJA		KONDISI AWAL RPJM (2010)	2011		KINERJA	
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	% PERKEMB.
1.	Rumah layak huni (%)	88,12	88,12	89,88	102,00	1,76
2.	Jumlah rumah layak huni	117.698	117.698	120.052	102,00	0,02
3.	Rumah bersanitasi (%)	76,56	77,93	78,52	100,76	0,59

INDIKATOR KINERJA		KONDISI AWAL RPJM (2010)	2011		KINERJA	
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	% PERKEMB.
4.	Jumlah rumah berjambran	104.592	105.518	116.218	110,14	11,12
5.	Pencemaran status mutu air (%)	20	50	51	102,00	1,00
6.	Penanganan sampah (%)	86,83	87,58	87,58	100,00	0,00
7.	Desa melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	50,4	51	58,1	113,92	7,10
8.	Jumlah pelaksanaan tatanan Kabupaten Sehat	4	4	4	100,00	0,00
Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran					103,86	

Sasaran 6 : " Terciptanya Lingkungan Sehat", dengan capaian indikator kinerja rata-rata pada tahun 2011 sebesar 103,86% termasuk kategori "*Sangat Baik*", dan didukung oleh 8 (delapan) indikator kinerja sasaran.

Penjelasan terhadap capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- Jumlah rumah penduduk Kabupaten Pacitan pada akhir tahun 2011 sejumlah 133.566 rumah dengan kondisi layak huni sejumlah 120.052 rumah, sehingga masih terdapat 13.514 rumah yang membutuhkan penanganan agar dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman dan sehat serta dapat meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Jumlah rumah layak huni pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 0,02% dibanding tahun 2010. Peningkatan ini disebabkan karena adanya program PNPM mandiri pedesaan dan program bedah rumah yang dilaksanakan oleh TNI bekerjasama dengan Pemerintah Daerah
- Rumah bersanitasi pada awal periode RPJMD atau pada akhir tahun 2010 menunjukan prosentasi 76,56 %, sedangkan pada tahun tahun 2011 dari

target 77,93% dapat terealisasi 78,52 % sehingga menunjukan perkembangan 0,59 %.

- Jumlah rumah berjambran di kabupaten pacitan pada tahun 2011 dari target 105.518 rumah berjambran terealisasi 116.218 rumah berjambran sehingga capaian kinerjanya 110,14%. Jumlah rumah keseluruhan di kabupaten pacitan pada tahun 2011 sebanyak 140.965 unit. Berarti masih terdapat 24.747 unit atau sekitar 17,56% yang belum berjambran. Capaian indikator ini didukung oleh program ODF (Open defecation free) atau sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) yang tengah digalakkan oleh pemerintah kabupaten pacitan melalui dinas kesehatan dalam rangka menuju pacitan bebas ODF tahun 2012. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan lagi kesadaran dan pemahaman masyarakat agar tidak buang air besar di sembarang tempat agar kesehatan lingkungan lebih meningkat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- Indikator capaian program pencemaran status mutu air menunjukkan capaian 51% dari 50% target pada tahun 2011. Angka ini dihitung dari jumlah usaha/kegiatan yg telah mentaati persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran air dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah usaha dan atau kegiatan yang di awasi dalam 1 tahun.

Untuk pencemaran air di Kabupaten Pacitan sebagian besar disebabkan masih besarnya potensi dan kejadian erosi di bagian hulu dan sepanjang aliran sungai yang pada akhirnya menimbulkan sedimentasi di sungai dan bagian muara serta dampak aktivitas masyarakat di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalirkan limbahnya ke sungai. Namun demikian kualitas

air badan air juga dapat dipertahankan mengikuti standar baku mutu yang dipersyaratkan.

Meskipun demikian tidak dipungkiri apabila memang ada satu atau dua kasus pencemaran air yang sempat menjadi sorotan publik, yaitu pencemaran air akibat pertambangan galian logam, penyulingan daun cengkeh dan peternakan sapi. Menyikapi permasalahan ini Pemerintah Kabupaten Pacitan telah mengambil tindakan antisipatif dengan melakukan pengawasan, teguran maupun mediasi antara para pihak yang terlibat di dalamnya.

- Pada indikator capaian ini diukur perbandingan antara sampah yang ditangani dengan volume produksi sampah (timbulan sampah) yang pada tahun dasar 2010 ditetapkan sebesar 5.771 m<sup>3</sup>. Target pada tahun 2011 diharapkan 86,83% dari volume produksi sampah dapat ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan. Target ini telah terealisasi dengan baik pada angka 86,83%. Penanganan sampah cukup signifikan terjadi di masyarakat karena adanya program pemberdayaan dan sosialisasi tentang pentingnya pengolahan sampah oleh masyarakat, baik melalui iklan di TV lokal, media informasi maupun pembelajaran oleh Kantor Lingkungan Hidup dan Tim Mobil Hijau Kabupaten Pacitan.

Disamping itu juga adanya stimulan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada masyarakat berupa pemberian tong sampah, komposter, gerobak sampah, gerobak sampah becak hingga pendirian Bank Sampah Pace Sewu yang diharapkan dapat memicu berdirinya bank-bank sampah lainnya di Pacitan

- Desa Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 dengan target 51% sudah terealisasi sebesar 78,951% atau sebanyak 135 desa sudah melaksanakan pemucuan STBM, sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 154,80%. Masih ada 36 desa yang belum melaksanakan pemucuan karena pelaksanaan pemucuan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Puskesmas/Kecamatan masing-masing. Sudah ada 4 Kecamatan Bebas ODF pada tahun 2011 yaitu Kecamatan Donorojo, Punung, Pringkuku dan Bandar. Capaian kinerja indikator ini sangat didukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan utamanya oleh Bupati Pacitan yang hadir pada acara Deklarasi ODF (*Open Defecation Free*) program Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi yang dipusatkan di Kecamatan Bandar pada bulan November 2011
- Untuk pelaksanaan tatanan Kabupaten Sehat sampai dengan tahun 2011 terealisasi sebanyak 4 tatanan dari 9 tatanan yang ada. Target tahun 2011 sudah tercapai 100% dan secara bertahap akan ditingkatkan pelaksanaan 9 tatanan Kabupaten Sehat dan diharapkan tuntas pada tahun 2015.  
Sesuai Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 atau 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat, yang dimaksud Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/ kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang



terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Tatanan Kabupaten/Kota Sehat dikelompokkan berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus, terdiri dari :

- Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum
- Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi
- Kawasan Pertambangan Sehat
- Kawasan Hutan Sehat
- Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat
- Kawasan Pariwisata Sehat
- Ketahanan Pangan dan Gizi
- Kehidupan Masyarakat Yang Mandiri
- Kehidupan Sosial Yang Sehat

Pada tahun 2011 dari 4 tatanan yang diajukan dan dinilai di tingkat nasional, ada 2 tatanan yang lolos oleh tim verifikasi dan berhak menerima Penghargaan “Swasti Saba Padapa” Program Kabupaten Sehat kualifikasi pemantapan. Penyerahan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia yaitu penghargaan Swasti Saba Padapa diterimakan pada tanggal 14 Nopember 2011 kepada Bupati Pacitan di Istana Negara. Tatanan Kabupaten Sehat yang mengikuti verifikasi tingkat nasional adalah :

- Tatanan Masyarakat Sehat Mandiri, titik Pantau di Desa Poko
- Tatanan Pariwisata Sehat, titik pantau di Pantai Teleng Ria
- Tatanan Pemukiman dan Sarana Prasarana Sehat, titik pantau di Perumnas Bangunsari

- Tatanan Hutan Sehat, dengan titik pantau di Desa Donorojo

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Kabupaten Sehat tahun 2011 adalah :

- Tilik kebersihan bersama forum
- Penyuluhan keamanan pangan di kawasan Pantai Teleng Ria
- Sosialisasi kepada 12 camat dan 24 puskesmas
- Sosialisasi di 8 dusun di Desa Poko sebagai titik pantau Sehat Mandiri
- Penyiapan dokumen dan film persiapan maju ke tingkat nasional
- Replikasi forum komunikasi dan pokja di semua kecamatan dan desa

**Tabel III.24.**  
**Target Indikator Kinerja Sasaran 7 :**  
**“Meningkatnya Pelayanan Kesehatan”**

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJM (2010)	2011		KINERJA	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	% PERKEMB.
1. Rasio dokter per satuan penduduk (‰)	0,17	0,17	0,172	101,18	0,00
2. Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk (‰)	0,87	0,88	1,14	129,55	0,27
3. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	14,2	12	11,57	96,42	(2,63)
4. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	128,29	128	105,17	82,16	(23,12)
5. % Kunjungan puskesmas/visit rate	58,59	60	65,69	109,48	7,10
6. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA(%)	18,92	22	28,47	129,41	9,55
7. Penderita DBD yang ditangani (%)	100	100	100	100,00	0,00
8. Cakupan puskesmas (%)	200	200	200	100,00	0,00
9. Cakupan puskesmas pembantu (%)	32,16	32,16	32,16	100,00	0,00
10. Cakupan kunjungan bayi(%)	98,92	90	102,8	114,22	3,88

11. Angka kesakitan malaria per 1000(‰)	1,16	1	0,5	50,00	(0,66)
12. Cakupan pelayanan anak balita (%)	89,24	90	77,89	86,54	(11,35)
13. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)(%)	71,93	72	27,49	38,18	(44,44)
14. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100,00	0,00
15. Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	0,64	0,6	0,26	43,33	(0,38)
16. Posyandu aktif(%)	46	46	100	217,39	54,00
17. Cakupan kunjungan ibu hamil k-4 (%)	87,75	90	86,58	96,20	(1,17)
18. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan(%)	98,61	95	98,68	103,87	0,07
19. Klien yang mendapatkan penanganan HIV - AIDS (%)	100	100	100	100,00	0,00
20. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin(%)	55,88	56	66,42	118,61	10,54
21. Pasien Gakin yang dilayani Rumah Sakit (RS) pada setiap unit pelayanan (%)	100	100	100	100,00	0,00
22. Penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit(%)	8,41	8,48	8,45	99,65	0,04
23. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani(%)	90,92	90	102,89	114,32	11,97
24. Prevalensi balita gizi buruk	0,51	1	0,14	14,00	(0,37)
25. Cakupan desa siaga aktif (%)	49,71	50	75,44	150,88	25,73
26. Pemasangan kontrasepsi KB (%)	78,82	78,85	103,02	130,65	24,20
27. Akseptor KB (%)	78,82	78,85	103,02	130,65	24,20
28. Peserta KB aktif (%)	76,25	76,3	79,71	104,47	3,46
29. Kader bina ketahanan keluarga (%)	69,3	70,2	0	0,00	0,00
<b>Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran</b>				<b>98,66</b>	

Sasaran 7 : "Meningkatnya Pelayanan Kesehatan", dengan capaian indikator kinerja rata-rata pada tahun 2011 sebesar 98,66% termasuk kategori "*Baik*", dan didukung oleh 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja sasaran.

Penjelasan terhadap capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- **Rasio dokter per satuan penduduk (‰)**

Dari target 0,17 dokter per 1.000 penduduk terealisasi 0,172 sehingga capaian kinerjanya 101,21%. Jumlah dokter tahun 2011 adalah 93 orang sedangkan jumlah penduduk 540.510 jiwa sehingga 1 orang dokter melayani 5.812 penduduk. Jumlah dokter sebanyak 93 orang tersebut terdiri dari dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi di Dinas Kesehatan dan RSUD Pacitan. Sedangkan standar nasional dalam Permenkes Nomor 81/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota Serta Rumah Sakit adalah 1 orang dokter spesialis melayani 16.000 penduduk dan 1 orang dokter umum melayani 2.500 penduduk, sedangkan 1 orang dokter gigi melayani 9.000 penduduk. Secara umum jumlah tenaga medis di Kabupaten Pacitan sampai tahun 2011 masih sangat kurang sehingga perlu perhatian dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Upaya yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan adalah mengusulkan penambahan formasi tenaga dokter baik dokter umum maupun dokter gigi kepada Badan Kepegawaian Daerah, tetapi sampai saat ini belum ada rekrutmen CPNS Daerah lagi. Usulan penambahan tenaga dokter di puskesmas pada tahun 2012 sebanyak 24

orang dokter umum, masing-masing puskesmas mendapat tambahan 1 orang dokter umum, sedangkan usulan penambahan untuk dokter gigi adalah 17 orang, masing-masing puskesmas memiliki 1 orang dokter gigi.

Dasar usulan penambahan tenaga medis tersebut adalah :

- 1) Dengan adanya puskesmas Rawat inap dari 4 menjadi 9 di tahun 2012 diperlukan dokter di puskesmas Rawat Inap minimal 3 orang dokter umum dan 1 orang dokter gigi.
- 2) Untuk Mendukung Program UGD Puskesmas 24 jam diperlukan tenaga dokter umum sejumlah 2 orang dan 1 orang dokter gigi untuk tiap Puskesmas Rawat Jalan.

- **Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk (‰)**

dari target 0,88 per 1000 penduduk terealisasi 1,136 per 1000 penduduk sehingga capaian kinerjanya 129,09%. Jumlah tenaga paramedis (bidan, perawat dan perawat gigi) adalah 614 orang dan jumlah penduduk Kabupaten Pacitan tahun 2011 sebanyak 540.510 jiwa, artinya bahwa setiap 1 orang paramedis mampu melayani 880 penduduk. Jumlah paramedis ini mengalami peningkatan dengan adanya rekrutmen bidan PTT dan perawat Poskesdes pada tahun 2011. Sedangkan standar nasional dalam Permenkes Nomor 81/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota Serta Rumah Sakit adalah 1 orang perawat melayani 850 penduduk, 1 orang bidan melayani 1.000 penduduk dan 1 orang perawat gigi melayani 3.300 penduduk.

- **Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup**

Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator penting untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat, sehingga program-program kesehatan banyak yang menitikberatkan pada upaya penurunan AKB, dimana AKB merujuk pada jumlah bayi yang meninggal antara fase kelahiran hingga bayi berumur < 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKB tahun 2011 sebesar 11,56/1.000 KH, mengalami penurunan dari tahun 2010 yang mencapai angka 12,38/1.000 KH. Sehingga capaian kinerja tahun 2011 sebesar 103,58%. Angka riil kematian bayi tahun 2011 adalah 88 bayi sedangkan jumlah kelahiran hidup adalah 7.607 kelahiran hidup. Sedangkan Angka Kematian Bayi Tahun 2010 sebesar 12,38/1.000 kelahiran hidup atau sebanyak 96 bayi pada 7.756 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pacitan lebih rendah dibanding Angka Kematian Bayi (AKB) Propinsi Jawa Timur sebesar 29,9/1.000 kelahiran hidup, dan angka nasional AKB sebesar 32/1.000 kelahiran hidup. Tingginya AKB menunjukkan rendahnya kualitas perawatan selama masa kehamilan, saat persalinan dan masa nifas, status gizi dan penyakit infeksi ibu.

Permasalahan AKB di Kabupaten Pacitan tahun 2011 adalah:

- a. Peningkatan kematian bayi terjadi pada kasus BBLR (berat bayi lahir rendah).
- b. Penanganan kasus BBLR oleh tenaga kesehatan/bidan kurang maksimal karena bidan yang dilatih manajemen BBLR baru 10% dari jumlah bidan yang ada.

- **Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup**

AKI tahun 2011 mencapai 105,17/100.000 KH, mengalami penurunan dibanding tahun 2010 yang mencapai 128,38/100.000 KH. Sehingga capaian kinerja tahun 2011 sebesar 117,87%. Angka riil kematian ibu tahun 2011 adalah 8 orang dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 7.607 kelahiran. Sedangkan jumlah ibu maternal yang meninggal pada tahun 2010 sebanyak 10 orang. Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pacitan lebih tinggi dibanding Angka Kematian Ibu (AKI) Propinsi Jawa Timur sebesar 101,3/100.000 kelahiran hidup, dan lebih rendah dibanding angka nasional AKI sebesar 118/100.000 kelahiran hidup.

Permasalahan masih tingginya AKI di Kabupaten Pacitan adalah :

- a. Tenaga bidan yang terlatih Asuhan Persalinan Normal (APN) baru mencapai 36%.
- b. Tingkat pengetahuan dan ekonomi ibu hamil relatif rendah terutama di daerah pedesaan sehingga pengetahuan tentang bahaya kehamilan dan risiko tinggi pada kehamilan masih rendah.
- c. Masih ada persalinan ditolong oleh dukun.
- d. Penyebab kematian Ibu kebanyakan karena penyakit penyerta seperti jantung 2 orang, HIV/AIDS 1 orang, TBC 1 orang dan GBS 1 orang. Sedangkan penyebab langsung kematian ibu melahirkan yaitu Perdarahan 1 orang, Pre-eklamsi 1 orang dan Sepsis 1 orang.
- e. Minimnya sarana transportasi dari rumah ibu ke sarana pelayanan kesehatan sehingga sering terlambat mendapat pertolongan.

- f. Penanganan kasus kematian ibu dan bayi memerlukan upaya komprehensif yang memerlukan partisipasi lintas sektor sehingga dukungan dan kerjasama lintas sektor perlu ditingkatkan.

Upaya penurunan AKI terus dilakukan antara lain melalui peningkatan cakupan, mutu pelayanan dan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui pelatihan tenaga kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kerjasama lintas sektor dan lintas program serta peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Siaga. Salah satu kegiatan Desa Siaga sebagai upaya penurunan AKI AKB adalah melalui P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi). Salah satu kegiatan dalam P4K adalah penempelan stiker di rumah ibu hamil agar apabila ada kelainan pada ibu hamil/ibu dengan risiko tinggi dapat diketahui. Dengan demikian anggota keluarga, masyarakat, petugas kesehatan dapat mengetahui risiko pada ibu hamil sehingga selalu dalam kondisi SIAGA ikut berperan serta menolong persalinan

- **Kunjungan puskesmas/visit rate (%)**

Target kunjungan puskesmas pada tahun 2011 adalah 60% terealisasi sebesar 73,10% sehingga capaian kinerjanya 121,83%. Angka riil kunjungan puskesmas adalah 395.132 kunjungan sedangkan jumlah penduduk adalah 540.510 jiwa. Artinya sebanyak 73,10% penduduk di Kabupaten Pacitan memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya selama tahun 2011. Jumlah kunjungan



puskesmas tahun 2010 sebesar 58,59%. Meningkatnya kunjungan puskesmas ini menandakan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas. Juga semakin meningkatnya sarana kesehatan baik puskesmas dan jaringannya (pustu, polindes, poskesdes) serta sarana puskesmas keliling yang semakin baik kualitas dan kuantitasnya. Semakin bertambah jumlah tenaga kesehatan yang menjangkau polindes dan poskesdes juga memberi andil terhadap peningkatan kunjungan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya

- **Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA(%)**

Angka penemuan pasien baru TB BTA Positif atau *Case Detection Rate (CDR)* adalah persentase jumlah penderita baru TB BTA Positif yang ditemukan dibanding dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA Positif dalam waktu satu tahun. Target penemuan dan penanganan penderita TB BTA Positif dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 adalah 24% sedangkan realisasinya 28,47% sehingga capaian kinerjanya 118,63%. Jumlah pasien baru TB BTA Positif tahun 2011 sebanyak 164 orang dari 576 perkiraan pasien baru TB BTA Positif. Sedangkan penderita TB BTA Positif tahun 2010 sebanyak 115 orang. Rendahnya capaian indikator ini dikarenakan beberapa hal yaitu :

Penemuan penderita baru (CDR) masih rendah, ada 8 puskesmas (33,33%) yang belum menemukan penderita.

Pemeriksaan suspek rendah, ada puskesmas yang tidak bisa menemukan suspek

- **Penderita DBD yang ditangani (%)**

Cakupan penanganan penderita DBD pada tahun 2011 adalah 100% dari jumlah penderita yang ditemukan mendapat penanganan sesuai SOP. Jumlah penderita DBD sampai bulan Desember 2011 adalah 256 orang. Jumlah penderita DBD tahun 2011 menurun dibanding tahun 2010 yang mencapai 679 kasus. Angka kesakitan DBD tahun 2011 sebesar 47,36 per 100.000 penduduk, sedangkan angka kesakitan DBD tahun 2010 sebesar 125,54 per 100.000 penduduk. Masih tingginya kasus DBD dikarenakan beberapa hal seperti :

- a. Masih ada beberapa daerah endemis demam berdarah, ada 2 Puskesmas dengan kasus DBD tinggi yaitu Tanjungsari dan Pacitan.
- b. Angka Bebas Jentik (ABJ) masih 60.33% dari target >95%, kegiatan jumentik (juru pemantau jentik) sudah tidak ada lagi.
- c. Kegiatan Fogging DBD masih rendah, baru 12,2% kasus DBD yang difogging, sedangkan target prosentase Fogging daerah endemis DBD adalah 100%.
- a. Banyak penderita yang berobat keluar Pacitan sehingga Penyelidikan Epidemiologi sedini mungkin terhambat.
- b. Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) setiap 3 bulan oleh petugas puskesmas belum dilakukan.

Upaya pemecahan masalah yang sudah dilaksanakan guna menekan kasus penyakit yang diakibatkan nyamuk (demam berdarah dan malaria) sudah dilakukan beberapa hal berikut :

- a. Menggalakkan kegiatan PSN (pemberantasan sarang nyamuk) dengan surat edaran Bupati Pacitan ke seluruh SKPD, Camat, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Pacitan agar masyarakat lebih mengutamakan gerakan PSN.

Melatih murid SD kelas 4 dan 5 sebagai kader Pentas (Pemantau Jentik Anak Sekolah) dan deklarasi Pentas sudah dilaksanakan bersamaan Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke 47 Tahun 2011 di Lapangan Kecamatan Punung. Kader Pentas bertugas melakukan pemeriksaan jentik nyamuk di lingkungan rumah sendiri dan sekitarnya kemudian melaporkan dan menyarankan kepada orang tua dan masyarakat sekitar untuk melaksanakan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk). Tujuannya adalah perkembangbiakan nyamuk dapat diminimalisir agar kasus demam berdarah dan malaria dapat diminimalkan

- **Cakupan puskesmas (%)**

Cakupan Puskesmas dari target 200% terealisasi 200% sehingga capaian kinerjanya 100%. Target 200% dalam RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan yang mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 adalah perbandingan jumlah Puskesmas dengan jumlah kecamatan yang ada. Sampai saat ini jumlah puskesmas di Kabupaten Pacitan adalah 24 unit yang terdapat di 12 kecamatan sehingga di setiap kecamatan ada 2 puskesmas. Jika merujuk pada standar nasional Permenkes bahwa setiap puskesmas idealnya melayani 30.000 penduduk, maka jumlah puskesmas di Kabupaten Pacitan telah memadai, yaitu setiap puskesmas rata-rata melayani 22.521 jiwa penduduk

- **Cakupan puskesmas pembantu (%)**

Target Puskesmas Pembantu adalah 32,16% terealisasi 32,16% sehingga capaian kinerjanya 100%. Target Puskesmas Pembantu adalah perbandingan jumlah puskesmas pembantu yang ada dibagi jumlah desa/kelurahan se kabupaten. Jumlah Puskesmas Pembantu saat ini adalah 55 unit tersebar di 12 kecamatan atau di 171 desa/kelurahan. Rasio Puskesmas Pembantu di Kabupaten Pacitan adalah 1 unit Pustu melayani 9.827 jiwa penduduk

- **Cakupan kunjungan bayi (%)**

Cakupan kunjungan bayi adalah jumlah bayi (usia 29 hari-11 bulan) yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar oleh dokter, bidan dan perawat yang mempunyai kompetensi klinis kesehatan paling sedikit 4 kali. Tahun 2011 mencapai 102.80% dari target 90%. Capaian kinerja indikator ini adalah 114,22%. Kunjungan bayi tahun 2011 sebanyak 7.772 bayi. Cakupan kunjungan bayi tahun 2010 sebesar 93,19%.

Hal ini karena ada ibu hamil yang berdomisili di luar kota saat melahirkan pulang ke Pacitan sampai usia bayinya beberapa bulan sehingga melakukan kunjungan bayi ke sarana pelayanan kesehatan yang ada di Pacitan. Peningkatan juga karena meningkatnya kunjungan petugas kesehatan ke posyandu, rumah, tempat penitipan anak melakukan pelayanan kesehatan termasuk imunisasi dasar, deteksi dini tumbuh kembang bayi dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi (konseling)

- **Angka kesakitan malaria per 1000(‰)**

Dari target <1 per 1.000 penduduk terealisasi 0,5 per 1.000 penduduk sehingga capaian kinerjanya 150%. Kasus malaria di Kabupaten Pacitan tahun 2011 menunjukkan penurunan dengan jumlah penderita malaria tahun 2011 adalah 273 orang, sedangkan tahun 2010 ada 432 orang. Namun beberapa puskesmas angka kesakitan malaria masih tinggi misalnya di wilayah puskesmas Tegalombo, Bubakan, dan Arjosari angka kesakitan malaria masih >1.

Malaria merupakan penyakit menular berbasis lingkungan dan potensial terjadi KLB, karena lingkungan sebagai tempat perindukan vektor potensial masih sangat luas ditunjang dengan kasus pindahan yang masih tinggi. Penderita penyakit malaria di Pacitan tidak hanya penderita yang dari luar wilayah (import) tetapi berasal dari dalam wilayah setempat (indigenous). Malaria masih menjadi masalah kesehatan yang harus dieliminasi berdasar Keputusan Menkes Nomor 293/MENKES/SK/2011 tentang Eliminasi Malaria. Angka *Annual Parasite Incidence (API)* Kabupaten Pacitan sebesar 0,89 sedangkan Propinsi Jawa Timur 0,07.

Permasalahan dalam penanganan malaria adalah :

- a. Pembukaan Jalur Lintas Selatan yang melewati daerah-daerah malaria.
- b. Adanya pembangunan PLTU Sudimoro mengakibatkan adanya tempat perindukan baru.
- c. Migrasi penduduk Pacitan, khususnya para pekerja “mbalak” yang bekerja atau bertugas di Pulau Sumatra, Kalimantan, Papua dimana

daerah tersebut merupakan daerah endemis Malaria.

- d. Belum optimalnya layanan kesehatan karena sebanyak 21 orang(87,5%) petugas puskesmas belum dilatih program malaria.
- e. Kondisi geografis pantai dan pengunungan yang cocok untuk perkembangbiakan nyamuk penular Malaria (*Anopheles*) tersebar di seluruh wilayah Pacitan.

Tindakan yang perlu dilakukan dalam penanganan malaria adalah:

- a. Pembentukan tenaga Juru Malaria Desa (JMD) utamanya di wilayah yang angka kesakitannya masih tinggi.
- b. Semua suspek malaria yang menunjukkan gejala klinis harus diperiksa sampel darah di laboratorium.
- c. Pelaksanaan Pos Malaria Desa (PMD) di Puskesmas Tegalombo sudah berjalan

- **Cakupan pelayanan anak balita (%)**

Cakupan pelayanan Anak Balita adalah anak umur 12-59 bulan yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 2 kali dalam setahun berupa pengukuran berat badan per tinggi badan(BB/TB), perkembangan gerak kasar, gerak halus , bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya dengar dan daya lihat. Pemantauan petugas kesehatan dilaksanakan selain di dalam gedung (puskesmas, pustu, polindes, poskesdes) juga di luar gedung seperti di posyandu, taman bermain, PAUD, Taman Penitipan Anak dan Taman Kanak-Kanak atau setingkat.

Capaian tahun 2011 sebesar 77,89% dari target sebesar 90% sehingga capaian kinerjanya 86,54%. Jumlah riil kunjungan anak balita tahun 2011 adalah 22.904 anak. Masih belum tercapai dari target yang ditetapkan karena kesadaran orang tua masih kurang sehingga anak balitanya tidak dibawa ke posyandu. Juga adanya perubahan/tambahan format laporan yang dibuat berdasarkan data gender (laki-laki dan perempuan), sehingga tenaga di lapangan (bidan) masih kesulitan memilah data. Capaian tahun 2010 sebesar 90,57%

- **Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)(%)**

Indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program imunisasi secara nasional adalah angka UCI. *Universal Child Immunization (UCI)* adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, WUS dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, 1 dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis TT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis TT. Cakupan Desa/Kelurahan UCI adalah desa/kelurahan dimana  $\geq 80\%$  dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Pada tahun 2011 dari total 171 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Pacitan, target desa/kelurahan UCI adalah 95% atau 162 desa/kelurahan sedangkan realisasinya ada 47 desa/kelurahan atau 27,49% mencapai UCI. Dalam arti 47 desa tersebut telah mencapai target minimal pada semua antigen program imunisasi. Pada tahun 2011 belum mencapai target karena :

- Pada pertengahan tahun 2011 ada peningkatan target beberapa antigen pada kontak pertama diantaranya DPT HB 1 (0-7 hari) dari 90% menjadi 95%, BCG dari 90% menjadi 95%, Polio 1 dari 90% menjadi 95% sehingga banyak desa yang tidak bisa mencapai UCI dengan target baru tersebut.
- Karena capaian indikator ini dihitung dengan penyebut dalam bentuk proyeksi jumlah sasaran bayi usia 0-11 bulan yang pada kenyataannya data proyeksi yang diterbitkan BPS dan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur tidak mendekati angka riil di lapangan per desa/kelurahan sehingga beberapa desa/kelurahan tidak bisa mencapai UCI.

Apabila memakai data riil jumlah bayi yang mendapat pelayanan imunisasi dari petugas kesehatan maka capaian indikator desa/kelurahan UCI di Kabupaten Pacitan tahun 2011 sudah mencapai 100%

- **Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)**

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk. Target 100% realisasi 100% karena dari 38 balita gizi buruk yang ditemukan seluruhnya mendapat penanganan. Semua balita gizi buruk (Berat Badan sangat kurus) sudah mendapat perawatan dari tenaga kesehatan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam penanganan dan perawatan pada balita gizi buruk antara lain :



- a. Pemberian Makanan Tambahan
- b. Pengobatan Penyakit Penyerta
- c. Melakukan rujukan keluar daerah
- d. Pemantauan perkembangan BB rutin setiap bulan
- e. Pengembangan Program Orang Tua Asuh Gizi Buruk
- f. Pengembangan Panti Penulihan Gizi Buruk
- g. Penyuluhan dan KIE
- h. Pemberdayaan Masyarakat
- i. Kerjasama Sektor Terkait dan Swasta

Kegiatan Panti Pemulihan Gizi Buruk/CFC (*Community Feeding Centre*) merupakan pengembangan program gizi inovatif untuk mengatasi masalah gizi buruk balita dengan memanfaatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Diluncurkan pertama kali di desa Ledok Lor Puskesmas Sukorejo, balita yang ditangani 19 anak, dalam waktu 1 bulan tingkat keberhasilan 50%. Sumber dana dari BOK Puskesmas, operasional puskesmas, donatur swasta dan UPT terkait. Kegiatan ini sudah dikembangkan dan diduplikasi di Puskesmas Gemaharjo dan menyusul di Puskesmas Kalak. Ke depan kegiatan ini perlu diterapkan di seluruh puskesmas di Kabupaten Pacitan

- **Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup**

AKBAL Kabupaten Pacitan tahun 2011 sebesar 0,26/1.000 Kelahiran Hidup, mengalami penurunan dibanding tahun 2010 sebesar 0,6/1.000 Kelahiran Hidup sehingga capaian kinerjanya 156,67%. Angka riil

kematian anak balita tahun 2011 adalah 2 orang dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 7.607 kelahiran. Angka Kematian Anak Balita (AKBAL) Kabupaten Pacitan lebih rendah dibanding Angka Kematian Anak Balita (AKBAL) Propinsi Jawa Timur sebesar 45/1.000 kelahiran hidup, dan angka nasional AKBAL sebesar 44/1.000 kelahiran hidup.

Tindakan yang sudah dilakukan :

- a. Peningkatan penanganan pada penyakit penyerta anak balita.
- b. Terbentuknya kelas balita sehingga meningkatkan pengetahuan ibu balita tentang kasus-kasus penyakit pada balita sehingga ibu cepat mencari pertolongan/pencegahan

- **Posyandu aktif(%)**

Capaian indikator persentase posyandu aktif pada tahun 2011 dengan target 46% dapat terealisasi 100% atau seluruh posyandu posyandu se-Kabupaten Pacitan tahun 2011 sebanyak 799 posyandu telah aktif. Posyandu tersebut terbagi dalam 4 tingkatan yaitu 77 posyandu Pratama, 275 posyandu Madya, 417 posyandu Purnama dan 30 posyandu Mandiri. Tersedianya Posyandu sebagai UKBM harus terus dijaga dan dilestarikan dengan meningkatkan peran aktif kader dan penguatan kelembagaan posyandu. Posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare

- **Cakupan kunjungan ibu hamil k-4 (%)**

Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali dalam masa kehamilan (sekali di trimester pertama, sekali di trimester kedua dan dua kali di trimester ketiga). Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4 Tahun 2011 mencapai 86,58%, dari target 89%. Capaian kinerja indikator ini sebesar 97,28%. Kunjungan ibu hamil K-4 tahun 2011 sebanyak 7.200 kunjungan. Sedangkan cakupan K-4 tahun 2010 sebesar 87,75%.

Permasalahan terhadap capaian indikator kinerja ini adalah :

- a. Masih terdapat ibu hamil yang memeriksakan kehamilan diatas tribulan I sehingga tidak bisa dihitung K-4-nya.
- b. Banyak ibu hamil yang hanya menumpang persalinan (warga asli Pacitan yang berdomisili di luar kota) datang pada tribulan II dan setelah persalinan kembali ke luar kota sehingga tidak bisa masuk K-4

- **Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan(%)**

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dari target 95% terealisasi 98,68% sehingga capaian kinerjanya 103,87%. Angka riil pertolongan persalinan nakes tahun 2011 sebanyak 7.535 kelahiran. Sedangkan capaian tahun 2010 sebanyak 94,03%. Capaian indikator ini sudah melampaui target meskipun masih ada kelahiran yang ditangani dukun bayi namun prosentasenya

semakin menurun dari tahun ke tahun. Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan pertolongan persalinan tenaga kesehatan adalah :

- a. Pertemuan Bidan Koordinator dalam upaya peningkatan Linakes dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2011 dan diikuti 48 orang bidan puskesmas dan bidan desa.
- b. Kemitraan bidan dukun bayi lebih ditingkatkan dengan cara pembagian tugas. Bidan sebagai penolong persalinan dan dukun bayi sebagai perawat bayi yang bertugas memandikan dan perawatan tali pusar.
- c. Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN).

Kegiatan Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) yang diikuti 60 orang bidan dilaksanakan dalam 3 angkatan yaitu :

- Angkatan I tanggal 26 September-5 Oktober 2011
- Angkatan II tanggal 10-19 Oktober 2011
- Angkatan III tanggal 12-21 Desember 2011

Sampai dengan akhir 2011 jumlah bidan yang sudah terlatih APN ada 150 orang dari 252 orang bidan atau sebanyak 59,52%

- **Klien yang mendapatkan penanganan HIV -AIDS (%)**

Jumlah penderita HIV-AIDS yang ditemukan sampai tahun 2011 adalah 43 orang dan seluruhnya mendapat penanganan sehingga capaian kinerjanya 100%. Sampai saat ini penderita HIV/AIDS yang masih hidup tinggal 17 orang. Meskipun penanganan HIV-AIDS sudah mencapai 100% penderita yang ditemukan namun masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Penderita yang ditemukan sudah dalam stadium 3 atau 4 karena tertular di luar dan baru pulang ke Pacitan setelah dalam keadaan parah.
- b. Masih terlambat dalam penemuan penderita karena kurang pengetahuan dan ketrampilan petugas dalam mengenal tanda-tanda mayor dan minornya sehingga ada penderita yang terlambat belum diambil specimennya tapi sudah meninggal dulu.

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dilakukan melalui penyuluhan baik penyuluhan langsung kepada masyarakat maupun melalui media informasi seperti siaran radio, visual billboard, leaflet dan sebagainya. Upaya lain adalah dengan pengamanan darah donor dengan cara skreening sampel darah pendonor

- **Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin(%)**

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata 2 dan strata 3 (rumah sakit) baik rawat inap maupun rawat jalan. Target jumlah maskin yang mendapat pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit adalah 1,5% dari seluruh maskin di Kabupaten Pacitan yaitu 1,5% dari 187.191 jiwa atau 2.808 jiwa. Dari target 100% terealisasi 66,42% sehingga capaian kinerjanya 66,42%. Dari 2.808 jiwa masyarakat miskin yang menjadi target pelayanan rujukan maskin di rumah sakit ada 1.865 jiwa yang memanfaatkan kartu Jamkesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit. Dengan meningkatnya sosialisasi dan

pengetahuan masyarakat tentang Jamkesmas maka pemanfaatan kartu Jamkesmas menjadi meningkat.

- **Pasien Gakin yang dilayani Rumah Sakit (RS) pada setiap unit pelayanan (%)**

Capaian indikator ini sebesar 100% dari target 100%. Indikator ini digunakan untuk mengetahui sejauhmana Rumah Sakit mampu melayani pasien miskin yang berobat ke Rumah Sakit

- **Penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit(%)**

Capaian indikator ini sebesar 0,04% dari capaian tahun 2010 yang hanya sebesar 8,41% menjadi 8,45% pada tahun 2011. Akan tetapi bila dibandingkan dengan target tahun 2011 capaiannya tidak memenuhi target yaitu 8,48%, meskipun tidak mencapai target yang ditetapkan akan tetapi realisasi indikator ini sudah diatas target nasional dari kementerian kesehatan yaitu sebesar 5%.

- **Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani(%)**

Cakupan komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi yang mendapat penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (polindes, puskesmas dan rumah sakit). Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani tahun 2011 mencapai 102,89% dari target 80% sehingga capaian kinerja 128,61%. Komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2011 sebanyak 1.711 kasus dari perkiraan 1.663 kasus. Hal ini disebabkan

semakin meningkatnya ketrampilan bidan sehingga deteksi dini komplikasi kebidanan bisa dilakukan sedini mungkin juga bertambahnya jumlah dokter spesialis kandungan dan kebidanan menjadi 2 orang sehingga penanganan kasus komplikasi kebidanan semakin meningkat

- **Prevalensi balita gizi buruk**

Gizi buruk anak balita adalah anak usia dibawah 5 tahun yang mengalami status gizi menurut berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score  $<3$  dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor dan marasmus-kwashiorkor). Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pacitan tahun 2011 dari target  $< 1\%$  jumlah balita, sedangkan realisasi 0,14% sehingga capaian kinerjanya 186,00%. Kasus balita gizi buruk tahun 2011 ada 38 balita gizi buruk dari 36.094 balita sehingga capaian prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Pacitan sudah dibawah target  $<1\%$ . Sedangkan jumlah balita gizi buruk tahun 2010 ada 34 anak atau prevalensinya 0,13%. Meski sudah dikatakan aman namun penemuan kasus balita gizi buruk masih perlu dimaksimalkan mengingat partisipasi masyarakat yang memiliki balita untuk datang ditimbang ke posyandu masih dibawah target 80% yaitu baru mencapai 74,06%. Sehingga memungkinkan masih adanya balita gizi buruk yang belum tercover pelayanan kesehatan karena tidak pernah datang ke posyandu

- **Cakupan desa siaga aktif (%)**

Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi

sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dari target tahun 2011 sebesar 40,00% terealisasi 75,44% sehingga capaian kinerjanya 188,60%. Jumlah Desa Siaga Aktif sampai tahun 2011 ditargetkan sebanyak 68 desa/kelurahan dan bisa terealisasi sebanyak 129 desa/kelurahan dari 171 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Pacitan. Capaian indikator kinerja Desa Siaga Aktif sudah melampaui target namun perlu terus dikembangkan dan dipertahankan keberlangsungannya. Pemberdayaan masyarakat dalam Desa Siaga perlu terus dipelihara dengan kerjasama Lintas Program Kesehatan maupun Lintas Sektor. Perlu komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk pengembangan Desa Siaga.

Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.

Untuk mengembangkan Desa Siaga minimal harus memenuhi 9 syarat yaitu :

- 1) Ada Forum Masyarakat Desa (FMD) = Peran aktif masyarakat dan ormas dalam meningkatkan kesejahteraan warga/perbaikan desanya.



- 2) Adanya pelayanan kesehatan dasar = Kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan seperti polindes, pustu, bidan, dokter/perawat/ bidan praktek swasta, klinik.
- 3) Adanya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) = Posyandu, Poskesdes, Kader Pemberdayaan masyarakat/kader kesehatan aktif, ambulans desa.
- 4) Adanya pengamatan kesehatan terus-menerus dilakukan masyarakat serta melaporkan kepada petugas kesehatan.
- 5) Ada pembinaan dari puskesmas yang mampu memberikan pelayanan kegawatdaruratan bagi ibu dan bayi.
- 6) Ada sistem siaga terhadap bencana oleh masyarakat seperti ancaman dan kejadian yang dapat membahayakan jiwa.
- 7) Ada pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat = Dukungan dana untuk kegiatan kesehatan di Desa seperti dana sehat, jimpitan, tabungan ibu bersalin.
- 8) Mempunyai lingkungan yang sehat, mencakup kebersihan, kenyamanan, kebutuhan dasar.
- 9) Masyarakat ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Ada 4 tahapan/tingkatan Desa Siaga yaitu :

- a. Desa Siaga BINA = memenuhi kriteria 1-3
- b. Desa Siaga TUMBUH = memenuhi kriteria 1-3 ditambah 2 kriteria lainnya (5 kriteria)
- c. Desa Siaga KEMBANG = memenuhi kriteria 1-3 ditambah 4 kriteria lainnya (7 kriteria)

d. Desa Siaga PARIPURNA = memenuhi seluruh kriteria (9 kriteria)

Indikator kinerja ini didukung kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

- **Pemasangan kontrasepsi KB (%)**

Jumlah pemasangan kontrasepsi yang di laksanakan pada tahun 2011 sebesar 103,02% di banding dengan target RPJMD 2011 sebesar 78,85% telah mencapai 130,65%. Apabila di banding dengan keadaan tahun 2010 mengalami peningkatan 24,2%

- **Akseptor KB (%)**

Prosentase jumlah Akseptor KB pada Tahun 2011 telah mencapai 103,02% atau mengalami peningkatan sebesar 24,2% di banding dengan keadaan Tahun 2010. Sedangkan bila di banding dengan Target RPJMD Th 2011 sebesar 78,85% telah mencapai 130,65%. Dengan demikian Target RPJMD Tahun 2011 untuk Akseptor KB telah dapat tercapai

- **Peserta KB aktif (%)**

Jumlah peserta KB Aktif di Kabupaten Pacitan pada Tahun 2011 sebesar 79,71% di banding dengan jumlah pasangan usia subur sebesar di banding dengan keadaan Th 2010 sebesar 76,25% mengalami peningkatan 3,46%. Apabila di banding dengan Target RPJMD Tahun 2011 sebesar 76,3% telah mencapai 104,46%

- **Kader bina ketahanan keluarga (%)**

Prosentase Kader Bina Ketahanan Keluarga yang terlatih pada tahun 2011

mencapai 22,60%. Hal ini mengalami penurunan sebesar 46,7%. Hal ini di sebabkan anggaran, untuk kegiatan pelatihan Kader mengalami penurunan sehingga cakupan kegiatan juga lebih rendah. Sedangkan bila di banding dengan target RPJMD tahun 2011 sebesar 70,2% baru mencapai 66,52%

**Tabel III.24.**  
**Capaian Kinerja Sasaran 8 :**  
**“Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Kesehatan”**

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJM (2010)	2011		KINERJA	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	% PERKEMB.
1 Rasio posyandu per satuan balita (‰)	21,53	21,53	21,61	100,37	0,08
2 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (‰)	0,37	0,37	0,38	102,70	0,01
<b>Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran</b>				<b>101,53</b>	

Sasaran 8 : “Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan”, dengan capaian indikator kinerja rata-rata pada tahun 2011 sebesar 101,53% termasuk kategori “*Sangat Baik*”, dan didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja sasaran.

Penjelasan terhadap capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- Target tahun 2011 sebesar 21,53% terealisasi 21,61%, sehingga capaian kinerjanya 100,39%. Jumlah posyandu se-Kabupaten Pacitan tahun 2011 sebanyak 799 posyandu, sedangkan jumlah balita adalah 36.967 jiwa. Rasio Posyandu sudah memenuhi target karena meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mendirikan posyandu serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan ibu dan anak, sehingga

jumlah Posyandu bertambah di lokasi yang belum ada. Harapannya agar masyarakat mudah menjangkau sarana pelayanan tersebut. Dari 799 Posyandu yang ada terbagi dalam 4 tingkatan yaitu 77 posyandu Pratama, 275 posyandu Madya, 417 posyandu Purnama dan 30 posyandu Mandiri. Tersedianya Posyandu sebagai UKBM harus terus dijaga dan dilestarikan dengan meningkatkan peran aktif kader dan penguatan kelembagaan posyandu. Posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare

- Indikator Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk dari target tahun 2011 sebesar 0,37 per 1000 penduduk terealisasi 0,38 per 1000 penduduk sehingga capaian kinerjanya 102,70%. Jumlah sarana kesehatan (puskesmas, puskesmas pembantu dan poliklinik) di Kabupaten Pacitan sampai tahun 2011 adalah 207 buah sedangkan jumlah penduduk 540.510 jiwa. Terdiri 24 puskesmas, 55 puskesmas pembantu, 128 poliklinik swasta. Dapat diketahui bahwa 1 sarana kesehatan mampu melayani 2.612 penduduk. Semakin bertambahnya jumlah poliklinik swasta di Kabupaten Pacitan menjadikan semakin banyak pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sekaligus tantangan bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

**Tabel III.25.**  
**Capaian Kinerja Sasaran 9 :**  
**“Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendidikan”**

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJM (2010)	2011		KINERJA	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	% PERKEMB.
1. Kondisi ruang kelas SD/MI baik	74,8	76,5	76,53	100,04	1,73
2. Kondisi ruang kelas SMP/MTs baik	89,66	90,55	91,7	101,27	2,04
3. Kondisi ruang kelas SMA/SMK/MA baik	80,59	82,99	86,71	104,48	6,12
<b>Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran</b>				<b>101,93</b>	

Sasaran 9 : “Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan”, dengan capaian indikator kinerja rata-rata pada tahun 2011 sebesar 101,93% termasuk kategori “*Baik*”, dan didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja sasaran.

Penjelasan terhadap capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- Indikator yang mendukung sasaran Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk dalam upaya mewujudkan tersedianya sarana dan prasaran pendidikan adalah kondisi ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs dalam kondisi baik. Pada tahun 2011 kondisi ruang kelas SD/MI dalam keadaan baik adalah 76.53% dan SMP adalah 91.7%. Capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2011. Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Pacitan telah berkomitmen untuk menuntaskan rusak berat bangunan sekolah pada tahun 2013, sehingga pada tahun 2011 sebagian anggaran APBD Kabupaten Pacitan dianggarkan untuk rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah. Dengan adanya rehabilitasi ruang kelas tersebut diharapkan kondisi ruang kelas menjadi lebih baik dan lebih layak untuk

proses belajar mengajar ( tidak membahayakan siswa dan guru). Kedepan Pemerintah Kabupaten Pacitan berkomitmen untuk menuntaskan rehabilitasi berat bangunan sekolah di Kabupaten Pacitan tahun 2013, sehingga diharapkan tahun 2013 semua ruang kelas dalam kondisi layak dipakai

- Sedangkan untuk indikator kondisi ruang kelas SMA/MA/SMK, pada tahun 2011 ini kondisi ruang kelas SMA/MA/SMK semakin menunjukkan peningkatan kelayakannya yaitu telah menunjukkan angka capaian 86.71%. Kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator ini adalah rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah untuk 2 lembaga SMA dan 4 lembaga SMK. Terkait dengan peningkatan akses pendidikan menengah Pemerintah Kabupaten Pacitan berkomitmen untuk menuntaskan rehab berat bangunan sekolah pada tahun 2013 sehingga diharapkan pada tahun 2013 sudah tidak ada ruang kelas di jenjang pendidikan menengah yang rusak berat (layak digunakan)

**Tabel III.26.**  
**Capaian Kinerja Sasaran 10 :**  
**“Penyelenggaraan Pendidikan Yang Terjangkau”**

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJM (2010)	2011		KINERJA	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	% PERKEMB.
1 Angka Melek Huruf	91,6	91,85	91,88	100,03	0,28
2 Jumlah perpustakaan	89	115	115	100,00	29,21
3 Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	18.482	21.550	21.550	100,00	16,60

4	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	15.317	17.543	17.560	100,10	14,64
5	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	71,91	71,93	72,6	100,93	0,69
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)					
6	APK PAUD	41,18	42,67	42,2	98,90	1,02
7	APK TK	40,13	41,79	41,79	100,00	1,66
	Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)					
8	APK SD/MI/Paket A	103,1	103,1	103,1	100,00	0,00
9	APK SMP/MTs/Paket B	97	97,17	97,8	100,65	0,80
10	APK SMA/SMK/MA/Paket C	67,15	67,74	70,55	104,15	3,40
	Angka Partisipasi Murni (APM) (%)					
11	APMSD/MI	98,87	98,89	98,89	100,00	0,02
12	APMSMP/MTs	81,58	82,14	82,5	100,44	0,92
13	APMSMA/SMK/MA/Paket C	53,05	54,21	54,5	100,53	1,45
	Angka Putus Sekolah (APS) (%)					
14	SD/MI	0	0	0	100,00	0,00
15	SMP/MTs	0,47	0,13	0,13	100,00	-0,34
16	SMA/SMK/MA	0,54	0,3	0,3	100,00	-0,24
	Angka Partisipasi Sekolah (%)					
17	Kelompok usia 7 – 12 tahun	99,99	99,99	99,99	100,00	0,00
18	Kelompok usia 13 – 15 tahun	88,25	88,54	88,55	100,01	0,30
19	Kelompok usia 16 – 18 tahun	67,31	67,59	68,5	101,35	1,19
	Angka melanjutkan (%)					
20	Dari SD/MI ke SMP/MTs	99,93	99,93	99,93	100,00	0,00
21	Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	69,21	70,7	73,25	103,61	4,04
<b>Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran</b>					<b>100,51</b>	

Sasaran 10 : "Penyelenggaraan Pendidikan Yang Terjangkau", dengan capaian indikator kinerja rata-rata pada tahun 2011 sebesar 100,51% termasuk kategori "Sangat Baik", dan didukung oleh 21 (dua puluh satu) indikator kinerja sasaran. Penjelasan terhadap capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau salah satu indikatornya adalah meningkatnya angka melek huruf, pada tahun 2011 angka melek huruf di kabupaten pacitan sebesar 91,88% dari target 91,85%. Menurut data dari dinas pendidikan kabupaten pacitan dari sejumlah 421.052 penduduk pacitan usia 15 tahun ke atas, 386.862 diantaranya sudah melek huruf dalam artian sudah dapat membaca dan menulis. Untuk meningkatkan angka melek huruf tersebut khususnya bagi penduduk yang tidak dapat dilayani melalui pendidikan formal, perlu didukung melalui jalur pendidikan non formal. Program pendidikan non formal pada tahun 2011 dilakukan melalui kegiatan kejar paket A, B, C dan penuntasan buta aksara. Jumlah garapan pada tahun 2011 adalah sebesar 181 warga belajar untuk kejar paket A, 1.473 warga belajar untuk kejar paket B, 1.969 warga belajar untuk kejar paket C dan 5.000 warga belajar program keaksaraan fungsional. Adapun operasional lembaga pendidikan non formal pada tahun ini cukup mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur melalui kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Tahun 2011 dan beberapa dana dekonsentrasi. Selain menyelenggarakan program Kejar Paket A, B, C dan Keaksaraan Fungsional Kabupaten Pacitan juga telah memiliki sarana untuk meningkatkan minat baca masyarakat yaitu melalui Rumah Pintar, Sanggar Kegiatan Belajar dan Taman Bacaan Masyarakat dengan segala sarana prasarana yang dimilikinya. Dengan adanya 3 sarana tersebut



diharapkan dapat memacu masyarakat Pacitan untuk meningkatkan budaya baca dan ketrampilan yang dimiliki yang pada akhirnya diharapkan dapat menekan angka buta huruf di Kabupaten Pacitan (angka melek huruf dapat meningkat).

- Jumlah perpustakaan dengan realisasi tahun 2011, mencapai 115 bila dibanding realisasi tahun 2010 ada perkembangan sebesar 26 atau 29,21% sedangkan capaian indikator kinerja tahun 2011 mencapai 100 % terhadap target RPJMD 2011, capaian atas tujuan masuk kategori " MEMUASKAN " disebabkan ada perkembangan sejumlah Perpustakaan Khusus SKPD Kab, Kecamatan +1 Perpustakaan Puskesmas Pringkuku + Taman Baca Masyarakat + Perpustakaan Desa dan Kelurahan dan didukung adanya bantuan buku perpustakaan Desa pada tahun 2011, sebanyak 4 lokasi ( 2 Desa dan 2 Kelurahan )
- Jumlah koleksi buku tersedia diperpustakaan, tahun 2011 realisasinya 21.550 eksemplar bila dibanding tahun 2010 dan perkembangan 3.068 eksemplar (16,90%) dari realisasi tahun 2010 sebesar 18.482 eksemplar, sedangkan dari target RPJMD 2011 realisasinya 100 % capaian indikator kinerja atas tujuan tersebut masuk kategori " MEMUASKAN " disebabkan ada penambahan koleksi bahan pustaka dan pengganti buku yang rusak maupun untuk melengkapi bahan koleksi atau permintaan pengunjung / pemustaka, harapan pemustaka setiap saat ada penambahan judul koleksi bahan pustaka yang *up to date*

- Jumlah pengunjung perpustakaan umum pada tahun 2011, realisasi mencapai 17.560 bila dibanding realisasi tahun 2010 mencapai 15.317, ada perkembangan 2.243 pengunjung atau 14,64%, sedangkan realisasi mencapai 100,09% terhadap target RPJMD 2011 sebesar 17.543, capaian indikator kinerja masuk kategori " MEMUASKAN " disebabkan peningkatan jadwal pelayanan buka tiap hari Senin sampai dengan Jum'at (pukul 07.00 – 15.00 WIB) hari Sabtu dan Minggu (pukul 07.30 – 13.00 WIB), mengadakan promosi *door to door* ke Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SLTA/MA sampai Universitas di Lingkup Kota Pacitan, mengadakan lomba-lomba untuk anak-anak PAUD/TK dan SD/MI kelas 1 dan kelas 2, sebagai tempat PKL Mahasiswa DII Perpustakaan serta bekerjasama dengan pihak ketiga mengadakan pameran buku
- Realisasi Capaian indikator indeks pembangunan manusia di kabupaten pacitan tahun 2011 sebesar 72,6. Meskipun angka ini merupakan angka sementara dari badan pusat statistik kabupaten pacitan tetapi capaian ini sudah meningkat sebesar 0,69 dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2010. Dan apabila dibanding dengan target RPJMD tahun 2011 angka 72,9 capaiannya sebesar 100,93.
- Pada Tahun 2011 target APK PAUD adalah 42,67%, APK TK 41,79 % dan realisasi APK PAUD tahun 2011 42,2%, APK TK 42% yang berarti untuk TK sudah mencapai target sedangkan untuk PAUD hampir mencapai target yang telah ditetapkan. Dari jumlah anak di kabupaten pacitan yang berusia 4 sampai dengan 6 tahun sejumlah 897, 377 diantaranya sudah

mengikuti pendidikan melalui Taman bermain/PAUD/TK/RA. Terbatasnya jumlah akses PAUD serta masih terbatasnya APBD yang diarahkan untuk program PAUD hal ini dikarenakan fokus pendidikan secara nasional mengakibatkan belum tercapainya target tersebut. Sebagian besar diarahkan pada penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun. Untuk tahun kedepan kita berupaya untuk meningkatkan APK PAUD dan APK TK dengan didukungnya lembaga PAUD yang didirikan yaitu sebanyak 365 lembaga yang terdiri dari 330 Kelompok Bermain, 10 lembaga Tempat Penitipan Anak dan 25 Satuan Pendidikan Sejenis (POS PAUD dan Taman Posyandu). Lembaga tersebut ada yang mendapat bantuan dari Bank Dunia (Word Bank) adalah sejumlah 120 lembaga dan ada yang murni didirikan oleh yayasan atau perorangan.

Capaian untuk Pendidikan Anak Usia Dini juga dapat dilihat dari capaian APK TK. Perkiraan APK TK tahun 2011 adalah 41,79%, dengan alasan bahwa pada Tahun 2011 diperkirakan peserta didik usia 2 s.d 4 tahun pada lembaga PAUD non formal, jumlahnya akan meningkat seiring dengan semakin bertambahnya jumlah lembaga PAUD non fomal, sehingga diharapkan ketika anak – anak tersebut memasuki usia 4 s.d 6 tahun dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu jenjang Pendidikan PAUD formal yaitu TK. Jumlah lembaga TK yang ada di Kabupaten Pacitan adalah sejumlah 296 lembaga yang tersebar di 12 kecamatan. Sehingga diperkirakan dari sejumlah penduduk usia TK dapat mengenyam pendidikan di jenjang tersebut.

Capaian kinerja untuk APK PAUD non formal dan APK TK sampai dengan akhir tahun 2011 diperkirakan dapat meningkat apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2010 karena didukung dengan selalu adanya sosialisasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan bekerja sama dengan Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Kementerian Agama tentang pentingnya penanganan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak usia 0-6 tahun yang merupakan periode emas dalam kehidupannya melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Sosialisasi tersebut diharapkan mendapat dukungan dan partisipasi masyarakat berupa pendirian secara swadaya mendirikan lembaga-lembaga PAUD Non Formal dan PAUD Formal sehingga peserta didik pada lembaga PAUD Non formal dan TK dapat semakin meningkat setiap tahunnya

- Capaian kinerja program ini dapat dilihat dari APK SD/MI/Paket A, APM SD/MI/Paket A, APK SMP/MTs/Paket B, APM SMP/MTs/Paket B. Pada realisasi tahun 2011 APK maupun APM Pendidikan Dasar telah mencapai target yang ditetapkan yaitu APK SD/MI/Paket A 103,10 %, APM SD/MI/Paket A 98,89 %, APK SMP/MTs/Paket B 97,8 %, APM SMP/MTs/Paket B 82,5%. Perkiraan ketercapaian target ini didukung dengan adanya tambahan 1 lembaga pada jenjang SD yaitu SD Alam, 2 lembaga SMP yaitu SMP Hasyim Ashari Kasihan dan SMP Islam Terpadu

Nadlatussuban. Selain itu pada tahun 2010 ini Kabupaten Pacitan menambah lembaga untuk SD SMP Satu Atap yaitu SMP N 5 Pacitan Satu Atap, SMPN 5 Sudimoro Satu Atap, SMPN 4 Arjosari Satu Atap, SMPN 3 Kebonagung Satu Atap, SMPN 4 Tegalombo Satu Atap. Dengan penambahan lembaga tersebut akan meningkatkan jumlah peserta didik sehingga penduduk usia sekolah (7 s/d 15 tahun) dapat mengenyam pendidikan dasar. Peningkatan jumlah siswa secara langsung akan mengakibatkan APK dan APM Pendidikan Dasar meningkat.

Apabila dilihat dari angka partisipasi pendidikan dasar cukup tinggi bila dibandingkan dengan APK pendidikan dasar tahun-tahun sebelumnya menunjukkan program penuntasan wajar dikdas 9 tahun telah berjalan secara efektif (mencapai tingkatan tuntas paripurna) sehingga pada tahun depan program ini dilanjutkan dengan pemantapan program wajar dikdas yang bermutu dan dapat menjangkau semua penduduk usia sekolah (umur 7 sampai dengan 15 tahun).

Keberhasilan program ini didukung dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap program penuntasan wajar Dikdas 9 tahun yang secara tidak langsung menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya

Sedangkan Capaian kinerja indikator APK dan APM SMA/MA/SMK/Kejar Paket C. Target APK SMA/MA/SMK/Kejar Paket C adalah 67,74% dan APM SMA/MA/SMK/Kejar Paket C adalah 54,21%.

Realisasi tahun 2011 APK maupun APM Pendidikan Menengah telah mencapai target yang ditetapkan yaitu APK SMA/MA/SMK/Kejar Paket C sebesar 70,55 % dan APM SMA/MA/SMK/Kejar Paket C adalah sebesar 54,5%. Ketercapaian target tahun 2011 ini didukung dengan adanya peningkatan daya tampung peserta didik sehingga penduduk usia sekolah (16 s.d 18 tahun) dapat mengenyam pendidikan menengah. Peningkatan daya tampung secara langsung akan mengakibatkan APK dan APM Pendidikan Menengah meningkat. Pada tahun 2010 lembaga yang semakin berkembang adalah lembaga SMK.

Minat peserta didik lulusan SMP/MTs semakin besar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi terutama SMK, karena peserta didik selain diberikan wawasan pendidikan umum seperti di SMA, di SMK juga dibekali dengan program keahlian khusus yang nantinya akan bermanfaat sebagai bekal hidup di dunia kerja sehingga lulusan SMK langsung kerja di dunia usaha/wiraswasta.

Dengan adanya penambahan lembaga pada jenjang pendidikan menengah (lokasi SMA, MA, dan SMK yang hampir tersebar di seluruh kecamatan) dan adanya bantuan khusus siswa miskin baik bersumber dari dana APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten diharapkan angka melanjutkan ke jenjang SMA/MA/SMK akan mencapai 70,9%. Peningkatan APK dan APM Pendidikan Menengah serta angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK dikarenakan adanya sosialisasi tentang Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah yang mendapat respon

positif dari masyarakat yang telah menyadari pentingnya pendidikan lanjutan (Pendidikan Menengah) setelah pendidikan dasar bagi masa depan anak mereka

- Pada akhir tahun 2011 pencapaian indikator angka putus sekolah untuk jenjang SD adalah 0 % sedangkan di jenjang SMP/MTs ada penurunan angka putus sekolah mencapai 0,13 %. Penurunan ini didukung dengan adanya program Bantuan Operasional Sekolah (Rp. 397.000,00 / siswa/ tahun untuk SD/SDLB, Rp. 570.000,00/ siswa / tahun untuk SMP/SMPLB/SMPT), bantuan Gerakan Orang Tua Asuh, Beasiswa Siswa Miskin SD (Rp.360.000,00/ siswa / tahun) dan Beasiswa siswa miskin SMP (Rp. 550.000/ siswa/ tahun). Dengan adanya bantuan tersebut terbukti dapat meringankan beban orang tua dalam membiayai anak untuk sekolah di tingkat pendidikan dasar, sehingga pembiayaan di tingkat pendidikan dasar menjadi lebih terjangkau terutama bagi siswa dari keluarga miskin. Adapun masih adanya siswa yang putus sekolah dikarenakan masih adanya siswa yang kurang memahami arti pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka. Oleh karena itu Dinas Pendidikan selaku penanggung jawab urusan pendidikan di Kabupaten Pacitan selalu menekankan kepada setiap kepala sekolah untuk memberikan perhatian yang ekstra kepada siswa yang putus sekolah dan memberikan pengarahan kepada semua siswa dan wali murid siswa tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan “Home Visit” yaitu dengan

mendatangi rumah siswa yang terindikasi putus sekolah, melakukan pendampingan baik itu kepada siswa maupun orang tua siswa sehingga siswa menjadi tidak putus sekolah. Upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pelajaran yang lebih mengarah pada ketrampilan hidup siswa seperti pelajaran kecakapan hidup melalui pelajaran Muatan Lokal sehingga siswa menjadi lebih termotivasi meneruskan pendidikannya. Langkah awal yang telah diambil Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan adalah melakukan pelatihan kecakapan hidup bagi anak sekolah yaitu pelatihan pembuatan kerajinan tangan dari limbah kayu seperti pembuatan souvenir. Ini dilakukan dengan harapan siswa dapat membuat souvenir sendiri yang nantinya bisa dijual untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan dapat menekan angka putus sekolah di Kabupaten Pacitan.

Sedangkan untuk indikator angka putus sekolah untuk jenjang SMA/MA/SMK mengalami penurunan yaitu mencapai 0,3 %. Perkiraan capaian ini didukung dengan adanya program Bantuan Khusus Murid Miskin, Bantuan Operasional Sekolah untuk sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Bantuan Khusus Siswa Miskin (Rp. 65.000,00 / siswa / bulan) untuk SMA dan SMK yang bersumber dari dana APBN, APBDI dan APBD II yang bertujuan untuk memberikan bantuan biaya kebutuhan mendasar dan pokok bagi siswa dari keluarga miskin dalam bentuk uang yang diberikan kepada lembaga. membantu meringankan beban orang tua dalam membiayai anak untuk sekolah di tingkat pendidikan menengah



- Pada indikator angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs. Pada tahun 2011, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs telah mencapai target yang ditentukan yaitu 99,93%. Dari jumlah murid lulusan SD/MI tahun 2011 sejumlah 8.632 sudah sekitar 8.626 murid yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs. Hal ini menunjukkan hampir semua siswa SD yang lulus telah melanjutkan kembali pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMP dan secara tidak langsung menunjukkan penuntasan wajib belajar 9 tahun telah berjalan dengan baik.

Sedangkan untuk angka melanjutkan siswa SMP/MTs ke SMA/MA/SMK yang telah mencapai angka capaian 73.25%. dari jumlah murid lulusan SMP/MTs tahun 2011 sejumlah 8.060, hanya sekitar 5.904 orang yang melanjutkan ke jenjang SMA/MA/SMK. Akan tetapi pada tahun ini minat peserta didik lulusan SMP/MTs untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi terutama SMK semakin meningkat dibanding dengan tahun 2010, karena peserta didik selain diberikan wawasan pendidikan umum seperti di SMA, di SMK juga dibekali dengan program keahlian khusus yang nantinya akan bermanfaat sebagai bekal hidup di dunia kerja sehingga lulusan SMK langsung bisa bekerja di dunia usaha/wiraswasta. Selain itu peningkatan angka melanjutkan juga didukung dengan adanya Program Bantuan Khusus Siswa Miskin di tingkat pendidikan menengah yang ternyata terbukti dapat meningkatkan minat masyarakat miskin untuk tetap menyekolahkan anaknya di jenjang pendidikan menengah (biaya sekolah relatif lebih terjangkau)

**Tabel III.27.**  
**Capaian Kinerja Sasaran 11 :**  
**“Meningkatnya Pelayanan Pendidikan”**

INDIKATOR KINERJA		KONDISI AWAL RPJM (2010)	2011		KINERJA	
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	% % PERKEMB.
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	6,6	6,66	6,9	103,60	4,55
	Rasio guru / murid					
2	SD	1:20	1:20	1:09	86,25	
3	MI	1:15	1:15	1:06	88,00	
4	SMP	1:20	1:20	1:14	92,50	
5	MTs	1:15	1:15	1:07	89,33	
6	SMA	1:20	1:20	1:13	91,25	
7	SMK	1:15	1:15	1:12	96,00	
8	MA	1:15	1:15	1:06	88,00	
	Nilai rata-rata ujian nasional					
9	SD/MI	6,79	6,81	7,73	113,51	13,84
10	SMP/MTs	7,18	7,2	7,43	103,19	3,48
11	SMA/SMK/MA	6,93	6,96	7,74	111,21	11,69
	Angka kelulusan					
12	SD/MI	100	100	100	100,00	0,00
13	SMP/MTs	99,87	99,88	99,85	99,97	-0,02
14	SMA/SMK/MA	97,64	97,65	99,79	102,19	2,20
	Guru yang memenuhi kualifikasi akademik (%)					
15	SD/MI	69,4	70,36	78,31	111,30	8,91
16	SMP/MTs	91,89	92,5	94,89	102,58	3,00
17	SMA/SMK/MA	97,58	97,83	98,48	100,66	0,90
	Guru yang bersertifikasi pendidik (%)					
18	SD/MI	46,13	51,78	58,61	113,19	12,48

19	SMP/MTs	38,36	46,97	52,13	110,99	13,77
20	SMA/SMK/MA	61,63	66,36	62,31	93,90	0,68
Sekolah yang memiliki akreditasi minimal B (%)						
21	SD	49,29	50,47	60,33	119,54	11,04
22	SMP	81,82	83,33	85,07	102,09	3,25
23	SMA	90	91	100	109,89	10,00
24	SMK	50,7	52,25	52,94	101,32	2,24
Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran					101,27	

Sasaran 11 : " Meningkatkan Pelayanan Pendidikan", dengan capaian indikator kinerja rata-rata pada tahun 2011 sebesar 101,27% termasuk kategori "*Baik*", dan didukung oleh 14 (empat belas) indikator kinerja sasaran.

Penjelasan terhadap capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2011 mencapai 6,9 tahun dari target sebesar 6,66 tahun. Capaian ini meningkat 4,55% dibanding dengan capaian tahun 2010 sebesar 6,6 tahun. Peningkatan angka rata-rata lama sekolah ini dipengaruhi oleh diterapkannya program wajib belajar 12 tahun yang mulai efektif dilaksanakan pada tahun 2011.
- Pada tahun 2011, rasio Guru dan siswa untuk tingkat SD adalah 1:09, tingkat MI 1:06, tingkat SMP 1:14, dan tingkat MTs 1:07, yang menunjukkan bahwa rasio antara guru dan murid baik itu di tingkat SD/MI maupun SMP/MTs relatif sudah cukup. Hanya saja letak permasalahannya adalah pada distribusi guru yang kurang merata dan masih adanya guru tidak tetap yang setiap tahun jumlahnya selalu bertambah. Untuk itu Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan berupaya

untuk melakukan redistribusi guru dan menghimbau kepada masing-masing Kepala Sekolah untuk lebih menertibkan penerimaan Guru Tidak Tetap yang ada di sekolah. Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan rasio guru dan murid SD dan SMP menjadi lebih optimal dan mendekati Standar Nasional Pendidikan yaitu 1: 20.

Sedangkan untuk rasio Guru dan siswa untuk tingkat SMA adalah 1:11, tingkat MA 1:6, dan tingkat SMK 1:7, yang menunjukkan bahwa rasio antara guru dan murid baik itu di tingkat SMA/MA/SMK relatif sudah cukup. Hanya saja letak permasalahannya adalah pada distribusi guru yang kurang merata dan masih adanya guru tidak tetap yang setiap tahun jumlahnya selalu bertambah. Untuk itu Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan berupaya untuk melakukan redistribusi guru dan menghimbau kepada masing-masing kepala sekolah untuk lebih menertibkan penerimaan Guru Tidak Tetap yang ada di sekolah

- indikator angka kelulusan dan rata-rata nilai ujian nasional. Angka kelulusan di jenjang SD/MI tahun 2011 telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100% dengan rata-rata nilai ujian nasional SD/MI sebesar 7,61. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs capaian angka kelulusan tahun 2011 yaitu 99,85% hampir memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 99,88. Sedangkan untuk nilai rata-rata ujian SMP/MTs yaitu 7,43 telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 7,2. untuk jenjang SMP/MTs. Angka kelulusan ujian nasional pada tahun 2011 cukup memuaskan dikarenakan kriteria kelulusan tahun ini ditentukan oleh satuan pendidikan

- berdasarkan rapat Dewan Guru dengan mempertimbangkan perolehan nilai sekolah/madrasah (yang dihitung dari nilai raport dan nilai ujian sekolah) dan nilai ujian nasional. Meskipun demikian masih ada siswa yang tidak lulus dikarenakan rendahnya rata-rata nilai akhir yaitu minimal 5.5 dan masih ada nilai di bawah 4. Bagi siswa yang tidak lulus dapat mengikuti ujian nasional Kejar Paket B. Dengan adanya Kejar Paket B diharapkan angka kelulusan jenjang pendidikan dasar dapat meningkat. Adapun untuk indikator rata-rata ujian, rata-rata ujian SMP/MTs masih harus membutuhkan kerja keras dari semua pihak terutama tenaga pendidik, siswa dan wali murid siswa itu sendiri. Oleh karena itu kedepan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan nilai rata-rata ujian nasional dengan lebih memantapkan latihan soal-soal ujian nasional secara serentak di semua sekolah di Kabupaten Pacitan dan dilanjutkan dengan latihan-latihan soal yang dilakukan oleh masing-masing sekolah dengan frekuensi yang lebih dari satu kali. Selain itu Dinas Pendidikan juga akan melakukan sosialisasi ujian nasional kepada masyarakat baik melalui media massa maupun media elektronik dengan tujuan mengajak semua pihak yang terlibat baik secara langsung yaitu siswa dan guru maupun tidak langsung yaitu orang tua siswa untuk berperan aktif mensukseskan ujian nasional sehingga kenaikan angka kelulusan dan rata-rata nilai ujian nasional dapat tercapai
- Target angka kelulusan SMA/MA/SMK adalah 97,65% dan nilai rata-rata ujian adalah 6,96%. Realisasi angka kelulusan di jenjang SMA/MA/SMK

pada tahun 2011 yaitu 99,85% dengan nilai rata-rata ujian 7,74. Angka kelulusan ujian pada tahun 2011 cukup memuaskan dikarenakan kriteria kelulusan tahun ini ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan rapat Dewan Guru dengan mempertimbangkan perolehan nilai sekolah/madrasah (yang dihitung dari nilai raport dan nilai ujian sekolah) dan nilai ujian nasional. Meskipun demikian masih ada siswa yang tidak lulus dikarenakan rendahnya rata-rata nilai akhir yaitu minimal 5.5 dan masih ada nilai di bawah 4. Bagi siswa yang tidak lulus dapat mengikuti ujian nasional Kejar Paket C. Dengan adanya Kejar Paket C diharapkan angka kelulusan jenjang pendidikan menengah dapat meningkat. Adapun untuk indikator rata-rata nilai ujian, rata-rata nilai ujian SMA/MA/SMK sudah menunjukkan peningkatan bila dibandingkan tahun 2010. Hal ini menunjukkan keberhasilan latihan soal-soal ujian nasional yang dilaksanakan secara serentak di semua sekolah di Kabupaten Pacitan dan dilanjutkan dengan latihan-latihan soal yang dilakukan oleh masing-masing sekolah dengan frekuensi yang lebih dari satu kali. Untuk lebih meningkatkan ketercapaian angka lulusan dan nilai rata-rata ujian nasional Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan berusaha melakukan sosialisasi ujian nasional kepada masyarakat baik melalui media massa maupun media elektronik dengan tujuan mengajak semua pihak yang terlibat baik secara langsung yaitu siswa dan guru maupun tidak langsung yaitu orang tua siswa untuk berperan aktif mensukseskan ujian nasional

- Guru yang memenuhi kualifikasi akademik pada tahun 2011 untuk jenjang SD/MI ditargetkan 70,36%, SMP/MTs 92,5%, dan SMA/MA/SMK 97,83%. Realisasinya sudah melampaui target yang ditetapkan yaitu untuk jenjang SD/MI adalah 78.31%, SMP/MTs 94.89, dan SMA/MA/SMK adalah 98,49%. Indikator lain dalam program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan adalah guru yang bersertifikasi pendidik. Realisasi untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs sudah mencapai target dengan angka 58.61% dan 52,13%, sedangkan untuk jenjang SMA/MA/SMK hampir memenuhi target dengan angka 62,31%. Dengan peningkatan kualifikasi guru dan jumlah guru yang telah bersertifikasi diharapkan dapat meningkatkan mutu peserta didik yaitu hasil belajar peserta didik meningkat, disiplin peserta didik meningkat dan hubungan antar guru, orang tua dan masyarakat menjadi lebih baik.

Pada tahun 2011 prosentase sekolah yang berakreditasi B adalah 60.33% untuk SD/MI, dan 85.07% untuk SMP/MTs. Capaian tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 50.47% untuk SD dan 83.33% untuk SMP. Keberhasilan ini didukung dengan adanya sosialisasi penilaian akreditasi oleh Tim Asesor Akreditasi Kabupaten Pacitan dan pembinaan terhadap lembaga yang telah berakreditasi C maupun lembaga yang belum berakreditasi. Dengan adanya pembinaan terhadap semua komponen akreditasi yang mencakup 8 komponen dalam Standar Nasional Pendidikan diharapkan sebagian besar lembaga di jenjang pendidikan dasar memiliki akreditasi minimal B sehingga ke depannya

diharapkan dapat memenuhi salah satu syarat menjadi Sekolah Berstandar Nasional.

- Pada tahun 2011 prosentase sekolah yang berakreditasi B adalah 100% untuk SMA, 52.94 untuk SMK. Keberhasilan ini didukung dengan adanya sosialisasi penilaian akreditasi oleh Tim Asesor Akreditasi Kabupaten Pacitan dan pembinaan terhadap lembaga yang telah berakreditasi C maupun lembaga yang belum berakreditasi. Dengan adanya pembinaan terhadap semua komponen akreditasi yang mencakup 8 komponen dalam Standar Nasional Pendidikan diharapkan sebagian besar lembaga di jenjang pendidikan dasar memiliki akreditasi minimal B sehingga ke depannya diharapkan dapat memenuhi salah satu syarat menjadi Sekolah Berstandar Nasional

**Tabel III.28.**  
**Capaian Kinerja Sasaran 12 :**  
**“Terwujudnya Pusat Ekonomi Unggulan Daerah”**

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJM (2010)	2011		KINERJA	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	% PERKEMB.
1. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHK	585.588,37	595.179,46	633.032,78	106,36	0,08
2. Kontribusi sektor pertanian (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB ADHK (Jutaan Rupiah)	369.413,22	376.094,99	376.216,40	100,03	0,02
3. Kontribusi Produksi Perternakan terhadap PDRB ADHK	77.987,24	81.601,02	78.820,83	96,59	0,01



4.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	291,5	158,76	826,49	520,59	1,84
5.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	70.170,70	74.026,48	72.194,95	97,53	0,03
6.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,05	0,05	0,05	100,00	0,00
7.	Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB ADHK	171.397	184.864	207.326,85	112,15	0,21
8.	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHK (jutaan rupiah)	55.799	62.953	57.562,18	91,44	0,03
9.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman perkebunan rakyat) terhadap PDRB ADHK	106.567,35	104.938,28	118.117	112,56	0,11
10.	Buku "PDRB Kabupaten"	ada	ada	Ada	100,00	0,00
11.	Pertumbuhan PDRB ADHK (Milyar)	1.519,93	1.524	1648,83	108,19	0,08
12.	Pertumbuhan PDRB ADHB (Milyar)	3.143,40	3.161	3738,46	118,27	0,19
13.	Pertumbuhan ekonomi	6,52	6,56	6,64	101,22	0,12
14.	Laju inflasi	5	4,99	4,34	86,97	(0,66)
15.	PDRB per kapita (ribu)	5.614	5.644	6893,14	122,13	0,23
16.	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	ada	ada	ada	100,00	0,00
17.	Pertumbuhan Industri (%)	1,51	1,93	1,99	103,11	0,48
18.	Nilai Tukar Petani	107,15	107,5	116,71	108,57	0,09
19.	Produktivitas total daerah (juta)	1.427.167	1.434.303	1.648.803,97	114,96	15,53
20.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	6	10	12	120,00	1,00
21.	Jumlah cluster ekonomi	1	1	1	100,00	0,00

unggulan produktif					
22. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	11	12	13	108,33	0,18
23. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Milyar)	600	660	618	93,64	0,03
24. Rasio daya serap tenaga kerja	186,36	208,3	252,5	121,22	0,35
25. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	0,06	0,07	0,04	57,14	(0,33)
26. Teknologi Tepat Guna (TTG) diterapkan (%)	1,75	2,92	1,2	41,10	(0,55)
<b>Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran</b>				<b>117,00</b>	

Sasaran 12 : "Terwujudnya Pusat Ekonomi Unggulan Daerah", dengan capaian indikator kinerja rata-rata pada tahun 2011 sebesar 117,00% termasuk kategori "*Sangat Baik*", dan didukung oleh 26 (dua puluh enam) indikator kinerja sasaran.

Penjelasan terhadap capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- Laju pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan dengan indikator Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Perkembangan PDRB ADHK sebanding dengan faktor produksi, sedangkan faktor harga tidak berpengaruh. Semakin tinggi produksi maka PDRB ADHK akan semakin meningkat. Pada capaian realisasi indikator PDRB sektor pada tahun 2011 yang terdiri dari beberapa sektor menurut angka penghitungan sementara dari BPS Kabupaten Pacitan tahun 2011 ada beberapa sektor yang mengalami peningkatan dan terdapat beberapa sektor yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Sektor yang

capaiannya  $\geq 100\%$  antara lain:

- a. kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHK (jutaan rupiah) pada tahun 2011 mencapai 106,36. Realisasi kontribusi sektor pertanian berkisar pada angka 633.032,78 Rupiah.
- b. kontribusi sektor pertanian (tanaman bahan makanan) terhadap ADHK mencapai 376.216,40. Capaian ini meningkat 1,84% dibanding kondisi awal tahun 2010.
- c. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dapat terealisasi 100%, atau sebesar 0,05%, kondisi ini sama dengan capaian pada tahun 2010. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menyumbang angka Rp. 1.937.184.100,-
- d. Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB ADHK (jutaan rupiah) dari target sebesar 184.864 juta rupiah, terealisasi 207,326,85. Capaian ini meningkat sebesar 0,21% dibanding tahun 2010

Sedangkan sektor yang realisasinya dibawah 100% antara lain:

- a. Capaian realisasi kontribusi produksi perternakan terhadap PDRB ADHK (jutaan rupiah) pada tahun 2011 dari target Rp. 81.601,02 baru mencapai sebesar Rp. 78.820,83 (95,59%)
- b. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB pada tahun 2011 sebesar 826,49 juta rupiah,
- c. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB dari target sebesar 74.026,48 juta rupiah terealisasi sebesar 72.194,95 (97,53%).
- d. Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHK (jutaan

rupiah) tahun 2011 sebesar Rp. 57.562,18. Atau meningkat sebesar 0,03% dibanding dengan tahun 2010.

- Pertumbuhan PDRB ADHK (milyar) pada tahun 2011 mencapai 1.648,83. Atau mengalami peningkatan sebesar 8,48% dibanding dengan kondisi awal tahun 2010. Begitu pula halnya dengan pertumbuhan PDRB ADHB (milyar), pada tahun 2011 mengalami peningkatan 18,93% dibanding tahun 2010. Realisasi capaian indikator ini sebesar 3.738,46.
- Pertumbuhan ekonomi merupakan besarnya tingkat kenaikan nilai PDRB ADHK. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 yaitu pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,64% sedangkan tahun 2010 mencapai 6,52 %. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan perekonomian seiring dengan meningkatnya stabilitas ekonomi dan peran masing-masing sektor dalam pertumbuhan ekonomi
- Meningkatnya stabilitas ekonomi juga memengaruhi terhadap penurunan laju inflasi, pada tahun 2011 laju inflasi di kabupaten pacitan sebesar 4,34%, laju inflasi turun sebesar 0,66% dibanding dengan tahun 2010 yaitu sebesar 5%.
- Kondisi PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku pada tahun 2011 sebesar Rp. 3.736.670,61 atau naik sebesar Rp. 386.460,50 dibanding tahun 2010, sedangkan apabila berdasarkan harga konstan, PDRB Kabupaten Pacitan tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp. 100.581,20 dari Rp. 1.548.222,77 pada tahun 2010

- Jumlah dan macam pajak dan retribusi yang dipungut pada tahun 2011 sejumlah 12 jenis yang terdiri dari 10 jenis pajak dan 2 jenis retribusi, antara lain:
  1. Pajak Hotel
  2. Pajak Restoran
  3. Pajak Hiburan
  4. Pajak reklame
  5. Pajak Penerangan Jalan
  6. Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan
  7. Pajak Parkir
  8. Pajak Air bawah tanah
  9. Pajak sarang burung walet
  10. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
  11. Retribusi jasa umum dan jasa usaha
  12. Retribusi Perizinan tertentu

Jenis Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C pada tahun 2011 tidak ditargetkan karena pemerintah kabupaten tidak lagi diperkenankan memungut pajak dari pengambilan bahan galian golongan C.

Menurunnya pendapatan dari sektor pajak pada tahun 2011 menurut data dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan tahun 2011 dari target sebesar Rp. 6.012.320.379,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 6.006.625.272,00 atau tercapai 99,91% dari target. Tidak tercapainya target pendapatan dari sektor pajak ini disebabkan karena

hasil pemungutan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan tidak mencapai target yang ditetapkan, sedangkan untuk jenis pajak lainnya realisasinya sudah lebih dari 100%. Sedangkan untuk pendapatan dari sektor retribusi daerah yang dipungut dari target sebesar Rp. 10.848.805.340,00 dapat terealisasi Rp. 11.626.055.797,77 dengan capaian sebesar 107,16%

- Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif di kabupaten pacitan pada tahun 2011 sebanyak 1 unit cluster yaitu industri pengolahan batu mulia yang dibina oleh UPTD Batu Mulia
- Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) sampai tahun 2011 terdapat 13 unit. Apabila dibanding dengan tahun 2010 mengalami penambahan sebanyak 2 unit, jumlah perusahaan yang melakukan investasi tahun 2011 terealisasi sebanyak 2 unit yaitu : 1 unit Penanam Modal Asing / PMA (PT Fehu Bali) dan 1 unit Penanam Modal Dalam Negeri / PMDN (PT. Linggarjati Mahardika Mulia). Dari sisi penyerapan tenaga kerja direncanakan akan menampung sekitar 500 orang dengan rasio penyerapan 252,5 yang bergerak dibidang perhotelan (pariwisata) dan pengolahan kayu.

Tidak terpenuhinya target nilai realisasi PMDN pada tahun 2011 disebabkan nilai investasi 2 perusahaan tersebut tergolong kecil yaitu sebesar Rp.18.000.000.000,00. Atau hanya meningkat sebesar 0,04 dibanding dengan nilai investasi tahun 2010. Namun dengan upaya pembinaan intensif selanjutnya diharapkan akan menghasilkan nilai investasi yang meningkat.

Target tahun 2011 sebesar 2,92% terealisasi 1,20%. Target tahun 2010 1,75% terealisasi 1,75% kegiatan ini dipengaruhi pada tahun 2011 mengalami penurunan capaian – 0,55%. Hal ini dipengaruhi minimnya kegiatan yang mendukung penerapan TTG (2 kegiatan dari 171 TTG yang diterapkan).

**Tabel III.29.**  
**Capaian Kinerja Sasaran 13 :**  
**“Ketersediaan Pangan Daerah”**

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJM (2010)	2011		KINERJA	% PERKEMB.
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Ketersediaan energi dan protein perkapita (%)	115	116	115,5	99,57	0,50
2. Penguatan cadangan pangan (%)	20	20	15	75,00	(5,00)
3. Ketersediaan pangan utama (ton)	96.710	97.677	87.199	89,27	(0,10)
4. Regulasi ketahanan pangan	ada (8)	ada (8)	ada (9)	100,00	0,13
5. Produktivitas padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per hektar (%)	4,92	5,18	5,01	96,72	0,09
6. Produksi perikanan (Ton)	5.264.397	5.626.449	6.244.073	110,98	0,19
7. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (%)	48,77	55,56	62,04	111,66	13,27
8. Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	92,25	92,3	95,2	103,14	2,95
9. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	84	87,2	83,8	96,10	(0,20)
10. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	635.490	636.075	635.970	99,98	0,00
11. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	1.237.869,74	1.244.059,08		0,00	(1,00)

12.	Konsumsi ikan (Kg)	10,81	11,35	11,54	101,67	0,07
13.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	60	64	90,24	141,00	30,24
<b>Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran</b>					<b>94,24</b>	

Sasaran 13 : “Ketersediaan Pangan Daerah”, dengan capaian indikator kinerja rata-rata pada tahun 2011 sebesar 94,24% termasuk kategori “*Baik*”, dan didukung oleh 13 (tiga belas) indikator kinerja sasaran.

Penjelasan terhadap capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- Rata-rata kuantitas ketersediaan pangan per kapita per hari untuk energi mencapai 2.299 KKal/Kap/hari terdiri dari energi yang bersumber dari nabati 2.256 KKal/kap/hari dan hewani 43 KKal/kap/hari. Sedangkan ketersediaan protein sebesar 57 KKal/kap/hari terdiri dari protein yang bersumber dari nabati 52 KKal/kap/hari dan hewani 5 Kkal/kap/hari. Ketersediaan energi telah melebihi angka rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) VIII tahun 2004 sebesar 2.200 KKal/kap/hari, sedangkan ketersediaan protein telah sesuai tetapi masih didominasi oleh bahan nabati. Dibandingkan tahun 2010 terjadi penurunan ketersediaan energi dan protein sebesar 11,3%
- Cadangan pangan pemerintah di tingkat kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras. Pada tahun 2011, kantor Ketahanan Pangan memperoleh bantuan dari APBD Provinsi untuk memperkuat lembaga cadangan pangan tingkat desa (lumbung desa) di 3 desa yaitu hibah untuk kelompok Berkah Jaya desa Sempu (Rp. 20 juta), kelompok Istu Mandiri



desa Pucangombo (Rp. 20 juta) dan kelompok Padas Subur desa Donorojo dengan kredit lunak dari melalui Bank Jatim sebesar Rp. 25 juta, sehingga terdapat sekitar 15 ton gabah atau 15% dari target 100 ton. Dibanding tahun 2010 terjadi penurunan sebesar 25% karena terjadi kenaikan harga jual gabah dari Rp. 2500,- menjadi Rp. 4.500,- sehingga berpengaruh terhadap daya beli kelompok. Untuk memperkuat cadangan pangan maka perlu dilakukan pemberdayaan lembaga cadangan pangan di tingkat masyarakat seperti lumbung pangan desa. Saat ini terdapat 56 lumbung pangan yang dibina Kantor Ketahanan Pangan

- Komoditas beras masih menjadi komoditas strategis dan pangan utama bagi sebagian besar penduduk di Pacitan. Target ketersediaan beras adalah 97.677 ton, capaian pada tahun ini adalah 87.199 ton atau 89,27% belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena turunnya produktivitas yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, serangan hama OPT, banjir dan kekeringan. Sedangkan stok beras di Bulog hingga akhir Desember sebesar 1.646 ton beras. Dibandingkan tahun 2010 terjadi penurunan ketersediaan beras sebesar 9,8%.
- Terdapat 17 regulasi tentang ketahanan pangan yang berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Pertanian, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Surat Edaran Bupati serta Kesepakatan Bersama. Dalam upaya pemantapan ketahanan pangan dilakukan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan tingkat kabupaten untuk menghasilkan rekomendasi atau kebijakan di bidang pangan

- Produktivitas padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per hektar pada tahun 2011 dari target 5,18 dapat terealisasi 5,01 sehingga capaian indikatornya sebesar 96,72%. Jumlah produktivitas padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per hektar sebesar 1.702,6 ton dari luas areal lahan yang ditanami seluas 33,966 hektar. Tidak tercapainya target pada indikator ini disebabkan oleh faktor alam antara lain curaj hujan yang tidak merata juga disebabkan karena banjir yang melanda areal persawahan di tahun 2011.
- Produksi perikanan laut pada tahun 2011 ditargetkan sebesar 4.832.551 kg. Pencapaian sampai dengan akhir tahun 2011 sebesar kg 6.224.073 atau 112,19%. Indikator Peningkatan produksi perikanan laut dicapai dengan adanya pembangunan berbagai fasilitas laut dan fungsional darat di tempat-tempat pendaratan ikan di 7 kecamatan pesisir. Peningkatan produksi dicapai juga disebabkan oleh dilaksanakannya berbagai pembinaan kepada kelompok nelayan, baik pembinaan teknis penangkapan maupun kelembagaan. Untuk menunjang program minapolitan, mulai tahun 2011 diprogramkan kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan produksi perikanan laut. antara lain penambahan armada, alat tangkap, pembangunan berbagai fasilitas darat baik yang pokok maupun fungsional
- Informasi pasokan, harga dan data pangan diperoleh dari 7 jenis komoditas yaitu beras, jagung pipilan, gula pasir, kedelai, minyak goreng, telur ayam ras dan tepung terigu yang dipantau setiap minggu. Komoditas

tersebut dipantau di 9 lokasi kecamatan yaitu Pacitan, Punung, Donorojo, Kebonagung, Tulakan, Ngadirojo, Tegalombo, Bandar dan Nawangan. Pada tahun 2011 informasi yang dapat disajikan mencapai 62,04% telah melampaui target 55,56%. Masih terdapat 3 kecamatan dan 3 komoditas yang belum dipantau. Kecamatan tersebut adalah Pringkuku, Arjosari dan Sudimoro sedangkan komoditas tersebut adalah daging sapi, daging ayam dan cabe merah. Capaian tersebut telah melampaui target. Dibandingkan tahun 2010 kemampuan menyediakan informasi atas pasokan, harga dan akses pangan di tahun 2011 ini meningkat sebesar 27,2%

Stabilitas harga dan pasokan pangan dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25% dari kondisi normal. Rata-rata harga di tahun 2011 cukup stabil dengan keragaman sebesar 11,5%. Pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5%-40%. Rata-rata pasokan pangan tidak stabil dengan keragaman mencapai 29%. Hal ini disebabkan oleh tidak stabilnya pasokan jagung pipilan di beberapa wilayah kecamatan yang menyebabkan rendahnya nilai kestabilan pasokan. Sehingga nilai rata-rata kestabilan harga dan pasokan pangan cukup rendah yaitu 31, 29% dan tidak mencapai target 92,3%. Dibandingkan tahun 2010 terjadi penurunan kestabilan harga lebih dari 50% yaitu 66,1%

- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah sebesar 79,19 atau mencapai 83,33% dari 95 (PPH sasaran tahun 2015). Skor ini lebih rendah dari sasaran yang ingin dicapai yaitu

82,84 atau 87,20% dari 95. Ketersediaan pangan belum mampu mencukupi kebutuhan penduduk terutama pangan hewani (daging, telur dan ikan).

Pencapaian skor PPH dilakukan melalui upaya perbaikan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan, salah satunya dengan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP). Pada tahun 2011, kantor Ketahanan Pangan mendapatkan alokasi anggaran dekonsentrasi melalui APBN penghematan 10% Kementerian Pertanian dengan kegiatan pemberdayaan kelompok wanita melalui kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan yang mengembangkan demplot, kebun bibit serta pekarangan anggota dengan budidaya sayur, ternak maupun ikan air tawar. Kelompok memperoleh bansos senilai RP. 16 juta yang digunakan untuk membiayai 3 jenis kegiatan tersebut. Kegiatan ini berlokasi di 10 desa yaitu Kendal, Mendolo kidul (kecamatan Punung), desa pringkuku (kecamatan Pringkuku), desa Purworejo (kecamatan Pacitan), desa Gawang, Plumbungan (kecamatan Kebonagung), desa Petungsinarang (kecamatan Bandar), desa Pucangombo (kecamatan Tegalombo) dan desa sempu (kecamatan Nawangan).

Kantor Ketahanan pangan juga menerima alokasi anggaran dari APBD Provinsi berupa demplot pemanfaatan pekarangan dan cadangan pangan. Demplot pemanfaatan pekarangan berlokasi di kelurahan Ploso kecamatan Pacitan dan dusun Nogosari desa kayen kecamatan Pacitan

dengan melibatkan kelompok wanita/dasa wisma. Masing-masing kelompok memperoleh bansos berupa bibit itik, belut, benih dan bibit sayur senilai Rp.7 juta. Sedangkan kegiatan cadangan pangan melibatkan kelompok tani, masing-masing memperoleh bansos senilai Rp. 15 juta yang diwujudkan dengan bibit kambing, domba, benih dan bibit sayur. Dibandingkan tahun 2010 terjadi penurunan skor Pola Pangan Harapan sebesar 0,8%

- Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita tahu 2011 sebesar 635.970, meskipun tidak mencapai target akan tetapi capaiannya tergolong tinggi yaitu sebesar 99,98% dari target sebesar Rp. 636.075,00 atau hanya selisih Rp. 105,00 saja.
- Konsumsi ikan pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi sebesar 11,54 kg per orang/tahun dari target 11,35 kg per orang/tahun. Kenaikan jumlah konsumsi ikan pada tahun 2011 disebabkan karena meningkatnya produksi ikan pada tahun 2011 yaitu sebesar 6.244.073 ton ikan/tahun juga karena berhasilnya program POSDAYA yang mengkampanyekan program GEMARI atau masyarakat gemar makan ikan.
- Pembinaan dan pengawasan terhadap produk makanan dilakukan secara berkala yaitu menjelang puasa, lebaran, natal dan tahun baru. Selain itu juga dilakukan pembinaan terhadap kelompok pangan olahan tentang peningkatan mutu produk dan keamanan pangan pada pangan olahan skala rumah tangga.

Menjelang lebaran tahun 2011 telah dilakukan pengecekan produk

makanan dan minuman / bahan pangan pengambilan sampel dilakukan pada produk pabrikan skala rumah tangga yang dilakukan di beberapa pasar dan toko. Berdasarkan hasil analisis terhadap 82 sampel produk pangan ditemukan 8 produk berbahaya karena mengandung bahan berbahaya seperti rhodamin B, formalin, dan boraks. Sisanya merupakan produk pangan yang aman atau sebesar 90,24%. Angka ini telah melampaui target 64,00%. Dibandingkan tahun 2010 terjadi peningkatan jumlah pangan aman sebesar 50,4%

**Tabel III.30.**  
**Capaian Kinerja Sasaran 14 :**  
**“Lembaga UMKM Dan Koperasi Sehat Dan Berdaya Saing”**

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJM (2010)	2011		KINERJA	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	% PERKEMB.
1. Koperasi aktif (%)	84,18	84,43	85,51	101,28	1,33
2. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (unit)	5.364	5.632	6.564	116,55	22,37
3. Usaha Mikro dan Kecil (%)	52,31	55,06	55,36	100,54	3,05
4. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	3,73	3,93	5	127,23	1,27
5. Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	0,49	0,99	2,19	221,21	1,70
6. Cakupan bina kelompok nelayan	44	46	46	100,00	4,55
7. Jenis, kelas, dan jumlah restoran	5	5	13	260,00	160,00
8. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	13	14	14	100,00	7,69
9. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	0	0	0	0,00	0,00
10. Jumlah BPR/LKM (unit)	5.365	5.366	5.369	100,06	0,07

11. Jenis dan jumlah bank dan cabang	8	9	8	88,89	0,00
12. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	3	3	2	66,67	(33,33)
<b>Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran</b>				<b>115,20</b>	

Sasaran 14 : "Lembaga UMKM Dan Koperasi Sehat Dan Berdaya Saing", dengan capaian indikator kinerja rata-rata pada tahun 2011 sebesar 115,20 % termasuk kategori "*Baik*", dan didukung oleh 12 (dua belas) indikator kinerja sasaran.

Penjelasan terhadap capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- Jumlah koperasi pada tahun 2011 sebanyak 428 koperasi dan jumlah koperasi aktif tahun 2011 sebanyak 366 koperasi atau sekitar 85,51% dengan demikian mengalami perkembangan sekitar 1,33% dibanding tahun 2010
- Jumlah UKM non BPR tahun 2010 sebanyak 5,364 unit dan meningkat di tahun 2011 sebanyak 6.564 unit perkembangan tersebut disebabkan karena adanya UKM baru
- Pada tahun 2011 jumlah Usaha Mikro Kecil di kabupaten pacitan 11.538 unit dan jumlah Usaha Menengah dan kecil sebanyak 20.843 unit. Sehingga realisasi indikator usaha mikro dan kecil sebesar 55,36%dengan capaiannya sekitar 100,54%. Sedangkan pada tahun 2010 jumlah Usaha Mikro Kecil di kabupaten pacitan hanya sebanyak 10.706 unit dan jumlah Usaha Menengah dan Kecil 19.443 unit.

- Persentase cakupan bina kelompok pedagang /usaha informal pada tahun 2011 terealisasi sebesar 5% dari target sebesar 3,93%. Jumlah kelompok pedagang / usaha informal tahun 2010 sejumlah 80 kelompok tahun 2011 sejumlah 80 kelompok, Jumlah kelompok pedagang informal yang telah mendapatkan binaan di tahun 2010 sejumlah 3 kelompok, di tahun 2011 mengalami perkembangan sejumlah 4 kelompok ke-empat kelompok tersebut adalah kelompok mareci, kelompok pedagang Arjosari, kelompok pasar Arjowinangun, kelompok pasar minulyo
- Jumlah kelompok pengrajin tahun 2010 sejumlah 1.981 kelompok dan yang mendapat bantuan pembinaan sejumlah 30 kelompok, sedangkan di tahun 2011 jumlah kelompok pengrajin sejumlah 2.184 kelompok dan yang mendapatkan bantuan binaan sejumlah 48 kelompok. Perkembangan kelompok binaan tersebut dalam bentuk bantuan peralatan sarana produksi antara lain Mesin Pengurai Tembakau, Bantuan Sarana Produksi Batu Mulia ( Mesin gerindra, Amplas, diamond tool ), Olahan hasil Laut ( Mixer Roti, Etalase, Seller injak, Mesin Adonan krupuk, Rak susun, Tabung gas, Wajan, Mesin rool adonan ), bantuan sarana promosi ( almari pamer, gawangan batik ), bantuan peralatan meubelair kepada 8 kelompok ( kompresor, Spreigun, tatah duduk, gergaji listrik)
- Jumlah restoran yang ada di kabupaten pacitan pada tahun 2011 sebanyak 13 buah yang menyumbangkan pajak daerah sebesar Rp. 39.674.600,00. Sedangkan jumlah hotel terdapat 14 hotel dengan kontribusi pajak daerah sebesar Rp. 145.871.450,00



- Pada tahun 2011 belum terdapat perda yang mendukung iklim usaha di kabupaten pacitan, regulasi dimaksud baru akan disusun pada tahun 2012 sehingga diharapkan nanti pada akhir tahun 2012 kabupaten pacitan sudah memiliki regulasi yang mengatur dan mendukung tentang iklim usaha di kabupaten pacitan dengan harapan akan menarik banyak investor untuk berinvestasi.
- Jumlah BPR/LKM tahun 2010 sebanyak 5.365 unit dan meningkat di tahun 2011 sebanyak 5.369 unit atau sekitar 105.05%

**Tabel III.31.**  
**Capaian Kinerja Sasaran 15 :**  
**“Pemasaran Komoditas Daerah”**

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJM (2010)	2011		KINERJA	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	% PERKEMB.
1. Jumlah pameran/expo produk unggulan dilaksanakan per tahun	7	7	7	100,00	0,00
2. Jumlah pameran/expo	3	4	11	275,00	266,67
3. Omset penjualan komoditas unggulan (milyar)	556	556	564	101,44	1,44
4. Produksi perikanan kelompok nelayan	4.691.797	4.832.551	6.317.608	130,73	34,65
5. Kunjungan wisata	487.855	512.274	598.690	116,87	22,72
<b>Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran</b>				<b>144,81</b>	

Sasaran 15 : “Pemasaran Komoditas Daerah”, dengan capaian indikator kinerja rata-rata pada tahun 2011 sebesar 144,81% termasuk kategori “*Sangat Baik*”, dan didukung oleh 5 (lima) indikator kinerja sasaran.

Penjelasan terhadap capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- Pameran / expo produk unggulan tahun 2011 sejumlah 7 expo dan mengalami peningkatan sejumlah 8 expo pada tahun 2011. Even tersebut antara lain :
  - a. Pameran Smesco di Jakarta (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan)
  - b. Gramedia Expo di Surabaya (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan),
  - c. Pameran Nusantara Tourism dan Craft di Bali (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan),
  - d. Batam Expo di Batam (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan)
  - e. Gebyar Pasar Produk Daerah di Surabaya (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan),
  - f. Jatim Expo Surabaya (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan),
  - g. Dekranasda di Surabaya (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan)
- Sedangkan jumlah pameran/expo lain yang diikuti oleh pemerintah kabupaten pacitan dalam rangka mempromosikan potensi yang ada di kabupaten pacitan antara lain:
  - 1. Pameran Pelayanan Publik di Madiun (Bag. Organisasi / Kantor Pelayanan Perijinan)
  - 2. Pameran Potensi Kelautan dan Perikanan pada HUT RI di bulan

Agustus (Dinas Kelautan dan Perikanan)

3. Asian Jewellery Expo di Jakarta (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan)
  4. Pameran EXPO HUT RI di alun-alun Kab. Pacitan (Kantor Pelayanan Perizinan)
  5. Pekan KIM (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika)
  6. Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa)
  7. Lomba Cipta Menu tahun 2011 tingkat Provinsi Jatim di kabupaten Sidoarjo (Kantor Ketahanan Pangan)
  8. INVESDA dan APKASI (Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal / Dinas Koperasi perindustrian dan Perdagangan)
  9. Pameran KIE (Badan KB dan PP)
  10. Pameran Pembangunan (Badan KB dan PP)
  11. Pameran UPPKS (Badan KB dan PP)
- Omzet penjualan komoditas unggulan tahun 2010 sebesar 556 Milyard, sedangkan tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 564 Milyard. Kenaikan tersebut disebabkan jumlah industri kecil menengah meningkat, komoditas tersebut di tolong oleh produk antara lain, Batu Mulia, Gula Kelapa, Batik, Berubah seni, Olahan Kayu, olahan ketela, Ayam, Olahan Ikan
  - Sampai dengan tahun 2011 produksi perikanan laut ditargetkan sebesar 4.832.551 kg. Pencapaian terhadap target sampai dengan akhir tahun

2011 sebesar 6.317.608 kg atau 130,73%. Bila dibandingkan capaian tahun 2010, produksi perikanan laut Kabupaten Pacitan mengalami kenaikan sebesar 34,65%. Indikator peningkatan produksi perikanan laut dicapai dengan adanya pembangunan berbagai fasilitas laut dan fungsional darat di tempat-tempat pendaratan ikan di 7 kecamatan pesisir. Peningkatan produksi dicapai juga disebabkan oleh dilaksanakannya berbagai pembinaan kepada kelompok nelayan, baik pembinaan teknis penangkapan maupun kelembagaan. Untuk menunjang program minapolitan, mulai tahun 2011 diprogramkan kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan produksi perikanan laut. antara lain penambahan armada, modernisasi armada, alat tangkap, pembangunan berbagai fasilitas darat baik yang pokok maupun fungsional

- Pada tahun 2010 jumlah kunjungan wisata 487.855 orang, sedangkan pada tahun 2011 jumlah kunjungan wisata sejumlah 598.690 mengalami peningkatan yang sangat besar hal ini disebabkan situasi yang kondusif serta pada musim liburan sekolah dan hari raya sangat mendukung sehingga jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Pacitan meningkat.

**Tabel III.32.**  
**Capaian Kinerja Sasaran 16 :**  
**“Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Menuju Sarana Kesehatan,**  
**Pendidikan Dan Perekonomian”**

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJM (2010)	2011		KINERJA	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	% PERKEMB.
1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	49,58	52,52	50,23	95,64	0,65
2. Panjang jalan kabupaten dilalui roda 4 (m)	798.000	798.000	798.000	100,00	0,00

3.	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	428.592	450.022	478.800	106,39	11,71
4.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	299.097	314.052	335.160	106,72	12,06
5.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5m)	13.223	13.223	13.223	100,00	0,00
6.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	60,03	60,3	60,54	100,40	0,51
7.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,00611	0,00745	0,00895	120,13	0,00
8.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	6.901.200	7.361.200	6.079.440	82,59	-11,91
9.	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	337.291	337.500	337.291	99,94	0
10.	Proporsi jembatan dalam kondisi baik (%)	89,82	90,7	90,5	99,78	0,68
11.	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	65,23	65,34	65,34	100,00	0,11
12.	Rumah Tangga yang menggunakan air bersih(%)	65,23	65,34	65,34	100,00	0,11
13.	Penduduk berakses air bersih (%)	19	19,48	19,48	100,00	0,48
14.	Rasio jaringan irigasi	0,086	0,0881	0,085	96,48	0,00
15.	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	3.450	3.526	3.587	101,73	3,97
16.	Jumlah jaringan komunikasi	24	36	40	111,11	66,67
17.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	9:1.000	9:1.000	10:1.000	111,11	1:1.000
18.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	3	3	5	166,67	2,00
19.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	4	6	8	133,33	4,00

20.	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	82.615	87.027	84.067	96,60	1,76
21.	Peningkatan fasilitas pasar daerah dan tradisional	36	36	40	111,11	4,00
22.	Permukiman layak huni (%)	97,4	97,44	97,44	100,00	0,04
23.	Luas Permukiman (Ha)	13.151,42	13.323,75	13.323,75	100,00	1,31
24.	% Lingkungan pemukiman kumuh	0,077	0,074	0,074	100,00	0,00
25.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	35,08	53,37	35,26	66,07	0,18
26.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0	0	0	0	0,00
27.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	6	50	50	100,00	44,00
28.	% Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	0,3	0,31	0,31	100,00	0,01
29.	Jumlah penegakan hukum lingkungan	24	50	50	100,00	26,00
30.	Ketaatan terhadap RTRW	50	55	53,42	97,13	3,42
31.	Luas wilayah produktif	20,22	20,22	20,22	100,00	0,00
32.	Luas wilayah industri	9,68	10,8	10,8	100,00	1,12
33.	Luas wilayah banjir	11,42	10,27	10,27	100,00	-1,15
34.	Luas wilayah kekeringan	22,51	21,38	21,38	100,00	-1,13
35.	Luas wilayah perkotaan	9,5	9,5	9,5	100,00	0,00
36.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)	5,29	5,54	5,11	92,24	-0,18
37.	Kerusakan Kawasan Hutan (%)	0,35	0,3	0,07	23,33	-0,28
38.	Jumlah ijin trayek	639	639	283	44,29	-55,71
39.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	6.901.200	7.361.200	6.079.440	82,59	-11,91
40.	Jumlah uji KIR angkutan umum	4.099	4.181	4.172	99,78	1,78
41.	Jumlah pelabuhan laut/udara	2	3	3	100,00	50,00
42.	Jumlah Terminal Bis/sub terminal	6	7	7	100,00	16,67

43.	Jumlah Angkutan darat	80.518	81.383	81.383	100,00	1,07
44.	Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum	1.679	1.720	1.486	86,40	-11,49
45.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	6 bln	6 bln	6 bln	100	0,00
46.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)	Rp. 40.000	Rp. 80.000	Rp.80.000	100	0,00
47.	Jumlah pemasangan rambu-rambu	491	537	583	108,57	18,74
<b>Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran</b>					<b>94,47</b>	

Sasaran 16 : "Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Menuju Sarana Kesehatan, Pendidikan Dan Perekonomian", dengan capaian indikator kinerja rata-rata pada tahun 2011 sebesar 94,47% termasuk kategori "*Baik*", dan didukung oleh 47 (empat puluh tujuh) indikator kinerja sasaran.

Penjelasan terhadap capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- Perkembangan kondisi jaringan jalan menunjukkan angka positif dimana faktor daya dukung kegiatan pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan maupun kegiatan rutin untuk mewujudkan jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 0,65 dibanding tahun 2010. Kondisi jalan baik pada tahun 2011 terealisasi 50,23%, atau sepanjang 400.849 meter, sedangkan data panjang jaringan jalan kabupaten tahun 2011 sepanjang 798.000 meter
- Perkembangan panjang Jalan Kabupaten yang dapat dilalui roda 4 untuk realisasi tahun 2011 tetap sama dengan realisasi tahun 2010 yaitu sebesar 798.000 meter
- Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) mengalami perkembangan, realisasi

tahun 2011 menunjukkan angka 478.800 m sedangkan tahun 2010 menunjukkan 428.592 m sehingga realisasinya mampu bertambah sebesar 50.208 m hal tersebut karena dampak dari kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan kegiatan infrastruktur pedesaan.

- Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( $> 40$  KM/Jam) mengalami perkembangan yang cukup signifikan. realisasi tahun 2011 menunjukkan angka 335.160 m sedangkan tahun 2010 menunjukkan 299.097 m sehingga realisasinya mampu bertambah sebesar 36.063 m hal tersebut karena dampak dari kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan kegiatan rutin pemeliharaan jalan kabupaten
- Perkembangan panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5m) realisasi tahun 2011 tetap sama dengan realisasi tahun 2010 yaitu sebesar 13.223 m. Penyebab dari hal tersebut untuk tahun 2011 tidak ada kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air
- Perkembangan drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat dari tahun 2010 sampai tahun 2011 menunjukkan peningkatan 0,51% dari angka 60,3 % ke 60,54%
- Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2011 sebesar 0,00895. Jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Pacitan tercatat sebanyak 79.176 buah yang terdiri dari 74.052 kendaraan roda dua dan 5.214 kendaraan roda empat.
- Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum pada tahun 2011 sejumlah 6.079.440 penumpang, realisasi ini mengalami penurunan



apabila dibanding dengan kondisi tahun 2010 juga apabila dibanding dengan target 2011. Hal ini disebabkan meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi.

- Perkembangan kondisi jembatan menunjukkan angka positif dimana faktor daya dukung kegiatan pembangunan maupun pemeliharaan untuk mewujudkan jembatan dalam kondisi baik sebesar 0,68. Realisasi tahun 2010 89,82% dan Realisasi tahun 2011 menjadi 90,5%, adapun data panjang jembatan yang terdata sampai tahun 2011 ini sepanjang 1367,43m
- Rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Pacitan baru mencapai 65,34 % atau sekitar 40.024 rumah tangga. Hal ini lebih diakibatkan karena faktor geologis Kabupaten Pacitan yang jenis tanahnya terdiri dari kapur yang sulit menyimpan air, sehingga di beberapa lokasi sulit ditemukan sumber air. Pembangunan sarana prasarana air bersih akan dititikberatkan pada peningkatan jaringan perpipaan guna meningkatkan jangkauan layanan masyarakat terutama pada daerah-daerah rawan air.
- Penduduk berakses air bersih tahun 2010 menunjukkan angka 19%, pada tahun 2011 menjadi 19,48% sehingga terjadi peningkatan 0,48 %. Pada tahun 2011 penduduk yang terlayani oleh air bersih sejumlah 176.134 jiwa
- Perkembangan Rasio Jaringan Irigasi menunjukkan angka negatif 0,001 dimana faktor yang menyebabkan adalah panjang saluran tahun 2011 sepanjang 657,377 km sementara tahun 2010 sepanjang 667,188 km, sebagai pembanding data luas baku sawah sebesar 7758 Ha. Adapun hal yang menyebabkan turunnya panjang saluran adalah berubah fungsinya lahan

- Perkembangan luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik realisasi tahun 2011 3.587 Ha dan realisasi tahun 2010 yaitu sebesar 3.450 Ha. Dari realisasi tersebut mampu memberikan dampak positif perkembangan yaitu sebesar 137 Ha. Kondisi Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik diperoleh dari data luas baku sawah yang bersifat teknis dan semi teknis
- Pada tahun 2011 di kabupaten pacitan terjadi peningkatan dalam hal pemanfaatan teknologi informasi, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah jaringan komunikasi menjadi sejumlah 40 jaringan, bertambahnya jumlah warnet dengan rasio 10:10.000, meningkatnya jumlah surat kabar nasional/lokal yang beredar di kabupaten pacitan sebanyak 5 buah dan bertambahnya jumlah penyiaran radio/tv lokal menjadi sebanyak 8 buah.
- Jumlah rumah tangga pengguna listrik di kabupaten pacitan tahun 2011 dari target sebanyak 87.027 sambungan hanya terealisasi 84.067 sambungan. Meskipun target tidak tercapai akan tetapi apabila dibanding dengan tahun 2010 telah mengalami peningkatan sebanyak 1.452 sambungan baru.
- Peningkatan fasilitas pasar tahun 2010 sejumlah 40 Unit dan di tahun 2011 sejumlah 40 Unit fasilitas pasar tetap karena di tahun 2011 pembangunan fasilitas pasar ada di lokasi pasar lama
- Perkembangan rumah layak huni di Kabupaten Pacitan rata-rata mencapai 2,75% pertahun yang sebagian besar didorong kesadaran masyarakat akan rumah layak dan sehat serta adanya program fasilitasi dan stimulasi pembangunan rumah layak huni maupun program peningkatan perumahan lainnya dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

- Luas permukiman tahun 2010 menunjukkan angka 13.151,42, tahun 2011 menunjukkan 13.323,75 sehingga terjadi peningkatan 172,33
- Lingkungan permukiman kumuh pada tahun 2010 menunjukan angka 0,077, pada tahun 2011 menunjuk angka 0,070 sehingga terjadi penurunan 0,01%
- Pada tahun 2011 indikator rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB dari target 53,37% terealisasi sebesar 35,26% sehingga capaian kinerjanya 67,34%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah luas taman yang ada di Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 seluas 35.920 m<sup>2</sup> atau mengalami peningkatan seluas 500 m<sup>2</sup> bila dibanding dengan tahun 2010.
- Cakupan pengawasan AMDAL bagi usaha/kegiatan di Kabupaten Pacitan memiliki target 50% pada tahun 2011. Ada 6 obyek pengawasan AMDAL yang ada di Pacitan dan di tahun 2011 telah dilaksanakan pengawasan pada 3 obyek AMDAL tersebut atau 50% dari keseluruhan usaha/kegiatan wajib AMDAL yang aktif
- Persentase tempat pembuangan sampah persatuan penduduk sebesar 0,31. Pada tahun 2011 terdapat 130.180 tempat pembuangan sampah yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten pacitan
- ketaatan terhadap RTRW sebesar 50 %, luas wilayah produktif sebesar 20,22 %, luas wilayah industri sebesar 9,68 %, luas wilayah banjir/sebanjiran sebesar 11,42 %, luas wilayah kekeringan 22,51 %, luas wilayah perkotaan sebesar 9,5 %

- Indikator rehabilitasi hutan dan lahan kritis dari target 5,54% dapat terealisasi 5,11% atau sekitar 1.209,5 ha yang terehabilitasi. Dari target luas lahan kritis pada akhir 2011 sebesar 22.879,50 Ha tercapai 22.420,00 Ha atau turun dari tahun 2010 yaitu 23.629,50 Ha. Hal demikian terjadi karena telah dilakukan upaya rehabilitasi baik dengan dukungan anggaran APBD Kabupaten maupun APBN. Namun demikian perkembangannya sangat kecil karena mengingat topografi Kabupaten Pacitan yang memungkinkan seringnya terjadi tanah longsor sehingga tiap tahun juga masih tumbuh lahan – lahan kritis yang baru.

Peningkatan luas hutan rakyat meningkat dari tahun sebelumnya karena adanya penanaman tanaman kayu – kayuan yang cukup besar terutama karena adanya kegiatan–kegiatan pengembangan baik dari dukungan APBD Kabupaten dan APBN maupun bantuan dari mitra usaha, pembuatan bedengan tanaman secara swadaya dan pembuatan kebun bibit rakyat serta adanya penanaman tanaman jenis baru yaitu Jabon yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi.

Peningkatan jumlah bangunan konservasi secara umum melampaui target yang ditetapkan. Pembuatan bangunan konservasi ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung lahan, mengurangi sedimentasi dan potensi erosi serta memperbaiki drainase untuk menambah ketersediaan air tanah. Pembuatan DPi sejumlah 7 unit dari target 7 unit. Pembuatan DPn tercapai 143 unit dari target 131 unit atau meningkat 14,40% dari tahun 2010 yaitu 125 unit. Sedangkan pada pembuatan Sumur resapan mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 254 unit dari target 180 unit atau meningkat 41,19% dari tahun 2010 yaitu 168 unit.

**Tabel III.33.**  
**Capaian Kinerja Sasaran 17 :**  
**“Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Infrastruktur Dasar”**

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJM (2010)	2011		KINERJA	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	% PERKEMB.
1. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	14,31	16,56	18,93	114,31	4,62
2. Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	100,00	0,00
<b>Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran</b>				<b>107,16</b>	

Sasaran 17 : “Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Infrastruktur Dasar”, dengan capaian indikator kinerja rata-rata pada tahun 2011 sebesar 107,16% termasuk kategori “*Sangat Baik*”, dan didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja sasaran.

Penjelasan terhadap capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Indikator swadaya masyarakat tahun 2011 ditarget 16,58 terealisasi 18,93 %, mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 4,62 % jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 sebesar 14,31 % dari target 14,31 %. Capaian ini dipengaruhi jumlah swadaya masyarakat Rp. 5.475.108.690,00 dari dana Program Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.28.920.000.000,00 Target 2011 sebesar 100 % terealisasi 100 % target 2010 sebesar 100 % terealisasi 100 % Target kegiatan selama 2 ( dua ) tahun sama-sama terpenuhi dengan asumsi bahwa 3 program / kegiatan pemberdayaan masyarakat (ADD, PNPM, Perlombaan Desa) semuanya di kembangkan dan dipelihara oleh masyarakat.

**Tabel III.34.**  
**Capaian Kinerja Sasaran 18 :**  
**“Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat Yang Rukun Dan Damai”**

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJM (2010)	2011		KINERJA	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	% PERKEMB.
1 Angka kriminalitas	188	185	189	97,88	0,53
2 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,99	1	0,87	87,00	(0,12)
3 Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	5.123	5.313	5.091	95,82	(0,62)
4 Rasio petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	0,006	0,005	0,0041	82,00	0,00
5 Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan	30,21	30,21	30,21	100,00	0,00
6 Penegakan PERDA	0,67	0,69	0,7	101,45	0,03
7 Cakupan patroli petugas Satpol PP	2	2	2	100	0,00
8 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten (%)	0,7	0,72	0,98	136,11	0,28
9 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	0,001	0,001	0,001	100,00	0,00
10 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit)	10	10	10	100,00	0,00
11 Jumlah demo	3	2	2	100	(33,33)
12 Angka kriminalitas yang tertangani	183	180	166	92,22	(9,29)
13 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	6	8	0	0,00	0,00
14 Kegiatan pembinaan politik daerah	4	4	2	50,00	(50,00)
15 Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya dan agama	17	18	18	100,00	5,88

16	Jumlah grup kesenian	14	17	18	105,88	28,57
17	Jumlah gedung kesenian	1	1	1	100,00	0,00
18	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	38	38	40	105,26	5,26
19	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	266	266	266	100,00	0,00
20	Jumlah penyelenggaraan kejuaraan olah raga tingkat Kabupaten	16	24	26	108,33	62,50
21	Jumlah sarana peribadatan dan keagamaan yang mendapat pembinaan	227	240	249	103,75	9,69
22	Jumlah jenis olah raga berprestasi	8	11	12	109,09	50,00
23	Jumlah Klub Olahraga	72	80	80	100,00	11,11
24	Jumlah gedung olahraga	3	4	3	75,00	0,00
25	Jumlah organisasi pemuda	12	12	12	100,00	0,00
26	Jumlah organisasi olahraga	16	17	17	100,00	6,25
27	Jumlah kegiatan kepemudaan	12	18	21	116,67	75,00
28	Jumlah kegiatan olahraga	20	22	26	118,18	30,00
29	Jumlah gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	171	176	176	100,00	2,92
30	Jumlah lapangan olahraga	140	157	162	103,18	15,71
<b>Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran</b>					<b>96,26</b>	

Sasaran 18 : "Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat Yang Rukun Dan Damai", dengan capaian indikator kinerja rata-rata pada tahun 2011 sebesar 96,26% termasuk kategori "*Baik*", dan didukung oleh 30 (empat belas) indikator kinerja sasaran.

Penjelasan terhadap capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- Angka kriminalitas di kabupaten pacitan pada tahun 2011 sebanyak 189 kasus atau mengalami peningkatan sebanyak 1 kasus (0,53%) apabila dibanding dengan tahun 2010. Hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Pacitan. Dari jumlah tersebut sebanyak 166 kasus dapat ditangani sedangkan sisanya masih dalam proses penyelesaian.
- Rasio jumlah anggota satuan polisi pamong praja kabupaten pacitan pada tahun 2011 sebesar 0,78 dari target sebesar 1. Kondisi ini tentu tidak ideal, tidak tercapainya rasio ini disebabkan karena pada tahun 2011 tidak terdapat penambahan personil anggota satpol PP akibat adanya moratorium penerimaan CPNS tahun 2011, sedangkan jumlah penduduk pacitan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada saat ini jumlah personil satpol PP kabupaten pacitan sebanyak 43 orang, sedangkan jumlah penduduk yang harus dilayani sebanyak 542.417 orang.
- jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk pada tahun 2011 sebanyak 5.091, realisasi ini menurun dibandingkan dengan target 2011 maupun dengan capaian tahun 2010. Tidak tercapainya target indikator ini disebabkan karena kurangnya minat masyarakat untuk menjadi anggota linmas.
- Rasio petugas linmas di kabupaten pada tahun 2011 dari target 0,005 dapat terealisasi 0,041. Dari jumlah PNS yang ada di kabupaten pacitan sebanyak 9.626, 39 diantaranya merupakan anggota linmas kabupaten yang berada di badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat



- Penegakan peraturan daerah di kabupaten pacitan yang dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja kabupaten pacitan sebesar 0,7% dengan capaian 101,45% apabila dibanding dengan target (0,69). Peningkatan ini disebabkan karena adanya penerbitan perda baru sejumlah 1 buah pada tahun 2011 yaitu Perda Nomor 14 tahun 2011 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Cakupan patroli petugas satpol PP dapat terealisasi 100%, capaian ini sama dengan capaian pada tahun 2010.
- Tingkat penyelesaian pelanggaran K-3 pada tahun 2011 sebesar 0,98 dari target sebesar 0,72. Sehingga capaiannya sebesar 136,11%.
- Cakupan pelayanan bencana kebakaran di tingkat kabupaten dapat terealisasi 0,001 atau 100% dari target,
- Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen dapat terealisasi 10 menit, sesuai dengan target sehingga capaiannya adalah 100%
- Jumlah demo pada tahun 2011 terdapat 2 kali demo yang secara keseluruhan berjalan dengan aman dan lancar dan tertangani dengan baik
- Untuk kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP di kabupaten pacitan pada tahun 2011 tidak dapat dilaksanakan karena terbatasnya anggaran yang mendukung sehingga capaiannya tidak dapat memenuhi target. Begitu pula halnya untuk kegiatan pembinaan politik daerah capaiannya sebesar 50%, dari rencana sebanyak 4 kegiatan hanya terealisasi sebanyak 2 kegiatan pembinaan politik daerah, hal ini

disebabkan karena adanya perubahan rencana karena keterbatasan anggaran sehingga yang semestinya dilaksanakan 4 kali hanya dapat terealisasi sebanyak 2 kali.

- Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya dan agama pada tahun 2011 dapat mencapai target 100%, dari 18 festival yang direncanakan semua dapat terlaksana dengan baik. Tercapainya target ini didukung oleh adanya peringatan hari jadi kabupaten pacitan, HUT kemerdekaan RI dan peringatan hari besar keagamaan. Selain itu juga adanya pengiriman duta seni ke berbagai daerah di luar kabupaten dengan tujuan untuk memperkenalkan pacitan kepada masyarakat luas.
- Capaian indikator jumlah grup kesenian pada tahun 2011 sebesar 105,88%. Dari target 17 group dapat terealisasi 18 group kesenian. Realisasi tersebut meningkat 28,57% apabila dibanding dengan tahun 2010. Sedangkan untuk jumlah gedung kesenian sampai tahun 2011 hanya terdapat satu gedung kesenian.
- Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya dari target 38 dapat terealisasi 40 sehingga capaiannya 105,26% atau meningkat 5,26% apabila dibanding tahun 2010
- Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat terealisasi 100% dari target 266 jenis. Sehingga secara keseluruhan, semua benda, situs dan kawasan cagar budaya mendapat perawatan dengan baik
- Jumlah sarana peribadatan yang mendapat pembinaan pada tahun 2011 sebanyak 249 tempat dari 240 tempat yang direncanakan. Sehingga capaiannya sebesar 103,75%. Jumlah realisasi tersebut meningkat 9,6%

apabila dibanding tahun 2010

- Jumlah penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten pada tahun 2011 sebanyak 26 even dari 24 even yang direncanakan dengan capaian 108,33%. Sedangkan untuk jenis olahraga berprestasi sebanyak 12 jenis olahraga. Indikator tersebut didukung oleh peningkatan beberapa indikator yang mendukung antara lain: peningkatan jumlah klub olahraga menjadi sebanyak 80 klub, dengan jumlah 3 gedung olahraga yang memadai.

**Tabel III.35.**  
**Capaian Kinerja Sasaran 19 :**  
**“Terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat”**

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJM (2010)	2011		KINERJA	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	% PERKEMB.
1. Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	6,48	6,8	5,26	77,35	(1,22)
2. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	36,87	36,1	23,94	66,32	(12,93)
3. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)	8	8	8	100,00	0,00
4. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (%)	6,48	6,8	21,25	312,50	14,77
5. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum	50,25	55,3	42,55	76,94	(7,70)
6. Kekerasan Dalam Rumah Tangga(%)	12,38	12,38	33,33	269,22	20,95
7. % Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	45,51	50,31	41,17	81,83	(4,34)

8.	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	33,15	33,15	35,68	107,63	2,53
9.	Jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)	25,47	25,47	26,34	103,42	0,87
10.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	44,47	56,51	70,7	125,11	26,23
11.	Rata-rata jumlah anak per keluarga (%)	2,29	2,2	1,98	90,00	(0,31)
12.	Rasio penduduk yang bekerja	0,9867	0,9868	0,3773	38,23	(0,61)
13.	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	66,38	69,6	70,42	101,18	4,04
14.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	5	5	5	100,00	0,00
15.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	68,86	69,88	70,42	100,77	1,56
16.	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	6,2	23,7	24,57	103,67	18,37
17.	Angka Pengangguran Terbuka	1,28	1,27	0,37	29,13	(0,91)
18.	Jumlah keselamatan dan perlindungan perusahaan	16	16	16	100,00	0,00
19.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	100	100	100	100,00	0,00
20.	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (%)	33,33	33,33	33,33	100,00	0,00
21.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	100	100	100	100,00	0,00
22.	LPM Berprestasi (%)	0	0	1,75	100,00	1,75
23.	PKK aktif (%)	20	100	100	100,00	80,00
24.	Transmigran swakarsa (orang)	0	10	10	100,00	10,00
25.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (Ketenagakerjaan)	281	337	123	36,50	(158,00)
26.	Rasio ketergantungan (Ketenagakerjaan)	0,51	0,5	1,13	226,00	0,62
27.	Penduduk Miskin (%)	16,9	16,39	16,34	99,69	-0,56
28.	Jumlah penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat	4	4	4	100,00	0,00
<b>Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran</b>					<b>108,77</b>	

Sasaran 19 : "Terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat", dengan capaian indikator kinerja rata-rata pada tahun 2011 sebesar 108,77% termasuk kategori "*Sangat Baik*", dan didukung oleh 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja sasaran.

Penjelasan terhadap capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- Indikator Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial, tahun 2011 dengan target 6,80 % dapat terealisasi 5,26 % sehingga capaian kinerja 77,35 %. Jumlah fakir miskin dari 21.124 orang, yang meningkat pendapatannya 1.112 orang
- untuk mengetahui tingkat kesejahteraan keluarga dapat diukur melalui indikator tahapan keluarga sejahtera yang pengukurannya dilakukan melalui pendataan keluarga.

pencapaian tingkat kesejahteraan keluarga dapat diukur dari jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I, dimana apabila jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I semakin menurun berarti tingkat kesejahteraan keluarga semakin meningkat.

Pada tahun 2011 jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I sebesar 23,94% dari seluruh keluarga yang ada. Hal ini mengalami penurunan sebesar 12,93% dibanding dengan keadaan tahun 2010 sebesar 36,87% dan apabila dibanding dengan target RPJMD tahun 2011 sebesar 36,10% telah mencapai 66,32%

- Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, tahun 2011 dengan target 8 unit dapat terealisasi 8 unit sehingga capaian kinerja 100 %.
- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial, tahun 2011 dengan target 6,80 % dapat terealisasi 5,26 %

sehingga capaian kinerja 77,41 %. Jumlah PMKS dari 21.124 orang, yang memperoleh bantuan sosial 1.112 orang

- Secara garis besar kegiatan ini mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar 7,70%. Hal yang paling menonjol adalah partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2011 ini mengalami peningkatan sebesar 26,23% atau sebesar 125% dari target RPJMD sedangkan partisipasi perempuan di berbagai pemerintah juga mengalami peningkatan sebesar 2,53% apabila di bandingkan dengan target RPJMD Th 2011 mencapai 107,63%. Prosentase kasus KDRT yang di tangani terus mengalami peningkatan dari jumlah kasus yang ada 33,33% telah di tangani dari target yang di tetapkan sebesar 12,38%. Jumlah Tenaga Kerja di bawah umur terjadi peningkatan dari keadaan Th 2010, yaitu sebesar 0,87% yaitu dari 25,47% menjadi 26,34%. Untuk partisipasi angkatan kerja perempuan pada Th 2011 mengalami peningkatan sebesar 26,23% sedangkan bila di banding dengan target RPJMD sebesar 56,51% mencapai 125,11%. Di lihat dari tingkat Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan mencapai 41,17% atau sebesar 81,83% dari target RPJMD Th 2011 sebesar 50,31% apabila di banding dengan keadaan Th 2010 sebesar 45,51%. Tahun ini terjadi penurunan penanganan sebesar 4,34% hal ini di sebabkan bahwa kasus kekerasan Th 2011 mengalami penurunan.

Dari sisi cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum pada Th 2011 nihil hal ini di karenakan dari kasus yang ada prosesnya dapat di selesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak sampai proses ke jalur kejaksaan dan pengadilan

- Rasio penduduk yang bekerja, tahun 2011 dengan target 0,9869 % dapat terealisasi 0,3712 % sehingga capaian kinerja 37,62 %. Jumlah penduduk yang bekerja dari 290.460 orang, yang tertangani 1.096 orang
- Angka partisipasi angkatan kerja, tahun 2011 dengan target 69,60 % dapat terealisasi 70,42 % sehingga capaian kinerja 101,18 %. partisipasi angkatan kerja sebanyak 296.506 orang dari 421.052 orang penduduk usia kerja
- Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun, tahun 2011 dengan target 5 dapat terealisasi 5 sehingga capaian kinerja 100 %
- Angka partisipasi angkatan kerja, tahun 2011 dengan target 69,60 % dapat terealisasi 70,42 % sehingga capaian kinerja 101,18 %. partisipasi angkatan kerja sebanyak 296.506 orang dari 421.052 orang penduduk usia kerja
- Pencari kerja yang ditempatkan, tahun 2011 dengan target 23,70 % dapat terealisasi 24,57 % sehingga capaian kinerja 103,67 %. Jumlah pencari kerja yang di tempatkan dari 16.854 orang, yang tertangani 4.141 orang
- Angka pengangguran terbuka perkembangannya mengalami peningkatan dari target 1,27% menjadi 2,7% menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja yang belum dapat pekerjaan dengan kata lain angka pengangguran pada tahun 2011 bertambah sejalan dengan meningkatnya partisipasi angkatan kerja, disatu sisi perluasan kesempatan kerja perlu dikembangkan
- Jumlah keselamatan dan perlindungan perusahaan, tahun 2011 dengan target 16 dapat terealisasi 16 sehingga capaian kinerja 100 %.
- Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah, tahun 2011 dengan target 100 kasus dapat terealisasi 100 kasus sehingga capaian kinerja 100 %
- Rata-rata Jumlah Kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat ( LPM ), dari target tahun 2011 sebesar 33,33% tercapai 33,33% jika dibandingkan dengan target pada tahun 2010 sebesar 33,33 % terealisasi

33,33 % maka target sama-sama terpenuhi dengan asumsi Capaian yang dipengaruhi oleh jumlah LPM / LKMD yang dibina sejumlah 171 dari jumlah LPM yang ada di desa / kel sejumlah 513.

- Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK , target 2011 sebesar 100% tercapai 100%, jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2010 dengan target 100% terealisasi 100% maka realisasi masih stagman (target terpenuhi) dengan asumsi capaian dipengaruhi 171 desa binaan PKK semua mendapatkan pembinaan dari TP-PKK Kabupaten Pacitan
  - LPM Berprestasi, dari target 2011 sebesar 0% terealisasi 1,75% jika dibandingkan dengan target 0 % dan realisasi 0 % tahun 2010, maka indicator pada kegiatan tersebut terjadi kenaikan sebesar 1,75% dengan asumsi capaian dipengaruhi oleh terlaksananya kegiatan perlombaan LPM berprestasi (UPKu) dengan terpilih 3 UPKu berprestasi dari 171 desa / kel.
  - PKK Aktif, Target tahun 2011 sebesar 100% terealisasi 100% (Capaian 100 %) jika dibandingkan dengan target tahun 2010 sebesar 20% terealisasi 20% maka capaian kinerja pada indicator tersebut terjadi kenaikan 80%. Hal ini dipengaruhi oleh 171 TP-PKK yang ada di Kabupaten Pacitan semua aktif melaksanakan kegiatan
  - Transmigrasi swakarsa, tahun 2011 dengan target 10 KK dapat terealisasi 10 KK sehingga capaian kinerja 100 %. Transmigrasi swakarsa dari 10 KK, yang di berangkatkan 10 KK, sedangkan jumlah Transmigrasi yang di berangkatkan, tahun 2011 dengan target 10 KK dapat terealisasi 11 KK sehingga capaian kinerja 105 %.
  - Rasio lulusan S1/S2/S3, tahun 2011 dengan target 337 realisasi 123 sehingga capaian kinerja 36,50 %.
- Rasio ketergantungan, tahun 2011 dengan target 15,38 % realisasi 1,13 sehingga capaian kinerja 126 %
- Penduduk Miskin sebanyak di kabupaten pacitan sebanyak 88.650 orang atau 16,34% dari jumlah penduduk kabupaten pacitan (542.417 jiwa), jumlah ini menurun sebesar 0,56% dibanding kondisi tahun 2010.



- Jumlah penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat tahun 2011 sebanyak 4 kali penyuluhan sehingga capaiannya 100% dari target yang telah ditetapkan, dengan adanya penyuluhan ini diharapkan angka kriminalitas di kabupaten pacitan dapat menurun dan tingkat k-3 dapat meningkat

## **C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2011**

Keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya guna serta tak kalah pentingnya dana/anggaran yang tersedia.

Secara umum mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Pacitan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku disepanjang Tahun 2011. Ketentuan tersebut yaitu: Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan  
Tahun Anggaran 2011,

### **C.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah equitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang telah terukur secara rasional diupayakan untuk dapat dicapai oleh setiap sumber – sumber pendapatan yang telah ditetapkan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2011 menekankan pada upaya menggali potensi baru dan meningkatkan mobilisasi Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung kemandirian daerah, disamping itu pemerintah daerah juga berupaya membuat berbagai terobosan guna meningkatkan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat, swasta serta masyarakat yang sedapat mungkin tidak membebani masyarakat dan tetap pada tujuan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri N

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi :

- Pajak daerah;

- Retribusi Daerah;
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah.

2. Dana Perimbangan meliputi :

- Dana bagi hasil pajak / bukan pajak;
- Dana Alokasi Umum;
- Dana Alokasi Khusus;

3. Lain – lain pendapatan daerah yang Sah, meliputi :

- Hibah;
- Dana Darurat;
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya;
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus;
- Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.

Adapun dalam pengelolaan pendapatan daerah upaya yang ditempuh untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah beberapa diantaranya adalah melalui :

- a Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah melalui kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;

- b Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu;
- c Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan, melalui upaya penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat;
- d Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum, dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah yang ditujukan kepada :
  - Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah secara proporsional pada program prioritas dan kegiatan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
  - Peningkatan upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui pendekatan pelayanan kepada wajib pajak dan peningkatan kerjasama dengan melibatkan organisasi masyarakat atau organisasi non pemerintah.

Berbagai kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan penerimaan daerah yang optimal, maka kesinambungan program/ kegiatan dalam

rangka penyediaan sarana dan prasarana guna peningkatan pelayanan masyarakat tetap menjadi landasan utama target pendapatan sehingga pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai.

### **1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan sesuai target yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 telah ditetapkan sebesar Rp. 842.669.635.037,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 858.236.946.102,90 melebihi target sebesar Rp. 15.567.311.065,90 atau mencapai 101,85%.

Adapun realisasi Pendapatan Daerah kabupaten Pacitan tersebut, berasal dari :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 48.359.915.660,96;
- Dana Perimbangan sebesar Rp. 583.216.975.459,00; dan
- Lain-lain Penerimaan yang sah sebesar Rp. 226.660.054.982,94.

Apabila dibanding dengan pencapaian target periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 695.715.383.053,72 berarti telah mengalami kenaikan sebesar Rp. 162.521.563.049,18 atau 23,36%.

Berdasarkan data menunjukkan bahwa arah dan kebijakan umum pendapatan daerah melalui intensifikasi pemungutan, penggalan potensi sumber pendapatan, pengendalian, pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran serta koordinasi baik dengan Pemerintah Propinsi

maupun pusat guna meningkatkan dana transfer dan bagi hasil pajak yang akan diterima Pemerintah Kabupaten telah berjalan dengan baik disamping peningkatan didukung pula kesadaran masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Secara umum dalam rangka pemenuhan target APBD, hampir semua komponen pendapatan dapat melampaui target, kecuali :

1. Dana perimbangan dari bagi hasil pajak / bukan pajak . Hal ini disebabkan adanya keputusan Menteri Keuangan terkait dengan penyesuaian alokasi definitive bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak bagian pemerintah pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten / kota tahun anggaran 2011;
2. Lain – lain penerimaan yang Sah dari Dana hibah. Hal ini disebabkan penetapan anggaran Dana hibah sesuai dengan Alokasi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang digunakan sebagai alokasi dana tanggap darurat bencana, sebagai upaya peningkatan adalah terus melakukan koordinasi dalam pelaksanaan anggaran dana hibah sesuai dengan pengalokasiannya.

Sedangkan berdasarkan data realisasi pendapatan tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 858.236.946.102,90 mengalami kenaikan sebesar Rp. 162.521.563.049,18 atau 23,36% dibandingkan pendapatan tahun anggaran 2010. Kenaikan pendapatan tersebut berasal dari :

1. Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 18.871.736.173,24 atau 64,00% dibandingkan tahun 2010 karena

adanya intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan pendapatan asli daerah.

2. Dana perimbangan mengalami kenaikan sebesar Rp. 48.781.854.009,00 atau 9,13% dibandingkan tahun 2010 karena adanya tambahan dana dari dana alokasi umum yang dialokasikan untuk kenaikan gaji pokok pegawai negeri sipil.
3. Lain-lain pendapatan yang sah mengalami kenaikan sebesar Rp. 94.867.972.866,94 atau 71,98 % dibandingkan tahun 2010 karena adanya tambahan penerimaan dari :
  - Dana penyesuaian otonomi khusus, yang ditujukan dalam rangka percepatan kemandirian daerah dalam kerangka otonomi, dialokasikan untuk tambahan tunjangan fungsional guru, Tambahan penghasilan Guru PNSD non sertifikasi, Tunjangan sertifikasi guru PNSD dan Cukai hasil tembakau;
  - Bantuan keuangan dari pemerintah Propinsi dan pemerintah Daerah lain yang antara lain dipergunakan untuk pemberdayaan koperasi (UMKM), Peningkatan Infrastruktur jalan, pemberdayaan koperasi wanita (KOPWAN), Peningkatan infrastruktur pendidikan, infrastruktur Bina Marga pembangunan unit sekolah baru, Sarpras SMK, dan lain sebagainya

Secara lengkap Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dan 2011, dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel III.36.**  
**Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan**  
**Tahun Anggaran 2010 dan 2011**

No	Pendapatan	Tahun				Growth
		2010		2011		
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	29.488.179.487,72	4,24	48.359.915.660,96	5,63	64,00
	- Pajak Daerah	5.155.151.458,00	0,74	6.006.625.272,00	0,70	16,52
	- Retribusi Daerah	17.923.822.016,17	2,58	11.626.055.797,77	1,35	(35,14)
	- Hasil Perusda & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.617.267.165,11	0,23	2.903.227.691,81	0,34	79,51
	- Lain-lain PAD yang Sah	4.791.938.848,44	0,69	27.824.006.899,38	3,24	480,64
2	DANA PERIMBANGAN	534.435.121.450,00	76,82	583.216.975.459,00	67,96	9,13
	- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	40.760.726.450,00	5,86	48.580.538.459,00	5,66	19,18
	- DAU	435.690.795.000,00	62,62	480.580.537.000,00	56,00	10,30
	- DAK	57.983.600.000,00	8,33	54.055.900.000,00	6,30	(6,77)
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH	131.792.082.116,00	18,94	226.660.054.982,94	26,41	71,98
	- Hibah	824.269.635,00	0,12	986.005.744,94	0,11	19,62
	- Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	27.845.307.573,00	4,00	29.581.537.578,00	3,45	6,24
	- Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	67.320.004.908,00	9,68	175.238.937.160,00	20,42	160,31
	- Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	35.802.500.000,00	5,15	20.853.574.500,00	2,43	(41,75)
	Jumlah	695.715.383.053,72	100,00	858.236.946.102,90	100,00	0,00

Keterangan: - % : Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah  
- Growth : Pertumbuhan (persen )tahun 2010 dan tahun 2011

Dari data diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan struktur pendapatan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pacitan masih menerima kontribusi dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam jumlah yang relatif



cukup besar yaitu sebesar Rp. 583.216.975.459,00 dari seluruh pendapatan daerah tahun anggaran 2011 yang meliputi :

- Dana bagi hasil pajak/ bukan pajak :Rp. 48.580.538.459,00
- Dana Alokasi Umum :Rp. 480.580.537.000,00
- Dana Alokasi Khusus :Rp. 54.055.900.000,00

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pendapatan daerah masih sangat kecil yaitu sebesar Rp 48.359.915.660,96 atau 5,63% dari seluruh pendapatan daerah. Kondisi demikian, mendorong Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk lebih giat dalam meningkatkan potensi lokal dalam mendongkrak PAD demi terciptanya kemandirian daerah agar tidak terlalu tergantung pada Pemerintah Pusat.

Upaya yang dilakukan dalam memacu peningkatan PAD melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

- a. Kerjasama dengan pihak ketiga;
- b. Menambah jumlah wajib pajak/retribusi daerah;
- c. Melakukan penyesuaian besaran tarif pajak/retribusi daerah;
- d. Meningkatkan dan memperbaiki sistem dan prosedur pemungutan;
- e. Penyuluhan wajib pajak/retribusi daerah.

## 2. Target dan Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 858.236.946.102,86 atau mencapai 101,85 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 842.669.635.037,00 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III.37.**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Tahun Anggaran 2011**

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>44.340.003.127,00</b>	<b>48.359.915.660,92</b>	<b>109,07</b>
1.1.1	- Pajak Daerah	6.012.320.379,00	6.006.625.272,00	99,91
1.1.2	- Retribusi Daerah	10.848.805.340,00	11.626.055.797,77	107,16
1.1.3	- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan	2.903.227.692,00	2.903.227.691,77	100,00
1.1.4	- Lain-lain PAD yang Sah	24.575.649.716,00	27.824.006.899,38	113,22
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>580.546.898.133,00</b>	<b>583.216.975.459,00</b>	<b>100,46</b>
1.2.1	- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan pajak	45.894.161.133,00	48.580.538.459,00	105,85
1.2.2	- Dana Alokasi Umum	480.580.537.000,00	480.580.537.000,00	100,00
1.2.3	- Dana Alokasi Khusus	54.072.200.000,00	54.055.900.000,00	99,97
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH</b>	<b>217.782.733.777,00</b>	<b>226.660.054.982,94</b>	<b>104,08</b>
1.3.1	- Hibah	1.764.579.645,00	986.005.744,94	55,88
1.3.2	- Dana darurat	0,00	0,00	0,00
1.3.3	- Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	27.465.642.472,00	29.581.537.578,00	107,70
1.3.4	- Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	175.238.937.160,00	175.238.937.160,00	100,00
1.3.5	- Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	13.313.574.500,00	20.853.574.500,00	156,63
	Jumlah	842.669.635.037,00	858.236.946.102,86	101,85

Keterangan : Data sebelum Laporan Pertanggung Jawaban APBD Kab. Pacitan Tahun Anggaran 2011

Dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2011 adalah sebesar Rp 48.359.915.660,92 atau mencapai 109,07 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 44.340.003.127,00. Realisasi penerimaan PAD tersebut berasal dari :

- Pajak Daerah sebesar Rp. 6.006.625.272,00
- Retribusi daerah sebesar Rp. 11.626.055.797,77
- Pengelolaan Hasil Kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 2.903.227.691,77
- Lain – lain PAD yang sah sebesar Rp. 27.824.006.899,38

Komposisi target dan realisasi masing-masing jenis pendapatan pada tahun anggaran 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III.38.**  
**Target dan Realisasi Pajak Daerah**  
**Tahun Anggaran 2011**

Kode	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
4.1.1.01	Pajak Hotel	98.000.000,00	145.871.450,00	148,85
4.1.1.02	Pajak Restoran	30.000.000,00	39.674.600,00	132,25
4.1.1.03	Pajak Hiburan	34.000.000,00	42.841.720,00	126,01
4.1.1.04	Pajak reklame	350.000.000,00	383.581.850,00	109,59
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	4.645.000.000,00	4.783.134.865,00	102,97
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	0,00	0,00	0,00
4.1.1.07	Pajak Parkir	6.000.000,00	8.899.750,00	148,33
4.1.1.08	Pajak Air bawah tanah	25.000.000,00	33.787.972,00	135,15
4.1.1.09	Pajak sarang burung walet	3.500.000,00	4.130.000,00	118,00
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	235.000.000,00	276.455.767,00	117,64
4.1.1.13	Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan	585.820.379,00	288.247.298,00	49,20
<b>Jumlah</b>		<b>6.012.320.379,00</b>	<b>6.006.625.272,00</b>	<b>99,91</b>

*Keterangan : Data sebelum Laporan Pertanggung Jawaban APBD Kab. Pacitan Tahun Anggaran 2011*

**Tabel III.39.**  
**Target dan Realisasi Retribusi Daerah**  
**Tahun Anggaran 2011**

KODE	JENIS RETRIBUSI DAERAH	TARGET ( Rp )	REALISASI ( Rp )	CAPAIAN ( % )
4.1.2.01	Retribusi jasa umum	6.957.446.740,00	7.303.035.950,00	104,97
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.632.336.240,00	3.632.526.700,00	100,01
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	43.000.000,00	43.758.500,00	101,76
4.1.2.01.03	Retribusi Penggantian Biaya KTP, KK, Akta Catatan Sipil	342.515.000,00	502.445.000,00	146,69
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	853.283.000,00	1.014.662.250,00	118,91
4.1.2.01.06	Retribusi pelayanan pasar	1.841.812.500,00	1.830.943.500,00	99,41
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	244.500.000,00	278.700.000,00	113,99
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.917.408.600,00	3.367.085.172,00	115,41
4.1.2.02.01	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	289.650.700,00	344.751.673,00	119,02
4.1.2.02.03	Retribusi tempat pelelangan	904.962.500,00	983.400.699,00	108,67
4.1.2.02.04	Retribusi terminal	130.734.000,00	109.946.700,00	84,10
4.1.2.02.06	Retribusi tempat penginapan/villa/pesanggrahan	8.800.000,00	12.810.000,00	145,57
4.1.2.02.08	Retribusi rumah potong hewan	14.500.000,00	14.526.000,00	100,18
4.1.2.02.10	Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	1.568.011.400,00	1.900.900.100,00	121,23
4.1.2.02.14	Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan & IB	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.15	Retribusi pengelolaan Sarang Burung Walet dan yang sejenisnya	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.16	Retribusi pengelolaan Pengambilan Rumput Laut	750.000,00	750.000,00	100,00
4.1.2.03	Retribusi Perizinan tertentu	973.950.000,00	955.934.675,77	98,15
4.1.2.03.01	Retribusi izin mendirikan bangunan	500.000.000,00	287.137.975,77	57,43
4.1.2.03.02	Retribusi izin tempat menjual minuman beralkohol	25.000.000,00	30.800.000,00	123,20
4.1.2.03.03	Retribusi izin gangguan/keramaian	412.500.000,00	611.096.700,00	148,14
4.1.2.03.04	Retribusi izin trayek	36.450.000,00	26.550.000,00	72,84
4.1.2.03.06	Retribusi Perizinan Bidang Kesehatan	0,00	350.000,00	100,00
4.1.2.03.07	Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.08	Retribusi Izin Tebang Kayu Milik/Hutan Rakyat	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.09	Retribusi Izin Usaha Perdagangan	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.10	Retribusi Tanda Daftar Perusahaan	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.11	Retribusi Izin Usaha Industri	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.12	Retribusi Tanda Daftar Industri	0,00	0,00	0,00

KODE	JENIS RETRIBUSI DAERAH	TARGET ( Rp )	REALISASI ( Rp )	CAPAIAN ( % )
4.1.2.03.13	Retribusi Tanda Daftar Gudang	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.14	Retribusi Pemanfaatan Air Bawah Tanah	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.16	Retribusi Surat Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi Gol. C	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.17	Retribusi Kuasa Pertambangan Eksplorasi Gol.AB	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.18	Kuasa Pertambangan Eksploitasi Gol.AB	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.21	Retribusi Surat Ijin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>10.848.805.340,00</b>	<b>11.626.055.797,77</b>	<b>107,16</b>

Keterangan : Data sebelum Laporan Pertanggung Jawaban APBD Kab. Pacitan Tahun Anggaran 2011

**Tabel III.40.**  
**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**  
**Tahun Anggaran 2011**

Kode	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
4.1.3.01	Bagian laba atas penyertaan Modal pada Perusahaan milik Swasta	2.903.227.692,00	2.903.227.691,81	100,00
4.1.3.01.01	Bank Jatim	2.799.857.692,00	2.799.857.691,81	100,00
4.1.3.01.02	Bank Perkreditan Rakyat	103.370.000,00	103.370.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.903.227.692,00</b>	<b>2.903.227.691,81</b>	<b>100,00</b>

Keterangan : Data sebelum Laporan Pertanggung Jawaban APBD Kab. Pacitan Tahun Anggaran 2011

**Tabel III.41.**  
**Target dan Realiasi Pendapatan Lain-lain yang Sah**  
**Tahun Anggaran 2011**

Kode	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	Capaian
		(Rp)	( Rp )	( % )
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak di Pisahkan	116.850.000,00	186.614.500,00	159,70
4.1.4.01.03	Penjualan peralatan/ perlengkapan tidak terpakai	30.000.000,00	70.150.000,00	233,83
4.1.4.01.05	Penjualan kendaraan dinas roda 2	200.000,00	200.000,00	100,00
4.1.4.01.06	Penjualan kendaraan dinas roda 4	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00
4.1.4.01.13	Penjualan hasil pertanian	30.500.000,00	30.519.500,00	100,06
4.1.4.01.19	Penjualan Pos Direksi	13.750.000,00	44.437.500,00	323,18
4.1.4.01.20	UBIBAM	4.400.000,00	3.307.500,00	75,17
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.121.742.000,00	1.455.066.267,33	129,71
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	1.121.742.000,00	1.455.066.267,33	129,71

4.1.4.03	Pendapatan Bunga	1.885.737.658,00	2.764.056.380,96	146,58
4.1.4.03.01	Rekening Deposito pada Bank BPD	1.180.984.840,00	1.831.378.081,96	155,07
4.1.4.03.02	Rekening Deposito pada Bank BRI	498.434.818,00	681.674.154,00	136,76
4.1.4.03.03	Rekening Deposito pada Bank BNI	195.458.000,00	240.144.145,00	122,86
4.1.4.03.04	Pendapatan bunga piutang	10.860.000,00	10.860.000,00	100,00
4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	1.141.229.568,00	1.161.978.574,25	101,82
4.1.4.10.03	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan	8.195.844,00	11.752.190,00	143,39
4.1.4.10.06	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran belanja selain gaji dan tunjangan	1.133.033.724,00	1.150.226.384,25	101,52
4.1.4.14	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	255.000.000,00	620.062.110,29	243,16
4.1.4.14.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	255.000.000,00	620.062.110,29	243,16
4.1.4.15	Pendapatan dari BLUD	18.080.000.000,00	19.000.409.920,54	105,09
4.1.4.15.01	Pendapatan dari BLUD	18.080.000.000,00	19.000.409.920,54	105,09
4.1.4.16	Pendapatan Lain-lain	1.975.090.490,00	2.635.819.146,01	133,45
4.1.4.16.01	Pendapatan Lain-lain	1.975.090.490,00	2.635.819.146,01	133,45
<b>Jumlah</b>		<b>24.575.649.716,00</b>	<b>27.824.006.899,38</b>	<b>113,22</b>

Keterangan : Data sebelum Laporan Pertanggung Jawaban APBD Kab. Pacitan Tahun Anggaran 2011

### 3. Permasalahan dan Solusi

#### a. Permasalahan

Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat beberapa kendala diantaranya :

1. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 11 obyek retribusi telah di hapus, sehingga realisasi PAD dari retribusi daerah mengalami penurunan.
2. Sarana dan prasarana yang ada kurang mendukung, khususnya akses transportasi yang berdampak pada sedikitnya investor yang mau menanamkan modalnya di Kabupaten Pacitan.

b. Solusi

Sebagai upaya mengatasi permasalahan peningkatan Pendapatan Daerah telah dilakukan solusi/ langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak daerah/ retribusi daerah untuk dapat menunaikan kewajibannya sesuai dengan besaran dan waktu yang ditetapkan serta berupaya meningkatkan peran perusahaan daerah guna meningkatkan usahanya sehingga dapat meningkatkan kontribusi PADnya.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi (utamanya transportasi jalan) serta peningkatan iklim yang kondusif untuk mendukung masuknya investor ke Kabupaten Pacitan serta memberikan kemudahan dan insentif kepada para investor.

## **C.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH**

Secara definitif belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah Kabupaten Pacitan diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program pembangunan daerah. Agar keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan dapat dikelola dengan baik, maka perlu dilakukan perencanaan

keuangan, dengan selalu menggali potensi pendapatan, melakukan efisiensi belanja serta mengembangkan sumber pembiayaan.

#### **1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah**

Keuangan Daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Keuangan daerah yang berhasil akan dapat mengumpulkan dana bagi pembiayaan pembangunan. Sumber pembiayaan pembangunan berasal dari daerah sendiri, pemerintah pusat, swasta, dan masyarakat. Sumber pembiayaan pembangunan yang penting untuk diperhatikan adalah penerimaan daerah sendiri. Hal ini demikian penting karena sumber inilah yang merupakan wujud partisipasi langsung masyarakat suatu daerah dalam mendukung proses pembangunan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2011 tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip *money follow function* sebagai konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas,



akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan menekankan pada upaya efisiensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pengelolaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya meliputi :

- Belanja daerah diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial masyarakat;

- Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran baik terhadap administrasi maupun terhadap masyarakat;
- Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pacitan maka Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah diarahkan sebagai berikut :

1. Penajaman belanja daerah dengan skala prioritas pada pengadaan barang dan jasa yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat;
2. Meningkatkan proporsi belanja modal yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi dan pemberdayaan rakyat;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah melalui penerapan standar analisa belanja dan standar harga serta

intensifikasi pengawasan baik oleh aparatur pengawasan fungsional maupun masyarakat;

Meningkatkan akuntabilitas (*accountability*) dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas oleh setiap Satuan Kerja serta penerapan Sistem Akuntansi yang sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah.

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2011 lebih menekankan pada upaya efisiensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan peñata usahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2011 dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2011;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
19. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
20. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi daerah untuk memihak kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.7 struktur APBD Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2011 proporsi belanja langsung mendapat alokasi sebesar 34,43 % dari total belanja daerah.

**Tabel III.42.**  
**Struktur Belanja APBD Kabupaten Pacitan**  
**Tahun Anggaran 2011**

Kode	JENIS BELANJA	JUMLAH ANGGARAN ( RP )	PERSENTASE ( % )
2.1	Belanja Tidak Langsung	583.072.765.826,77	65,57
2.1.1	Belanja Pegawai	506.826.605.258,77	57,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	7.927.956.868,00	0,89
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11.775.430.000,00	1,32
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	3.006.913.700,00	0,34
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	48.435.860.000,00	5,45
2.1.8	Belanja Tidak Tersangka	5.100.000.000,00	0,57
2.2	Belanja Langsung	306.137.284.332,00	34,43
2.2.1	Belanja Pegawai	27.271.317.905,00	3,07
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	110.618.376.969,00	12,44
2.2.3	Belanja Modal	168.247.589.458,00	18,92
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>889.210.050.158,77</b>	<b>100,00</b>

*Keterangan : Data sebelum Laporan Pertanggung Jawaban APBD Kab. Pacitan Tahun Anggaran 2011*

## 2. Target dan Realisasi Belanja

Target belanja APBD Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 889.210.050.158,77 realisasinya mencapai

Rp. 847.653.577.677,96 atau 95,33% yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 570.148.800.482,40 dan belanja langsung sebesar Rp. 277.504.777.195,56 sehingga terdapat penghematan sebesar Rp. 41.556.472.480,81

Dari kelompok belanja tidak langsung selain dipergunakan untuk belanja pegawai, pada tahun 2011 juga dialokasikan untuk:

1. Belanja Hibah yang diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan.
2. Belanja bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/ tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Bantuan tersebut sebagian besar diarahkan untuk organisasi sosial kemasyarakatan, bantuan Masjid dan Musholla, bantuan kepada siswa miskin dan guru madin, peringatan hari besar nasional, bantuan kepada penyandang masalah sosial dan lain sebagainya;
3. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten / kota kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

4. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa.

Belanja tersebut digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan tersebut sebagian besar diarahkan pada program Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), Bantuan Tunjangan Kesejahteraan RT/ RW, bantuan Operasional BPD, bantuan semen, PNPM, Purna Tugas Perangkat Desa, bantuan peningkatan infrastruktur pedesaan dan lain sebagainya;

5. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang-ulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Sedangkan dari kelompok belanja langsung di alokasikan untuk :

1. Belanja Pegawai yaitu untuk pengeluaran honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan.
2. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah;



3. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah.

Sebagai bentuk implementasi otonomi daerah maka kebijakan umum belanja langsung diarahkan pada :

1. Belanja Penyelenggaraan Program Pembangunan yang berdampak luas pada kepentingan publik;
2. Belanja Prioritas SKPD yakni untuk membiayai kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi serta urusan pemerintahan;
3. Menitikberatkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah;
4. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat;
5. Menjalankan program partisipasi penganggaran untuk isu-isu yang dominan antara lain : pendidikan, kesehatan, kemiskinan, prasarana dasar, isolasi wilayah serta lapangan kerja;
6. Melakukan efisiensi belanja, melalui :
  - a Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat
  - b Melakukan analisis efektifitas setiap program dan pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.

Setelah dilakukan operasionalisasi kebijakan belanja daerah dengan memperhatikan Kebijakan Nasional, Propinsi, Daerah dan faktor lain, maka target dan realisasi belanja daerah tahun 2011 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel III.43.**  
**Target dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Pacitan**  
**Tahun Anggaran 2011**

KODE	JENIS BELANJA	Target		Realisasi Belanja	
		Jumlah	Proporsi	Rp	Proporsi
2.1	Belanja Tidak Langsung	583.072.765.826,77	65,57	570.148.800.482,40	67,26
2.1.1	Belanja Pegawai	506.826.605.258,77	57,00	497.212.770.319,00	58,66
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	7.927.956.868,00	0,89	7.773.449.671,00	0,92
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11.775.430.000,00	1,32	11.519.575.625,00	1,36
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	3.006.913.700,00	0,34	2.862.551.917,40	0,34
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa	48.435.860.000,00	5,45	47.210.287.150,00	5,57
2.1.8	Belanja Tidak Tersangka	5.100.000.000,00	0,57	3.570.165.800,00	0,42
2.2	Belanja Langsung	306.137.284.332,00	34,43	277.504.777.195,56	32,74
2.2.1	Belanja Pegawai	27.271.317.905,00	3,07	26.501.880.289,00	3,13
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	110.618.376.969,00	12,44	106.747.844.723,54	12,59
2.2.3	Belanja Modal	168.247.589.458,00	18,92	144.255.052.183,02	17,02
	Jumlah Belanja	889.210.050.158,77	100,00	847.653.577.677,96	100,00

Keterangan : Data sebelum Laporan Pertanggung Jawaban APBD Kab. Pacitan Tahun Anggaran 2011

Berdasarkan kondisi pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan daerah yang ada, maka target dan realisasi APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2011 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel III.44.**  
**Target dan Realisasi APBD Kabupaten Pacitan**  
**Tahun Anggaran 2011**

Kode	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	44.340.003.127,00	48.359.915.660,96	109,07
1.2	Dana Perimbangan	580.546.898.133,00	583.216.975.459,00	100,46
1.3	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	217.782.733.777,00	226.660.054.982,94	104,08
	Jumlah Pendapatan	842.669.635.037,00	858.236.946.102,90	101,85
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
2.1	Belanja Tidak Langsung	583.072.765.826,77	570.148.800.482,40	97,78
2.2	Belanja Langsung	306.137.284.332,00	277.504.777.195,56	90,65
	Jumlah Belanja	889.210.050.158,77	847.653.577.677,96	95,33
	Surplus/Defisit	(46.540.415.121,77)	10.583.368.424,94	(22,74)
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	49.540.415.121,77	49.363.870.121,77	99,64
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
	Pembiayaan Netto	46.540.415.121,77	46.363.870.121,77	99,62
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		56.947.238.546,71	

*Keterangan : Data sebelum Laporan Pertanggung Jawaban APBD Kab. Pacitan Tahun Anggaran 2011*

Sesuai Target dan realisasi sebagaimana tabel diatas, APBD tahun anggaran 2011 telah dilaksanakan secara proposional. Disamping itu, masih terjadi selisih anggaran sehingga dapat melakukan penghematan dalam bentuk Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA), Siklus APBD terjaga sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tetap berada pada jalur prioritas visi dan misi daerah yang diharapkan dapat memberikan semaksimal mungkin manfaat bagi masyarakat Pacitan.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan PP 41 Tahun 2007 yang dikelola oleh masing-masing SKPD pada pemerintah Kabupaten Pacitan, rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pacitan Tahun 2011 dari masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III.45.**  
**Rekapitulasi APBD Kabupaten Pacitan Per Satuan Kerja Perangkat Daerah**  
**Tahun Anggaran 2011**

No	SKPD	PENDAPATAN			BELANJA								
					BELANJA TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG			JUMLAH BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	BUPATI/ WAKIL BUPATI	0,00	0,00	0,00	489.882.526,00	489.882.526,00	100,00	0,00	0,00	0,00	489.882.526,00	489.882.526,00	100,00
2	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	6.338.555.400,00	6.081.730.496,00	95,95	0,00	0,00	0,00	6.338.555.400,00	6.081.730.496,00	95,95
3	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0,00	0,00	0,00	4.606.317.081,00	4.525.646.506,60	98,25	1.983.717.000,00	1.965.347.523,00	99,07	6.590.034.081,00	6.490.994.029,60	98,50
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	1.690.320.432,00	1.708.894.041,40	101,10	1.748.049.000,00	1.712.111.765,00	97,94	3.438.369.432,00	3.421.005.806,40	99,50
5	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	0,00	0,00	1.765.523.664,00	1.732.045.143,60	98,10	1.404.500.000,00	1.337.137.478,00	95,20	3.170.023.664,00	3.069.182.621,60	96,82
6	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	0,00	0,00	0,00	1.898.681.494,00	1.855.244.595,60	97,71	2.035.750.000,00	2.020.625.190,00	99,26	3.934.431.494,00	3.875.869.785,60	98,51
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	242.842.625,00	97,14	250.000.000,00	242.842.625,00	97,14
8	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK	0,00	0,00	0,00	1.431.884.725,00	1.312.877.708,00	91,69	742.500.000,00	737.110.847,00	99,27	2.174.384.725,00	2.049.988.555,00	94,28
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL	0,00	0,00	0,00	2.003.187.536,00	1.982.696.066,20	98,98	4.790.000.000,00	4.730.793.961,00	98,76	6.793.187.536,00	6.713.490.027,20	98,83
10	DINAS BINAMARGA DAN PENGAIRAN	83.595.700,00	152.636.800,00	182,59	3.843.928.300,00	3.748.225.753,00	97,51	54.029.928.300,00	53.699.156.016,00	99,39	57.873.856.600,00	57.447.381.769,00	99,26
11	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	6.000.000,00	0,00	0,00	4.229.391.135,00	4.174.760.297,20	98,71	15.873.758.000,00	14.904.347.243,00	93,89	20.103.149.135,00	19.079.107.540,20	94,91
12	DINAS KEBUDAYAAN , PERIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.587.051.400,00	1.937.184.100,00	122,06	2.814.464.658,00	2.779.543.897,20	98,76	1.435.000.000,00	1.326.513.747,00	92,44	4.249.464.658,00	4.106.057.644,20	96,63
13	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	225.000.000,00	386.603.665,60	171,82	4.945.635.619,00	4.913.173.818,00	99,34	7.396.876.000,00	7.260.100.959,00	98,15	12.342.511.619,00	12.173.274.777,00	98,63
14	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	904.962.500,00	983.400.699,00	108,67	2.730.417.497,00	2.704.101.000,20	99,04	4.759.455.000,00	4.665.783.651,03	98,03	7.489.872.497,00	7.369.884.651,23	98,40

15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	342.515.000,00	502.445.000,00	146,69	1.376.406.441,00	1.364.397.503,80	99,13	1.525.000.000,00	1.499.123.989,00	98,30	2.901.406.441,00	2.863.521.492,80	98,69
16	DINAS KESEHATAN	3.632.336.240,00	3.632.526.700,00	100,01	29.277.944.462,00	28.923.821.427,80	98,79	10.494.188.000,00	10.253.471.814,00	97,71	39.772.132.462,00	39.177.293.241,80	98,50
17	DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	259.400.000,00	623.369.610,29	240,31	2.387.342.062,00	2.354.932.310,60	98,64	4.303.000.000,00	4.251.975.144,00	98,81	6.690.342.062,00	6.606.907.454,60	98,75
18	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	815.056.132.197,00	828.329.696.108,70	101,63	83.339.920.415,77	79.858.249.479,40	95,82	12.696.384.500,00	12.356.516.254,00	97,32	96.036.304.915,77	92.214.765.733,40	96,02
19	DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00	365.900.398.934,00	358.776.411.280,60	98,05	101.421.272.850,00	77.785.812.464,00	76,70	467.321.671.784,00	436.562.223.744,60	93,42
20	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.264.967.000,00	1.429.858.950,00	113,04	2.435.552.720,00	2.399.994.539,60	98,54	2.843.810.000,00	2.808.538.823,00	98,76	5.279.362.720,00	5.208.533.362,60	98,66
21	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	30.000.000,00	45.493.000,00	151,64	1.601.377.047,00	1.587.525.680,20	99,14	3.425.000.000,00	3.367.191.826,00	98,31	5.026.377.047,00	4.954.717.506,20	98,57
22	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00	2.241.031.369,00	2.205.263.062,60	98,40	2.434.287.500,00	2.407.561.328,00	98,90	4.675.318.869,00	4.612.824.390,60	98,66
23	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	55.860.000,00	55.905.500,00	100,08	6.044.923.454,00	5.893.429.050,40	97,49	11.378.613.500,00	11.160.286.777,00	98,08	17.423.536.954,00	17.053.715.827,40	97,88
24	INSPEKTORAT	0,00	0,00	0,00	1.687.332.775,00	1.683.762.751,20	99,79	1.130.000.000,00	1.114.745.104,00	98,65	2.817.332.775,00	2.798.507.855,20	99,33
25	SEKRETARIAT DAERAH	7.750.000,00	7.750.000,00	100,00	11.410.937.976,00	11.096.223.865,00	97,24	16.183.533.500,00	15.282.195.516,00	94,43	27.594.471.476,00	26.378.419.381,00	95,59
26	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	0,00	1.783.862.516,00	1.644.594.891,80	92,19	10.535.000.000,00	10.198.162.098,00	96,80	12.318.862.516,00	11.842.756.989,80	96,14
27	KANTOR KETAHANAN PANGAN	0,00	0,00	0,00	851.186.090,00	844.858.395,20	99,26	695.000.000,00	692.404.848,00	99,63	1.546.186.090,00	1.537.263.243,20	99,42
28	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	854.897.424,00	845.992.283,60	98,96	3.939.807.500,00	3.627.309.059,00	92,07	4.794.704.924,00	4.473.301.342,60	93,30
29	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN	1.035.920.000,00	1.052.851.048,77	101,63	892.273.385,00	888.712.184,80	99,60	760.000.000,00	750.700.228,00	98,78	1.652.273.385,00	1.639.412.412,80	99,22
30	KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	0,00	0,00	558.267.813,00	573.032.105,00	102,64	1.940.000.000,00	1.888.740.271,00	97,36	2.498.267.813,00	2.461.772.376,00	98,54
31	KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI	0,00	0,00	0,00	940.078.668,00	928.847.003,20	98,81	515.000.000,00	512.839.569,00	99,58	1.455.078.668,00	1.441.686.572,20	99,08
32	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	18.080.000.000,00	19.000.409.920,54	105,09	12.264.847.104,00	12.208.415.002,80	99,54	20.146.250.000,00	19.652.828.173,53	97,55	32.411.097.104,00	31.861.243.176,33	98,30
33	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	0,00	0,00	1.857.257.951,00	1.818.017.036,00	97,89	821.800.000,00	816.831.829,00	99,40	2.679.057.951,00	2.634.848.865,00	98,35
34	KANTOR KECAMATAN ARJOSARI	0,00	0,00	0,00	1.267.294.742,00	1.238.913.137,00	97,76	147.864.112,00	146.875.753,00	99,33	1.415.158.854,00	1.385.788.890,00	97,92
35	KANTOR KECAMATAN BANDAR	0,00	0,00	0,00	953.607.183,00	947.646.977,00	99,37	155.286.968,00	150.948.751,00	97,21	1.108.894.151,00	1.098.595.728,00	99,07

36	KANTOR KECAMATAN DONOROJO	0,00	0,00	0,00	1.226.718.203,00	1.193.213.783,60	97,27	156.263.600,00	155.056.641,00	99,23	1.382.981.803,00	1.348.270.424,60	97,49
37	KANTOR KECAMATAN KEBONAGUNG	0,00	0,00	0,00	1.107.783.208,00	1.091.073.991,20	98,49	168.493.491,00	167.753.216,00	99,56	1.276.276.699,00	1.258.827.207,20	98,63
38	KANTOR KECAMATAN NAWANGAN	0,00	0,00	0,00	1.045.146.888,00	1.030.685.692,40	98,62	158.653.652,00	158.207.381,00	99,72	1.203.800.540,00	1.188.893.073,40	98,76
39	KANTOR KECAMATAN NGADIROJO	0,00	0,00	0,00	1.271.291.982,00	1.243.423.474,40	97,81	165.969.338,00	159.915.899,00	96,35	1.437.261.320,00	1.403.339.373,40	97,64
40	KANTOR KECAMATAN PACITAN	0,00	0,00	0,00	1.592.029.009,00	1.581.553.597,40	99,34	179.672.208,00	178.684.980,00	99,45	1.771.701.217,00	1.760.238.577,40	99,35
41	KANTOR KECAMATAN PRINGKUKU	0,00	0,00	0,00	1.150.723.015,00	1.122.725.018,40	97,57	158.152.718,00	157.424.503,00	99,54	1.308.875.733,00	1.280.149.521,40	97,81
42	KANTOR KECAMATAN PUNUNG	0,00	0,00	0,00	1.309.777.358,00	1.273.144.420,00	97,20	158.152.718,00	156.426.010,00	98,91	1.467.930.076,00	1.429.570.430,00	97,39
43	KANTOR KECAMATAN SUDIMORO	0,00	0,00	0,00	803.938.649,00	790.897.362,20	98,38	151.550.030,00	150.959.420,00	99,61	955.488.679,00	941.856.782,20	98,57
44	KANTOR KECAMATAN TEGALOMBO	0,00	0,00	0,00	1.033.365.348,00	991.402.311,20	95,94	162.230.108,00	159.860.199,00	98,54	1.195.595.456,00	1.151.262.510,20	96,29
45	KANTOR KECAMATAN TULAKAN	0,00	0,00	0,00	1.667.655.571,00	1.621.096.706,00	97,21	177.514.739,00	176.914.739,00	99,66	1.845.170.310,00	1.798.011.445,00	97,44
46	KELURAHAN BALEHARJO	7.400.000,00	7.400.000,00	100,00	433.456.467,00	428.447.902,60	98,84	110.000.000,00	109.318.445,00	99,38	543.456.467,00	537.766.347,60	98,95
47	KELURAHAN PACITAN	31.320.000,00	31.680.000,00	101,15	459.976.541,00	454.544.605,60	98,82	115.000.000,00	113.411.702,00	98,62	574.976.541,00	567.956.307,60	98,78
48	KELURAHAN PLOSO	20.125.000,00	20.125.000,00	100,00	422.371.849,00	412.733.085,20	97,72	112.500.000,00	112.372.947,00	99,89	534.871.849,00	525.106.032,20	98,17
49	KELURAHAN PUCANGSEWU	12.050.000,00	12.360.000,00	102,57	410.220.279,00	402.509.038,60	98,12	110.000.000,00	109.395.125,00	99,45	520.220.279,00	511.904.163,60	98,40
50	KELURAHAN SIDOHARJO	27.250.000,00	25.250.000,00	92,66	423.380.861,00	419.487.677,00	99,08	112.500.000,00	112.145.365,00	99,68	535.880.861,00	531.633.042,00	99,21
<b>JUMLAH</b>		<b>842.669.635.037,00</b>	<b>858.236.946.102,90</b>	<b>101,85</b>	<b>583.072.765.826,77</b>	<b>570.148.800.482,40</b>	<b>97,78</b>	<b>306.137.284.332,00</b>	<b>277.504.777.195,56</b>	<b>90,65</b>	<b>889.210.050.158,77</b>	<b>847.653.577.677,96</b>	<b>95,33</b>

#### **D. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH**

Beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam menunjang kelancaran setiap kegiatan dan program yang telah ditetapkan untuk dapat mendukung tercapainya sasaran sebagaimana diuraikan di atas antara lain adalah :

- 1) Perencanaan (planning) yang sistematis dan akurat dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- 2) Tersedianya fasilitas (sarana dan prasarana) yang memadai;
- 3) Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan; baik berupa Peraturan Bupati, Peraturan Daerah maupun peraturan perundangan yang lebih tinggi.
- 4) Kemampuan (kualitas dan kuantitas) Sumber Daya Manusia aparatur yang memadai;
- 5) Terpenuhinya kebutuhan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan;
- 6) Terpenuhinya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar instansi dan lintas sektor terkait yang terbina dengan baik dan harmonis.

Pada setiap pelaksanaan kegiatan pasti tidak dapat lepas dari hambatan atau kendala, hanya yang membedakan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain adalah intensitas dari hambatan atau kendala yang dihadapi tersebut.



Di bawah ini beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menunjang tercapainya sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2010 antara lain :

- 1) Masih kurang optimal koordinasi dalam menyusun perencanaan kegiatan sehingga masih terkesan parsial, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan). Masih adanya perbedaan persepsi tentang *overlapping* tugas dan fungsi antara SKPD/Unit Kerja bisa menyebabkan adanya kegiatan ganda.
- 2) Masih belum optimalnya kemampuan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan kegiatan, kualitas dan kuantitas SDM masih kurang, masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai kompetensinya sehingga kinerjanya tidak optimal dan mempengaruhi kinerja organisasi, masih adanya jabatan struktural yang belum terisi sehingga kinerja organisasi juga kurang maksimal;
- 3) Keterbatasan anggaran pemerintah daerah (APBD Kabupaten) sehingga belum semua indikator kinerja didukung oleh kegiatan yang teranggarkan;
- 4) Dukungan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah yang masih belum mencukupi kebutuhan yang sesungguhnya;
- 5) Kurang diperhatikannya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan, masih banyak SKPD/Unit kerja yang belum memiliki Sistem Informasi yang terintegrasi sehingga sumber data kurang valid dan terukur; Kurangnya perhatian terhadap hasil-hasil penelitian,

pengembangan dan statistik sebagai bahan usulan bagi pengambilan kebijakan.

- 6) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lintas sektor terkait, swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- 7) Belum optimalnya dukungan, partisipasi serta pemberdayaan masyarakat Kabupaten Pacitan dalam pelaksanaan program-program pembangunan.
- 8) Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal karena dukungan Peraturan Daerah belum terbentuk/belum disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini.

Suatu permasalahan atau masalah pada dasarnya timbul akibat sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan harapan atau rencana yang telah ditetapkan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pasti akan menemui suatu masalah, kendala dan hambatan sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi setiap permasalahan yang timbul.

Beberapa alternatif pemecahan masalah terhadap kendala dan hambatan tersebut antara lain :

- 1) Sudah dimulai kegiatan pembinaan dan bimbingan kepada SKPD/Unit Kerja untuk memahami dan bisa mengukur indikator kinerjanya masing-masing dan memprioritaskan kegiatan yang mendukung pencapaian indikatornya.
- 2) Sangat diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang sistematis, terkoordinir dan komprehensif;

Dalam hal ini sudah dirintis dan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan  
Tahun 2011 – 2016

- 3) Peningkatan dan pengembangan SDM selalu ditingkatkan baik melalui pembinaan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, penempatan pegawai (mutasi) menyesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Perlu peningkatan kualitas aparatur pemerintah, misalnya melalui diklat, seminar, studi banding, tugas belajar serta pemilihan mitra kerja yang tepat (berkualitas, profesional dan bertanggungjawab);
- 4) Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dan didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif;
- 5) Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan sangat diperlukan, untuk itu perlu juga adanya perencanaan dan klasifikasi yang baik terhadap fasilitas, sarana dan prasarana penunjang; mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia;
- 6) Pengembangan sistem jaringan informasi dan peningkatan kualitas data dan informasi di SKPD, pengembangan data statistik daerah guna mendukung terwujudnya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan;
- 7) Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi dan lintas sektor terkait dengan harapan pelaksanaan koordinasi dapat terlaksana dengan baik; Hal ini sudah dirintis dengan dilaksanakannya Rapat Kerja Bupati dengan SKPD, Rapat Kerja Bupati dengan Instansi

Vertikal, menjalin kerjasama yang baik dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa.

- 8) Perlu meningkatkan dukungan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di seluruh bidang pemerintahan dalam mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Pacitan. Meningkatnya kegiatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin), Bulan Bhakti Gotong Royong dan lain-lain.
- 9) Koordinasi dengan SKPD dalam rangka peninjauan kembali Peraturan serta penyusunan draft Peraturan Daerah yang baru menyesuaikan kondisi saat ini.

Dengan adanya upaya-upaya pemecahan masalah tersebut diharapkan permasalahan yang sama tidak akan muncul sehingga capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan akan meningkat di tahun-tahun mendatang.